PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH IKAN TUNA UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN PACITAN

(Studi pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan)

SKRIPSI

Diajukan untuk menempuh Ujian Sarjana

pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya

RIYAN FIMA ANGGRAENY

NIM. 125030100111145

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS ILMU ADMINISTRASI

JURUSAN ILMU ADMNINISTRASI PUBLIK

MALANG

2016

repository.ub.ac.id

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

MOTTO

“Lakukan segala sesuatu dengan keyakinan yang positif,

IYA ATAU TIDAK.. BUKAN MUNGKIN”

-H. Soekarman

HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan Rahmat Allah Yang Maha Segalanya, saya persembahahkan hasil karya Skripsi ini untuk :

Kedua Orangtua terhebatku, Ayah dan Ibu yang telah memberikan segala kasih sayang, semangat dan motivasi selama ini. Semoga dengan karya ini, sedikit bisa membanggakan Ayah dan Ibu.

Kedua adikku tercinta, Fian Alma Arij Renanda dan Fina Salama Qowlam Hareny, terimakasih atas segala perhatian, ocehan semangat, kasih sayang dan dukungan yang telah diberikan selama ini. Semoga ini sedikit membanggakan adik-adikku.

Sahabat dari awal ospek yang hingga saat ini selalu ada untukku, Deasy Rahayu, Ratna Adinigrum, Desya "Ikal", Habsyi Pasaka. Sahabat ceriwis yang banyak cerewet nasehatin Intan "Bund"Ayu Kartikasari, Resty Wula"Ndari", Septira"Mbok" Permaeswari, "Om"thez Resma, dan Dicky "Ncez" Nicho. Sahabat berjuang dari kuliah, kenangan TA, susah seneng ngajuin judul berdua, sempro bareng, kompre bareng, yudisium bareng, lulus bareng, tempat nangis curhat apapun, Vika Alif. Sahabat kampus Publik G, Publik 2012, Kak Ros, Boim, Fadilla, Ganis, Waffa, Ardy, Jono, Lutfi, Dwi, Satrio, terimakasih atas segala bantuan dan semangatnya. Sahabat Kost Bethek 80 Ratih, Sanisca, Arnes, Amel, Gina, Dyah, Lilia, Rasti, Utik, Evi, Susan. Sahabat Kost SST 25 Tubie,Novie Venya, Brili. Serta banyak sahabat yang telah memberikan semangat serta dukungan yang tidak dapat saya sebut satu persatu.

TERIMAKASIH SEMUANYA

TANDA PENGESAHAN

Telah dipertahankan di depan Majelis Penguji Skripsi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya, pada:

Hari	: Selasa
Tanggal	: 16 Agustus 2016
Jam	: 09.00-10.00
Skripsi atas nama	: Riyan Fima Anggraeny
Judul	: Pemberdayaan Industri Kecil Dan Menengah Ikan Tuna Untuk Peningkatan Pendapatan Masyarakat Di Kabupaten Pacitan (Studi pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan).

Malang, 18 Agustus 2016

Dan Dinyatakan LULUS

MAJELIS PENGUJI

Ketua

Prof. Dr. Abdul Juli Andi Gani , MS
NIP. 19540704 198103 1 003

Anggota

Dr. Mochamad Makmur, MS
NIP. 19511028 198003 1 002

Penguji I

Wike, S.Sos., M.Si, P.hD
NIP. 19701126 200212 2 005

Penguji II

Drs. Stefanus Pani Rengu, MAP
NIP. 19531113 198212 1 001

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Judul : Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah Ikan Tuna Untuk Peningkatkan Pendapatan Masyarakat di Kabupaten Pacitan (Studi pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan)

Disusun Oleh : Riyan Fima Anggraeny

NIM : 125030100111145

Fakultas : Ilmu Administrasi

Jurusan : Ilmu Administrasi Publik

Konsentrasi : -

Malang, 2 Agustus 2016

Komisi Pembimbing

Ketua	Anggota
Prof. Dr. Abdul Juli Andi Gani, MS	Dr. Mochamad Makmur, MS
NIP. 19540704 198103 1 003	NIP.19511028 198003 1 002

repository.ub.ac.id

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Saya menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa sepanjang pengetahuan di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang diajukan oleh pihak lain untuk mendapatkan suatu gelar atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebut dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila ternyata saya di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur yang jiplakan atau mengcopy, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (S-1) dibatalkan serta diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003, Pasal 25 Ayat 2 dan Pasal 70)

Malang, 2 Agustus 2016

Riyan Fima Anggraeny
125030100111145

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

RINGKASAN

Riyan Fima Anggraeny, 2016, Pemberdayaan Industri Kecil Dan Menengah Ikan Tuna Untuk Peningkatan Pendapatan Masyarakat Di Kabupaten Pacitan (Studi pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan). Ketua: Prof. Dr. Abdul Juli Andi Gani, MS. Anggota: Dr. Moch. Makmur, MS, 115+xiii.

Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan sebagai ujung tombak dalam mendukung berkembangnya Industri dalam peningkatan pendapatan masyarakat melalui pengembangan sumber daya dan potensi lokal yang tersedia. Diharapkan dengan adanya pengembangan Industri berbasis sumber daya dan potensi lokal, bisa mengatasi perekonomian masyarakat. Penelitian ini membahas rumusan masalah. Pertama, bagaimana pemberdayaan industri kecil dan menengah ikan tuna untuk peningkatan pendapatan masyarakat di Kabupaten Pacitan. Kedua, apa saja yang menjadi faktor pendorong dan faktor penghambat dari pemberdayaan industri kecil dan menengah ikan tuna untuk peningkatan pendapatan masyarakat di Kabupaten Pacitan. Tujuan dari penelitian ini adalah memperoleh informasi, mendeskripsikan dan menganalisis tentang pemberdayaan industri kecil dan menengah ikan tuna untuk peningkatan pendapatan masyarakat di Kabupaten Pacitan, untuk mengetahui,mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendorong dan faktor penghambat dari pemberdayaan industri kecil dan menengah ikan tuna untuk peningkatan pendapatan masyarakat di Kabupaten Pacitan

Penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Fokus penelitian yang pertama tentang Tahap dan langkah Pemberdayaan industri kecil dan menengah ikan tuna untuk peningkatan pendapatan masyarakat di Kabupaten Pacitan, Pembinaan manajemen dan permodalan. Aspek yang akan diteliti berdasarkan (Randy R Wrihantomolo dan Riant Nugroho D, 2007 :119-120) yaitu Tahap Penyadaran, Tahap Pengkapasitasan, Tahap Pendayaan. Kedua, faktor pendorong dan faktor penghambat dari pemberdayaan industri kecil dan menengah ikan tuna untuk peningkatan pendapatan masyarakat di Kabupaten Pacitan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dokumentasi. Analisis data menggunakan model analisa Miles, Huberman dan Saldana.

Saran dari penelitian ini adalah sebaiknya Diskoperindag rutin melakukan sosialisasi. Jadi, sosialisasi yang diberikan tidak hanya pada awal tahap pemberdayaan. Diskoperindag sebaiknya lebih mempererat kerjasamanya dengan Dinas Kelautan dan Perikanan. Mengingat keduanya mempunyai peran yang penting bagi IKM Ikan Tuna. Menambahkan penyuluh khusus yang turun langsung kepada masyarakat untuk melakukan pelatihan.

Kata Kunci : Pemberdayaan, IKM, Koperasi

repository.ub.ac.id

SUMMARY

Riyan Fima Anggraeny, 2016, The Empowerment of Small and Middle Industries of *Tuna* to Improve Public Incomes in Pacitan District (Study on service cooperatives, trade and industry of Pacitan district). Primary Supervisor: Prof. Dr. Abdul Juli Andi Gani, MS. Second Supervisor: Dr. Moch. Makmur, MS, 115+xiii.

Department of industry and commerce cooperative of Pacitan district is a spearhead in supporting the development of the industry in increasing public income through the development of available resources and local potency. By the development of resource and local potency-based industries, it is expected to overcome public economy. This study discussed two problems. First, how does the empowerment of small and middle industries of *Tuna* to improve public income in Pacitan district. Second, what are supporting and obstacle factors from the empowerment of small and middle industries of *Tuna* to improve public income in Pacitan district. The purposes of this study were to gain information, to describe and analyze the empowerment of small and middle industries of *Tuna* to improve public income in Pacitan district, to recognize, describe, and analyze supporting and obstacle factors from the empowerment of small and middle industries of *Tuna* to improve public income in Pacitan district.

This study used descriptive research with qualitative approach. The first focus of this study was stage and step of the empowerment of small and middle industries of *Tuna* to improve public income in Pacitan district, the guidance of management and capital. Three aspects that will be investigated based on (Randy R Wrihantomolo and Riant Nugroho D, 2007: 119-120), namely awareness stage, capacity stage, and inveiglement stage. Second, the supporting and obstacle factors from the empowerment of small and middle industries of *Tuna* to improve public income in Pacitan district. Technique to gain the data was done by interview, observation, and documentation. The data analysis used analysis model of Miles, Huberman, and Saldana.

Suggestion of this study was that Diskoperindag supposed to carry out socialization routinely. So, the socialization shared was not only on the first stage of empowerment. Dispkoperindag supposed to strengthen its cooperation with department of maritime affairs and fisheries. Considering that they have an important role to IKM of *Tuna*. Providing a special instructor who gives a training toward society.

Key words: Empowerment, IKM, Cooperative

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatakan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul "**PEMBERDAYAAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH IKAN TUNA UNTUK PENINGKATAN PENDAPATAN MASYARAKAT DI KABUPATEN PACITAN"** (Studi pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan). Skripsi ini merupakan tugas akhir yang diajukan oleh penulis untuk memenuhi syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Ilmu Administrasi Publik pada Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya khususnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bambang Supriyono, M.S, selaku Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang.
2. Bapak Dr. Choirul Saleh, M.Si., selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik.
3. Ibu Dr. Lely Indah Mindarti, M.Si., selaku Ketua Prodi Administrasi Publik.
4. Bapak Prof. Dr. Abdul Juli Andi Gani , MS selaku Ketua Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan atas skripsi penulis.

5. Bapak Dr. Moch. Makmur, MS selaku Anggota Pembimbing yang telah memberikan bimbingan, arahan, dan masukan atas skripsi penulis.
6. Bapak Drs. Supomo, MM selaku Kepala Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan
7. Bapak Nanang Endrajanto, SE.MM selaku Kabid Perindustrian
8. Ibu Dwi Kusumaningsih, SP selaku sie Bina Sarana Bidang Perindustrian
9. Semua pihak yang telah membantu dan mendukung hingga selesainya skripsi ini.

Dengan demikian skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga karya skripsi ini bermanfaat dan dapat memberikan sumbangan yang berarti bagi pihak yang membutuhkan.

Penulis

DAFTAR ISI

MOTTO i
TANDA PENGESAHAN ii
TANDA PERSETUJUAN iii
PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI iv
RINGKASAN v
SUMMARY vi
KATA PENGANTAR vii
DAFTAR ISI ix
DAFTAR GAMBAR xi
DAFTAR TABEL xii
DAFTAR LAMPIRAN xiii

BAB I PENDAHULUAN
A. Latar Belakang 1
B. Rumusan Masalah 9
C. Tujuan Penelitian 10
D. Manfaat Penelitian 10
E. Sistematika Pembahasan 11

BAB II KAJIAN PUSTAKA
A. Administrasi Publik
1. Pengertian Administrasi Publik 13
2. Fungsi-Fungsi Administrasi Publik 14
3. Ruang Lingkup Administrasi Publik 15
B. Pemberdayaan
1. Pengertian Pemberdayaan 17
2. Pemberdayaan Masyarakat 18
3. Tahapan dan Langkah-Langkah Pemberdayaan 20
C. Industri Kecil dan Menengah (IKM)
1. Pengertian Industri Kecil 22
2. Kriteria-Kriteria Industri Kecil 24
3. Fungsi dan Peranan Industri Kecil 25
4. Jenis-Jenis Industri Kecil 26
5. Kelebihan dan Kekurangan Industri Kecil 25
6. Industri Menengah 30
7. Industri Kecil dan Menengah 30
8. Strategi Pemberdayaan IKM 33
D. Koperasi
1. Pengertian Koperasi 36
2. Fungsi dan Peranan Koperasi 37
3. Prinsip Koperasi 38

4. Keanggotaan Koperasi 38

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian 41
B. Fokus Penelitian 42
C. Lokasi dan Situs Penelitian 44
D. Sumber Data 45
E. Teknik Pengumpulan Data..... 46
F. Instrumen Penelitian 48
G. Analisis Data 50

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian
1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Kabupaten Pacitan..... 53
2. Gambaran Umum Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan..... 58
3. Industri Olahan Ikan Tuna..... 72

B. Penyajian Data Fokus Penelitian
1. Pemberdayaan Industri Kecil Dan Menengah Ikan Tuna Untuk Peningkatan Pendapatan Masyarakat Di Kabupaten Pacitan..... 73
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah Ikan Tuna Kabupaten Pacitan..... 86

C. Analisa Data Fokus Penelitian
1. Pemberdayaan Industri Kecil Dan Menengah Ikan Tuna Untuk Peningkatan Pendapatan Masyarakat Di Kabupaten Pacitan..... 94
2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah Ikan Tuna Kabupaten Pacitan..... 97

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 105
B. Saran..... 110

DAFTAR PUSTAKA..... 113

LAMPIRAN..... 116

DAFTAR GAMBAR

No.	Judul	Halaman
1.	Analisis Data Model Interaktif.....	52
2.	Peta Kabupaten Pacitan.....	54
3.	Struktur Organisasi Diskoperindag Kab. Pacitan.....	59
4.	Grafik Produksi Perikanan Laut Tahun 2015 Kab. Pacitan.....	73
5.	Produk Olahan Ikan Tuna.....	82

DAFTAR TABEL

No.	Judul	Halaman
1.	Harga Dasar Ikan Tuna di Pelabuhan Tamperan.....	7
2.	Data Industri Ikan Tuna di Kab. Pacitan.....	7
3.	Penyebaran Penduduk per Kecamatan di Kab. Pacitan 2011.....	55
4.	Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan *Sex Rati*.....	56
5.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Pegawai.....	69
6.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin.....	70
7.	Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Kepangkatan.....	70
8.	Data Perlengkapan Diskoperindag.....	71
9.	Industri Ikan Tuna Kab. Pacitan Tahun 2015.....	79
10.	Harga Produk Olahan Ikan Tuna.....	81
11.	Usulan Sertifikasi Halal 2015 IKM Ikan Tuna.....	84

LAMPIRAN

NO.	Judul	Halaman
1.	Surat Rekomendasi Penelitian dari Bangkesbangpol Kab. Pacitan.....	116
2.	Pedoman Wawancara kepada Diskoperindag.....	118
3.	Pedoman Wawancara kepada Industri Tahu Tuna.....	119
4.	Data IKM Bersertifikat.....	121
5.	Urusan Kelautan dan Perikanan Kab. Pacitan.....	124
6.	Harga Dasar Ikan Tuna di Pelabuhan Tamperan.....	131
7.	Data IKM Ikan Tuna Kab.Pacitan Tahun2015.....	132
8.	Produksi Laut Kab. Pacitan Tahun 2015.....	133

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan sebuah negara yang memiliki beraneka ragam sumber daya alam yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Indonesia sebagian besar wilayahnya meliputi perairan dan memiliki banyak pulau di dalamnya. Hal ini menjadikan Indonesia memiliki peluang besar menjadi negara unggulan di bidang kelautan. Bidang kelautan saat ini merupakan urat nadi penghasilan bagi mayoritas penduduk di kawasan pesisir pantai. Bidang hasil laut tersebut meliputi wisata bahari, perikanan, sarana perhubungan laut.

Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti dalam website resmi Kementrian Kelautan dan Perikanan yang dikelola oleh Humas Kementrian Kelautan dan Perikanan mengatakan bahwa Indonesia memiliki kekayaan maritim dan potensi bahari yang luar biasa besar. Dengan luas laut dan perairan yang mencapai 2/3 wilayah Indonesia, yakni sebesar 5,8 juta km² dan panjang pantai sekitar 97 ribu km, tentu hal ini menggambarkan potensi sektor kelautan yang sangat menjanjikan untuk dikembangkan. Banyak bisnis-bisnis potensial yang berbasis pada sumberdaya (*resources based industry*) dapat menjadi peluang, seperti industri kelautan, perikanan, pariwisata, industri olahan, industri jasa kelautan dan industri lainnya yang ramah lingkungan. Peran yang sangat besar dari sumber daya kelautan tersebut meliputi meningkatnya pendapatan masyarakat, adanya pembangunan daerah, tersedianya bahan kebutuhan dasar masyarakat, dan terbukanya lapangan pekerjaan. Sebagian besar masyarakat

pesisir laut di Indonesia bergantung pada laut Indonesia. Masyarakat pesisir berupaya memaksimalkan sumber daya kelautan yang tersedia untuk meningkatkan pendapatan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mengamanatkan bahwa tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah (1) melindungi, mengoservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan, (2) menciptakan keharmonisan dan sinergi antara Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil, (3) memperkuat peran serta masyarakat dan lembaga pemerintah serta mendorong inisiatif masyarakat dalam pengelolaan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil agar tercapai keadilan, keseimbangan, dan berkelanjutan, dan, (4) meningkatkan nilai sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat melalui peran serta masyarakat dalam pemanfaatan sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil.

Sumber daya dibidang kelautan yang dijadikan prioritas utama masyarakat pesisir adalah hasil tangkapan ikan laut. Namun, berdasarkan catatan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), rata-rata konsumsi ikan di Indonesia hanya 35kg per kapita/tahun. Jauh dibawah Jepang sebanyak 60kg per kapita/tahun dan Malaysia sebanyak 50kg per kapita/tahun. Beberapa faktor ditengarai sebagai penyebab rendahnya tingkat konsumsi ikan di Indonesia, antara lain karena (1) kurangnya pemahaman masyarakat tentang gizi dan manfaat protein ikan bagi kesehatan dan kecerdasan; (2) rendahnya suplai ikan, khususnya

ke daerah-daerah pedalaman akibat kurang lancarnya distribusi pemasaran ikan; (3) belum berkembangnya teknologi pengolahan/pengawetan ikan sebagai bentuk keanekaragaman dalam memenuhi tuntutan selera konsumen; dan (4) sarana pemasaran dan distribusi masih terbatas baik dari segi kualitas maupun kuantitas. *(kkp.go.id).*

Masyarakat pesisir pantai yang hanya sebagai nelayan kecil, harus pandai dalam menyiasati rendahnya jumlah permintaan ikan dalam Negeri yang disebabkan rendahnya minat masyarakat akan ikan. Rendahnya jumlah permintaan ikan dalam negeri, membuat harga ikan semakin rendah. Peran pemerintah sangat diperlukan untuk membantu masyarakat pesisir pantai. Salah satu yang dapat dilakukan pemerintah adalah dengan cara memaksimalkan peran serta masyarakat dan melaksanakan pemberdayaan masyarakat. Hal ini bertujuan untuk dapat mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pemberdayaan dan peran masyaraakat.

Ginandjar Kartasasmita (1997:20) memberikan pengertian pemberdayaan masyarakat sebagai berikut :

> "Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru prmbangunan, yakni yang bersifat berpusat pada masyarakat, partisipasi, pembinaan,dan berkelanjutan. Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut, yang pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan di masa yang lalu."

Konsep pemberdayaan masyarakat ini muncul karena adanya kegagalan sekaligus harapan. Kegagalan yang dimaksud adalah gagalnya model-model pembangunan ekonomi dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan

lingkungan yang berkelanjutan. Sedangkan harapan, muncul karena adanya alternatif pembangunan yang memasukkan nilai-nilai demokrasi,persamaan gender, dan pertumbuhan ekonomi yang memadai. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat mempunyai peran penting dalam kehidupan masyarakat. Pengertian pemberdayaan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 1 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Melihat pentingnya pemberdayaan, pemerintah daerah harus mampu menciptakan sebuah kebijakan, kebijakan tersebut ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam menentukan arah pembangunan, secara praktis menunjuk pada upaya memberdayakan, mengolah potensi lokal sebagai salah satu potensi yang dimiliki daerah yang notabene pelakunya mayoritas adalah rakyat yang kurang dalam pengaksesan pemodalah dan penguasaan pasar.

Kebijakan pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan pemerintah salah satunya melalui pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah

jadi dan atau barang jadi menjadi barang dengan nilai yang lebih tinggi lagi penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun industri dan perekayasaan industri (Kartasapoetra, 2000). Program pemberdayaan masyarakat melalui Industri Kecil dan Menengah membantu warga untuk mendapatkan pelatihan industri. Oleh karena Industri Kecil dan Menengah tergolong batasan Usaha Kecil dan Menengah menurut Undang-undang No. 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah, maka batasan Industri Kecil dan Menengah didefinisikan sebagai berikutn Industri Kecil adalah kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dengan jumlah pekerja 5-19 orang.

Salah satu daerah yang memberdayakan masyarakatnya melalui potensi lokal daerah adalah Kabupaten Pacitan. Kabupaten Pacitan merupakan salah satu daerah di Jawa Timur yang memiliki banyak potensi dan keunggulan daerah. Selain potensi wisata pantai dan *geopark* nya, potensi unggulan yang semakin maju adalah olahan hasil laut Pacitan. Berdasarkan data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan, luas wilayah laut Kabupaten Pacitan mencapai 7.636 Mil persegi dengan 12 pantai merupakan daerah untuk pendaratan ikan oleh

nelayan. Adapun potensi wilayah laut tersebut sebesar kurang lebih 8.443 ton pertahun.

Berdasarkan Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.45 Tahun 2009 tentang Perikanan telah mengamanatkan bahwa tujuan pengelolaan perikanan adalah untuk (1) meningkatkan taraf hidup nelayan kecil dan pembudidaya-ikan kecil, (2) meningkatkan penerimaan dan devisa negara, (3) mendorong perluasan kesempatan kerja, (4) meningkatkan ketersediaan dan konsumsi sumber protein ikan, (5) mengoptimalkan pengelolaan sumber daya ikan, (6) meningkatkan produktivitas, mutu, nilai tambah, dan daya saing, (7) meningkatkan ketersediaan bahan baku untuk industri pengolahan ikan, (8) mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya ikan dan, (9) menjamin kelestarian sumber daya ikan, lahan pembudidayaan ikan dan tata ruang.

Laut Pacitan terutama di Pantai Teleng Ria, mempunyai hasil Ikan Tuna yang melimpah. Berdasarkan data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan, hasil tangkapan ikan tuna pada tahun 2015 mencapai angka 1.322.846 Kg. M.Imam (2012) menyatakan bahwa Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur berupaya menjadikan pelabuhan perikanan Tamperan sebagai sentra peghasil tuna terbaik dan tertinggi di Provinsi Jawa Timur dan Nasional. Melimpahnya hasil tangkapan ikan tuna di pelabuhan Tamperan, berpengaruh terhadap harga dasar ikan tuna. Tabel di bawah menunjukkan harga dasar ikan tuna di pelabuhan Tamperan pada bulan Mei 2015.

Tabel 1 : Harga Dasar Ikan Tuna di Pelabuhan Tamperan

No.	Jenis Ikan Tuna	Harga (kg)
1	Tuna YF 20’	20.000
2	Tuna YF 15’	11000
3	Tuna YF 10’	9000
4	Tuna BE	8000
5	Tuna ALB	8000
6	Tuna B	7500
7	Tuna K	6000

Sumber: TPI Tamperan Pacitan

Harga dasar ikan tuna yang rendah inilah yang membuat masyarakat memutar otak agar supaya harga jual menjadi tinggi. Masyarakat banyak mengolahnya menjadi panganan khas Pacitan, misalnya Tahu Tuna, Bakso Tuna, Risol Tuna, Nugget Tuna, Otak-Otak Tuna, Abon Tuna, Kaki Naga dll. Banyak usaha kecil yang melakukan produksi hasil olahan Ikan Tuna, sehingga dalam bisnis hasil olahan Ikan Tuna Pacitan, mendorong pada persaingan. Jumlah unit usaha hasil olahan ikan tuna yang tercatat di Diskoperindag Kab. Pacitan sebanyak 29 usaha.Berikut data dalam tabel:

Tabel 2 : Data Industri Ikan Tuna di Kabupaten Pacitan

NO	NAMA PRODUK	PEMILIK	TNG KRJ (ORG)	
			L	P
1	Zada mandiri	Dheny kurniawan	3	4
2	Srikandi	Surtini	2	6
3	Cahaya barokah	Liliek marijani	1	6
4	Deandra	Dewi ratnasari	1	1
5	Berkah samudra	Yulida husni	-	3
6	Hikmah	Sukoyanti	-	3
7	Maju jaya	Rustyowati	-	4
8	Aditya	Retno susanti	2	2

9	Zafima	Tumarmi	2	5
10	Navar bahari raya	Kelompok	2	4
11	Nabila makmur	Yoyok dwi kuncoro	3	3
12	Sagita "sari laut"	Agustina ratna wati	-	2
13	Trisno roso,	Kunafiah	1	4
14	Mina jaya,	Wahana mekar lestari	3	5
15	Zalin	Zulaekhah	1	9
16	Eza mandiri,	Sukiran	40	-
17	Tahu tuna aroma,	Erwin triyono	4	5
18	Sumber rejeki,	Sarofah	1	4
19	Sari laut dua putri	Tugiarti	2	2
20	Bina makmur	Marsiah	3	11
21	Amanah	Juamiati	-	2
22	Sari ulam	Samdari	2	2
23	Khasanah	Meta persada	2	4
24	Idola	Winarti	-	5
25	Ilham abadi	Yuni setiyowati	-	2
26	Trisno samudro	Tri sutrisno	1	2
27	Tiga putri	Suryaning utami	-	2
28	Maju jaya lancar	Yani	2	3
29	Alfis	Alfi sa'adah	1	4

Sumber: Diskoperindag Kabupaten Pacitan

Tantangan pasar bagi pengusaha Industri Kecil dan Menengah (IKM) terutama penghasil hasil olahan Ikan Tuna semakin besar, sebab semakin banyak yang terjun dibidang ini sehingga harus benar-benar maksimal dalam menghasilkan produk yang bisa diminati masyarakat. Mempertahan kualitas dan layanan yang baik akan memberikan daya tarik tersendiri kepada konsumen.

Peneliti memilih untuk melakukan penelitian tentang Pemberdayaan Industri Kecil Dan Menengah Ikan Tuna Untuk Peningkatan Pendapatan Masyarakat Di

Kabupaten Pacitan (Studi pada Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan) disebabkan terdapat beberapa faktor. Diantaranya, pemerintah melalui Diskoperindag telah membuat program pemberdayaan IKM hasil olahan ikan tuna, tetapi muncul permasalahan bahwa tidak sedikit dari pelaku usaha kecil tersebut yang belum bergabung dengan program tersebut. Faktor lainnya adalah permasalahan IKM dalam kurang maksimalnya kemampuan masyarakat dalam mengolah Ikan Tuna dalam memaksimalkan produksi dan pemasaran.

Hasil olahan ikan tuna mempunyai potensi dan peluang yang cukup menjanjikan. Berdasarkan fenomena di atas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian tentang keberadaan IKM bagi terwujudnya peningkatan ekonomi masyarakat Kabupaten Pacitan. Fokus pengamatan lebih ditekankan pada proses pemberdayaan masyarakat pesisir pantai selatan Kabupaten Pacitan.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pemberdayaan industri kecil dan menengah ikan tuna untuk peningkatan pendapatan masyarakat di Kabupaten Pacitan?
2. Apa saja yang menjadi faktor pendorong dan faktor penghambat dari pemberdayaan industri kecil dan menengah ikan tuna untuk peningkatan pendapatan masyarakat di Kabupaten Pacitan?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini dapat dirinci sebagai berikut :

1. Memperoleh informasi, mendeskripsikan dan menganalisis tentang pemberdayaan industri kecil dan menengah ikan tuna untuk peningkatan pendapatan masyarakat di Kabupaten Pacitan
2. Untuk mengetahui,mendeskripsikan dan menganalisis faktor pendorong dan faktor penghambat dari pemberdayaan industri kecil dan menengah ikan tuna untuk peningkatan pendapatan masyarakat di Kabupaten Pacitan

D. Manfaat Penelitian

Melalui penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

   Manfaat teoritis dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan kontribusi tentang pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah untuk peningkatan pendapatan masyarakat.

2. Manfaat Praktis

   Manfaat praktis hasil penelitian ini dapat memberikan informasi yang bermanfaat bagi Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang dan sebagai kontribusi sumbangan pemikiran dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya masyarakat. Penelitian ini diharapkan

dapat menjadi inspirasi bagi calon peneliti yang tertarik untuk melakukan penelitian dibidang Industri Kecil dan Menengah (IKM).

E. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini membahas mengenai latar belakang, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika pembahasan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menguraikan mengenai landasan-landasan teori yang akan digunakan untuk mendasari penulisan skripsi yang terdiri dari *Governance,* pemberdayaan, Usaha Kecil dan Menengah, industri kecil, dan koperasi.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini memaparkan mengenai metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, fokus penelitian, lokasi dan situs penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, serta analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan tentang hasil dan pembahasan yang berisikan penyajian data (yang terkait dengan fokus penelitian), analisis data dan interprestasi data (mensinkronkan fokus, temuan data dan sejumlah teori yang ada).

BAB V PENUTUP

Bab ini memuat kesimpulan dari keseluruhan hasil dan juga saran untuk masalah yang dihadapi. Kesimpulan dan saran hasil penelitian diuraikan secara

garis besar merupakan temuan pokok, baik yang bersifat substansiall maupun metode teknis dari hasil pembahasan. Sedangkan saran merupakan rekomendasi tentang studi lanjutan dan kebijakan-kebijakan yang akan datang.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Administrasi Publik

1. Pengertian Administrasi Publik

Administrasi publik adalah *public administration may be defined as the coordinating of individual and group efforts to carry out public policy.* Administrasi publik dapat didefinisikan sebagai upaya koordinasi dari individu atau kelompok untuk menjalankan kebijakan publik (Pfiffner & Petrus, 1960 dalam Syafri 2011:20). Administrasi publik adalah Suatu kombinasi yang kompleks antara teori dan praktik, dengan tujuan mempromosikan pemahaman terhadap pemerintah dalam hubungannya dengan masyarakat yang diperintah, dan juga mendorong kebijakan publik agar lebih responsif terhadap kebutuhan sosial. Administrasi publik berusaha melembagakan praktik-praktik manajemen agar sesuai dengan nilai efektivitas, efisiensi, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat secara lebih baik (Nicholas Henry,1988 dalam Pasolong, 2012:56).

Administrasi publik adalah merupakan bentuk aksi dari pemerintahan, atau merupakan alat/sarana untuk mewujudkan tujuan pemerintahan. Administrasi publik sebagai satu aktivitas manusia yang berkaitan dengan pengaturan manusia dan barang yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan sosial kolektif, melibatkan berbagai macam ilmu sosial (Robert Presthus, 1975 dalam Darmadi 2009:137).

Menurut pengertian dan definisi tentang administrasi publik diatas, maka dapat diambil garis besar bahwa administrasi publik adalah proses kerja sama

yang dilakukan *stakeholder*, swasta serta masyarakat sebagai satu kesatuan guna mencapai tujuan dari sebuah negara dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Peran administrasi publik dalam sebuah negara sangat memberikan pengaruh yang besar, proses pengaturan dan pengelolaan sebuah pemerintahan ditentukan oleh penerapan administrasi publik dalam sebuah pemerintahan.

2. Fungsi-Fungsi Administrasi Publik

Administrasi Publik memiliki tiga fungsi utama (Tjokroamidjoyo, 1991 dalam Tjiptoherijanto & Manurung 2010:112).

a. Formulasi Kebijakan
   Fungsi formulasi kebijakan memiliki empat subfungsi, yaitu analisis kebijakan, perkiraan masa depan untuk menyusun langkah-langkah alternatif, penyusunan program/strategi dan pengambilan keputusan. Konsistensi formulasi kebijakan sangat dibutuhkan dalam pencapaian tujuan masyarakat yang sejahtera.
b. Pengaturan/Pengendalian Unsur-Unsur Administrasi
   Unsur-unsur administrasi yang perlu dikelola ialah struktur organisasi, keuangan, kepegawaian, dan sarana-sarana lain. Tugas administrasi adalah mendapatkan, menggunakan, mengendalikan keempat elemen administrasi tersebut diatas. Pengaturan/pengendalian unsur-unsur administrasi, tidak lain adalah pengelolaan internal administrasi publik atau dapat juga dikatakan sebagai pengelolaan kapasitas administrasi publik.
c. Penggunaan Dinamika Administrasi
   Dinamika administrasi (*the dynamics of administration*) meliputi kepemimpinan, koordinasi, pengawasan, dan komunikasi. Jika pengaturan/pengendalian unsur-unsur administrasi lebih menekankan pada aspek organisasi dari administrasi publik, maka penggunaan dinamika administrasi menekankan pada aspek manajemen dari administrasi publik.

Berdasarkan fungsi Administrasi Publik diatas, dapat dipaparkan mengenai fungsi dari Administrasi Publik. Fungsi dari Administrasi Publik lebih kepada untuk apa Administrasi Publik tersebut dilaksanakan. Pemaparan diatas juga menjelaskan tentang tugas-tugas yang dijalankan oleh Administrasi Publik dan

hubungannya dengan masyarakat. Seperti halnya perumusan kebijakan yang terus dilakukan formulasi. Kebijakan sangat dibutuhkan dalam pencapaian tujuan masyarakat yang sejahtera.

3. Ruang Lingkup Administrasi Publik

Pembahasan ruang lingkup administrasi publik, akan dijadikan sebagai ruang lingkup penelitian administrasi publik. Menurut Nicholas Henry (1995) dalam Pasolong (2012:64), dapat dilihat dari topik-topik yang dibahas selain perkembangan ilmu administrasi publik itu sendiri, antara lain :

a. Organisasi publik pada prinsipnya berkenaan dengan model-model organisasi, dan perilaku birokrasi.
b. Manajemen publik, yaitu berkenaan dengan sistem dan ilmu manajemen, evaluasi program dan produktivitas, anggaran publik, dan manajemen sumber daya manusia.
c. Implementasi yaitu menyangkut pendekatan terhadap kebijakan publik dan implementasinya, privatisasi, administrasi antar pemerintahan dan etika birokrasi.

Ruang lingkup atau cakupan administrasi negara sangat kompleks tergantung perkembangan kebutuhan dan dinamika masalah yang dihadapi masyarakat. Dengan adanya ruang lingkup administrasi, maka akan mempermudah dalam proses pelaksanaan Administrasi Publik. Selanjutnya ruang lingkup administrasi publik terbagi menjadi empat komponen (Dimock & Dimock, 1992 dalam Pasolong (2012:64), yaitu :

a. Apa yang dilakukan pemerintah : pengaruh kebijakan dan tindakan-tindakan politis, dasar-dasar, wewenang, lingkungan kerja pemerintah, penentuan tujuan-tujuan, kebijakan-kebijakan administratif yang bersifat ke dalam, dan rencana-rencana.
b. Bagaimana pemerintah mengatur organisasi, personalia, dan pembiayaan usaha-usahanya; struktur administrasi dari segi formalnya.
c. Bagaimana para administrator mewujudkan kerjasama (*teamwork*). Aliran dan proses administrasi dalam pelaksanaan, dengan titik berat pada pemimpin, tuntutan, koordinasi, pelimpahan wewenang, hubungan

pusat dengan bagian-bagian, pengawasan, moril, hubungan masyarakat dan sebagainya.

d. Bagaimana pemerintah tetap bertanggung jawab, baik mengenai pengawasan dalam badan-badan eksekutif sendiri, dan yang lebih penting lagi mengenai pengawasan oleh badan-badan eksekutif sendiri, dan yang lebih penting lagi mengenai pengawasan oleh badan-badan perwakilan rakyat, badan-badan yudikatif, dan berbagai badan lainnya.

Dari apa yang telah di uraikan diatas tentang administrasi publik, memandang administrasi sebagai suatu jenis kegiatan atau aktivitas pekerjaan atau perbuatan atau tindakan ataupun usaha. Namun demikian, kegiatan yang dilakukan, tidak hanya terdiri atas satu macam, melainkan merupakan suatu rangkaian kegiatan yang memusatkan perhatiannya pada bidang-bidang yang bersifat publik. Birokrasi memiliki peran yang penting. Berdasarkan uraian mengenai ruang lingkup Administrasi Publik yang telah dikemukakan, apapun yang dilakukan pemerintah sangatlah berpengaruh. Termasuk kebijakan yang diambil untuk menjaga hubungannya dengan masyarakat.

Administrasi Publik sangat berkaitan dengan judul penelitian yang diambil. Kaitannya adalah bahwa administrasi publik adalah proses kerja sama yang dilakukan *stakeholder,* swasta serta masyarakat sebagai satu kesatuan guna mencapai tujuan dari sebuah negara dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dalam judul yang di ambil, proses pemberdayaan IKM yang di lakukan perlu adanya campur tangan dari ketiga pihak yang ada dalam Administrasi Publik. Tanpa adanya campur tangan dari berbagai pihak pemerintahan, pemberdayaan IKM tersebut tidak dapat berjalan dengan baik. Pemberdayaan yang dilakukan merupakan suatu wujud pelayanan yang dilakukan pemerintah. Pelayanan berarti pula perilaku melayani, bukan dilayani, mendorong

bukan menghambat, mempermudah bukan mempersulit, sederhana bukan berbelit-belit, terbuka untuk setiap orang bukan hanya untuk segelintir orang. Dengan demikian makna administrasi publik sebagai wahana penyelenggaraan pemerintahan negara yang harus melayani publik harus benar-benar dihayati para penyelenggara pemerintahan negara.

B. Pemberdayaan

1. Pengertian Pemberdayaan

Pemberdayaan merupakan paradigma baru dalam pembangunan mayarakat yang melibatkan masyarakat dalam kegiatan pembangunan, baik dalam perencanaan, pelaksanaan, maupun evaluasi. Sulistiyani (2004), menjelaskan bahwa secara etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar "daya" yang berarti kekuatan atau kemampuan. Berdasarkan dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan dimaknai sebagai proses untuk memperoleh daya, kekuatan atau kemampuan, dan atau proses pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.

Pada hakekatnya, pemberdayaan adalah suatu proses dan upaya untuk memperoleh atau memberikan daya, kekuatan atau kemampuan kepada individu dan masyarakat lemah agar dapat mengidentifikasi, menganalisis, menetapkan kebutuhan dan potensi serta masalah yang dihadapi dan sekaligus memilih alternatif pemecahannya dengan mengoptimalkan sumberdaya dan potensi yang dimiliki secara mandiri. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan menengah pasal 1 Pemberdayaan adalah upaya

yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri.

Pemberdayaan merupakan bagian dari pembangunan dan saling memiliki keterkaitan. Dalam setiap proses pembangunan akan terjadi juga proses pemberdayaan masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar supaya kedepannya masyarakat dapat menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang baru. Pembangunan akan berkembang secara dinamis berdasar kemampuan dan kekuatan masyarakat sendiri, dalam rangka menumbuhkan usaha industrinya.

2. Pemberdayaan Masyarakat

Konsep pemberdayaan masyarakat muncul karena adanya kegagalan sekaligus harapan. Kegagalan yang dimaksud adalah gagalnya model-model pembangunan ekonomi dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan lingkungan yang berkelanjutan. Sedangkan harapan, muncul karena adanya alternative pembangunan yang memasukkan nilai-nilai demokrasi, persamaan gender, dan pertumbuhan ekonomi yang memadai. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Ginandjar Kartasasmita (1997:20) memberikan pengertian pemberdayaan masyarakat sebagai berikut :

> "Pemberdayaan masyarakat adalah sebuah konsep pembangunan ekonomi yang merangkum nilai-nilai sosial. Konsep ini mencerminkan paradigma baru prmbangunan, yakni yang bersifat berpusat pada masyarakat, partisipasi, pembinaan,dan berkelanjutan. Konsep ini lebih luas dari hanya semata-mata memenuhi kebutuhan dasar atau menyediakan mekanisme untuk mencegah proses pemiskinan lebih lanjut, yang pemikirannya belakangan ini banyak dikembangkan sebagai upaya mencari alternatif terhadap konsep-konsep pertumbuhan di masa yang lalu."

Konsep pemberdayaan masyarakat ini muncul karena adanya kegagalan sekaligus harapan. Kegagalan yang dimaksud adalah gagalnya model-model pembangunan ekonomi dalam menanggulangi masalah kemiskinan dan lingkungan yang berkelanjutan. Sedangkan harapan, muncul karena adanya alternatif pembangunan yang memasukkan nilai-nilai demokrasi,persamaan gender, dan pertumbuhan ekonomi yang memadai. Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya untuk meningkatkan harkat dan martabat lapisan masyarakat yang dalam kondisi sekarang tidak mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Dengan kata lain, pemberdayaan adalah memampukan dan memandirikan masyarakat.

Berkaitan dengan tujuan pemberdayaan masyarakat, Sulistyani (2014) menjelaskan bahwa tujuan yang ingin dicapai dari pemberdayaan masyarakat adalah untuk membentuk individu dan masyarakat menjadi mandiri. Kemandirian tersebut meliputi kemandirian berfikir, bertindak dan mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengankemampuan memikirkan, memutuskan serta melakukan sesuatu yang di pandang tepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang dihadapi dengan mempergunakan daya atau kemampuan yang dimiliki.

Daya kemampuan yang dimaksud adalah kemampuan kognitif, psikomotorik dan afektif serta sumber daya lainnya yang bersifat fisik atau material. Kondisi kognitif pada hakekatnya merupakan kemampuan berfikir yang dilandasi oleh pengetahuan dan wawasan seseorang dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi. Kondisi konatif merupakan suatu sikap perilaku masyarakat yang terbentuk dan diarahkan pada perilaku yang sensitif terhadap nilai-nilai pemberdayaan masyarakat. Kondisi afektif adalah merupakan perasaan yang dimiliki oleh individu yang diharapkan dapat diintervensi untuk mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku. Kemampuan psikomotorik merupakan kecakapan keterampilan yang dimiliki masyarakat sebagai upaya mendukung masyarakat dalam rangka melakukan aktivitas pembangunan.

3. Tahapan dan Langkah-Langkah Pemberdayaan

Randy R Wrihantomolo dan Riant Nugroho D, (2007 :119-120) menyatakan bahwa sebuah proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan. Tahapan-tahapan pemberdayaan tersebut yaitu tahap penyadaran, tahap pengkapasitasan, dan tahap pendayaan. Tahap penyadaran, target sasaran yaitu masyarakat miskin diberikan pemahaman bahwa mereka mempunyai hak untuk menjadi berada. Disamping itu juga diberikan penyadaran bahwa mereka mempunyai kemampuan untuk keluar dari kemiskinannya. Pada tahap ini masyarakat miskin dibuat mengerti bahwa proses pemberdayaan itu harus berasal dari diri mereka sendiri. Diupayakan pula agar komunitas ini mendapat cukup informasi. Melalui informasi aktual dan akurat terjadi proses penyadaran secara alamiah. Proses ini dapat dipercepat dan di rasionalkan hasilnya dengan hadirnya upaya pendampingan.

Tahap Pengkapasitasan, tahap ini bertujuan untuk memampukan masyarakat miskin sehingga mereka memiliki keterampilan untuk mengelola peluang yang akan diberikan. Tahap ini dilakukan dengan memberikan pelatihan-pelatihan, lokakarya dan kegiatan sejenis yang bertujuan untuk meningkatkan *life skill* dari masyarakat miskin. Pada tahap ini sekaligus dikenalkan dan dibukakan akses kepada sumberdaya kunci yang berada di luar komunitasnya sebagai jembatan mewujudkan harapan dan eksistensi dirinya.

Tahap Pendayaan, pada tahap ini masyarakat miskin diberikan peluang yang disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki melalui partisipasi aktif dan berkelanjutan yang di tempuh dengan memberikan peran yang lebih besar secara bertahap sesuia dengan kapasitas dan kapabilitasnya, diakomodasi aspirasinya serta dituntun untuk melakukan *self evaluation* terhadap pilihan dan hasil pelaksanaan atas pilihan.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,Kecil dan Menengah bab III bagian kesatu pasal 4 terdapat prinsip pemberdayaan, yaitu:

1. Penumbuhan Kemandirian, kebersamaa, dan kewirausahaan usaha mikro, kecil dan menengah untuk berkarya dengan prakarsa sendiri
2. Perwujudan kebijakan publik yang transparan, akuntabel dan berkeadilan
3. Pengembangan usaha berbasis potensi daerah dan berorientasi pasar sesuai dengan kompetensi usaha mikro, kecil, dan menengah
4. Peningkatan daya saing usaha mikro, kecil dan menengah

5. Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian secara terpadu.

Bagian kedua pasal 5 terdapat tujuan pemberdayaan, yaitu:

1. Mewujudkan struktur perekonomian nasional yang seimbang, berkembang, dan berkeadilan
2. Menumbuhkan dan mengembangkan usaha mikro, kecil dan menengah menjadi usaha yang tangguh dan mandiri
3. Meningkatkan usaha mikro, kecil dan menengah dalam pembangunan daerah, penciptaan lapangan kerja, pemerataan pendapatan, pertumbuhan ekonomi dan pengentasan kemiskinan bagi rakyat.

Berdasarkan tujuan dari pemberdaya secara umum, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan dilakukannya pemberdayaan pada usaha mikro, kecil dan menengah adalah untuk menguatkan peran dan potensi industri kecil dengan memandirikan masyarakat yang berkecimpung di industri kecil maupun untuk masyarakat di sekitarnya agar bisa meningkatkan pembangunan yang berawal dari masyarakat yang mandiri.

C. Industri Kecil dan Menengah

1. Pengertian Industri Kecil

Pengertian industri adalah perusahaan untuk membuat atau menghasilkan barang-barang. Hal ini dapat diartikan bahwa industri merupakan suatu perusahaan yang melakukan kegiatan produksi guna menghasilkan suatu barang yang dibutuhkan oleh konsumen. Pengertian kecil di dalam industri kecil bersifat

relatif, sehingga perlu adanya batasan yang dapat menimbulkan definisi-defensi industri kecil dari beberapa segi sebagaimana diungkapkan oleh M.Tohar (2002:2-3) adalah sebagai berikut:

a. Berdasarkan Total Aset

   Berdasarkan total aset, pengindustri kecil adalah pengindustri yang memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp. 200.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan tempat membuka industri.

b. Berdasarkan Total Penjualan Bersih Per Tahun

   Berdasarkan total penjualan bersih per tahun, pengindustri kecil adalah pengindustri yang memiliki hasil total penjualan bersih per tahun paling banyak Rp. 1.000.000.000

c. Berdasarkan Status Kepemilikan

   Berdasarkan status kepemilikan, industri kecil adalah industri yang berbentuk perseorangan, bisa berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, yang di dalamnya termasuk koperasi.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 pasal 3 tentang Perindustrian menjelaskan bahwa perindustrian diselenggarakan dengan tujuan sebagai berikut :

a. Mewujudkan Industri Nasional sebagai pilar dan penggerak perekonomian nasional
b. Mewujudkan kedalaman dan kekuatan struktur Industri
c. Mewujudkan Industri yang mandiri, berdaya saing dan maju, serta Industri Hijau

d. Mewujudkan kepastian berusaha, persaingan yang sehat, serta mencegah pemusatan atau penguasaan industri oleh satu kelompok atau perseorangan yang merugikan masyarakat

e. Membuka kesempatan berusaha dan perluasan kesempatan kerja

f. Mewujudkan pemerataan pembangunan Industri ke seluruh wilayah Indonesia guna memperkuat dan memperkukuh ketahan nasional

g. Meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyrakat secara berkeadilan.

2. Kriteria-Kriteria Industri Kecil

Menurut M.Tohar (2002:67-68) menagatakan bahwa industri kecil termasuk koperasi merupakan kegiatan ekonomi rakyat dengan skala kecil yang memiliki kriteria-kriteria sebagai berikut :

a. Memiliki kekayaan bersih atau total aset paling banyak Rp. 200.000.000
b. Memiliki hasil penjualan bersih per tahun paling banyak Rp. 1.000.000.000
c. Milik warga negara Indonesia
d. Perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau berafiliasi entah langsung atau tidak langsung dengan usaha menengah atau dengan usaha besar
e. Berdiri sendiri, bukan merupakan anak perusahaan atau cabang berbentuk usaha perseorangan, badan usaha yang tidak berbadan hukum, atau badan usaha yang berbadan hukum termasuk koperasi.

Uraian diatas menjelaskan tentang kriteria industri kecil. Kriteria ini digunakan untuk menggolongkan industri. Dengan adanya kriteria-kriteria industri kecil, akan mempermudah dalam mengembangkan sebuah industri. Kriteria dapat dijadikan dasar penilaian atau penetapan sebuah industri kecil.

3. Fungsi dan Peranan Industri Kecil

Fungsi dan peran industri kecil menurut M. Tohar (2002:3-9) sangat besar dalam kegiatan ekonomi masyarakat. Fungsi dan peran itu meliputi penyediaan barang dan jasa, penyerapan tenaga kerja, pemerataan pendapatn, sebagai nilai tambah bagi produk daerah, dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Penjelasan tentang fungsi dan peran diantaranya :

a. Penyediaan Barang Jualan

Penyediaan barang jualan merupakan salah satu peran dan fungsi industri kecil dalam kegiatan ekonomi. Hal-hal yang perlu disediakan dalam hal ini berkaitan dengan banyak barang yang akan dijual, cara mendeteksinya, dan laporan mutasi barang jualan.

b. Penyerapan Tenaga Kerja

Tenaga kerja adalah sekelompok orang yang mampu melakukan pekerjaan, baiki di dalam maupun di luar hubungan kerja guna menghasilkan suatu barang atau jasa untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat. Oleh karena itu, tenaga kerja merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting kedudukannya, bukan hanya karena peranannya pada proses produksi saja, tetapi juga karena menyangkut kesejahteraan keluarga dan masyarakat.

4. Jenis-Jenis Industri Kecil

Menurut M. Tohar (2002:77) ditinjau dari jenis produk atau jasa yang dihasilkan maupun aktivitas yang dilakukan. Dimana kegiatan tersebut dapat menghasilkan sesuatu yang digunakan atau dibutuhkan oleh konsumen, maka

industri kecil dapat dibedakan menjadi empat. Keempat jenis industri kecil tersebut adalah sebagai berikut :

a. Industri logam/kimia, misalnya : perajin logam, peajin kulit, keramik, *fiberglass*, marmer dan lain-lain
b. Industri makanan/minuman, misalnya : produsen makanan tradisional, minuman ringan, catering dan produk lainnya
c. Industri Pertambangan, misalnya : bahan galian, aneka industri kecil pengrajin perhiasan, dan lain-lain
d. Industri konveksi, misalnya : produsen garment, batik, tenun ikat, dan lain-lain.

Berdasarkan pemaparan diatas mengenai jenis-jenis industri kecil, dapat dijadikan sebuah informasi untuk masyarakat yang bingung dalam menentukan jenis industri apa yang akan dikelola. Jenis industri kecil mempunyai produk yang beragam, sehingga mudah untuk berkembang untuk peningkatan pendapatan.

5. Kelebihan dan Kekurangan Industri Kecil

Industri Kecil memiliki kelebihan dan kelemahan masing-masing. Kelebihan dan kelemahan Industri Kecil menurut M.Tohar (2002:27-29) adalah sebagai berikut :

a. Kelebihan Industri Kecil

Industri kecil pada kenyataanya mampu bertahan, dan mengantisipasi kelesuan perekonomian yang diakibatkan inflasi maupun berbagai faktor penyebab lainnya. Tanpa subsidi maupun proteksi, industri kecil mampu menambah nilai devisa negara khususnya industri kecil di sektor informal

dan mampu berperan sebagai penyanggan dalam perekonomian masyarakat kecil lapisan bawah. Industri kecil juga memiliki keuntungan yang dapat dirasakan pada dua pihak, yaitu :

1) Keuntungan yang diberikan kepada daerah dan perekonomian Negara. Industri Kecil juga memiliki nilai strategis bagi perkembangan perekonomian negara pada umumnya dan daerah pada khususnya, antara lain sebagai berikut :
   a) Banyaknya produk-produk tertentu yang dikerjakan oleh perusahaan kecil. Perusahaan besar dan menengah banyak ketergantungan kepada perusahaan kecil, karena jika hanya dikerjakan perusahaan besar dan menengah, marginnya menjadi tidak ekonomis
   b) Merupakan pemerataan konsentrasi dari kekuatan-kekuatan ekonomi dalam masyarakat.
2) Keuntungan yang diberikan pada perusahaan itu sendiri. Secara umum perusahaan dalam skala kecil baik usaha perseorangan maupun persekutuan (kerjasama) memiliki kelebihan dan daya tarik. Kelebihan dan daya tarik tersebut adalah sebagai berikut :
   a) Pemilik merangkap manajer perusahaan dan merangkap semua fungsi manajerial seperti marketing, *finance,* dan administrasi.
   b) Dalam pengelolaanya mungkin tidak memiliki keahlian menejerial yang handal.
   c) Sebagian besar membuat lapangan pekerjaan baru, inovasi, sumber daya baru serta barang dan jasa baru
   d) Risiko usaha menjadi beban pemilik
   e) Pertumbuhannya lambat, tidak teratur, tetapi kadang-kadang terlalu cepat dan bahkan prematur

f) Fleksibel terhadap bentuk fluktuasi jangka pendek, namun tidak memiliki rencana jangka panjang
g) Bebas menentukan harga produksi atas barang dan jasa
h) Prosedur hukumnya sederhana
i) Komunikasi dengan pihak luar bersifat pribadi
j) Mudah dalam proses pendiriannya
k) Mudah dibubarkan setiap saat jika dikehendaki
l) Pemilik mengelola secara mandiri dan bebas waktu
m) Pemilik menerima seluruh laba
n) Umumnya mampu untuk *survive*
o) Cocok untuk mengelola produk, jasa atau proyek perintisan yang sama sekali baru atau belum pernah ada yang mencobanya, sehingga memiliki sedikit pesaing.
p) Memberikan peluang dan kemudahan dalam peraturan dan kebijakan pemerintah demi berkembangnya industri kecil.
q) Diversifikasi usaha terbuka luas sepanjang waktu dan pasar konsumen senantiasa tergali melalui kreativitas pengelola.
r) Mempunyai Ketergantungan secara moril dan semangat usaha dengan pengindustrian kecil lainnya
s) Relatif tidak membutuhkan investasi terlalu besar, tenaga kerja tidak berpendidikan tinggi, dan sarana produksi relatif tidak terlalu mahal.

Pemaparan diatas mengenai kelebihan industri kecil dapat dijadikan acuan untuk memulai sebuah usaha. Adanya kelebihan industri kecil pada kenyataanya mampu membuat industri tersebut bertahan, dan mengantisipasi kelesuan perekonomian yang diakibatkan inflasi maupun berbagai faktor penyebab lainnya. Sehingga industri kecil dapat dijadikan sebuah alternatif untuk meningkatkan pendapatan.

b. Kekurangan Industri Kecil

Kekurangan dan hambatan dalam pengelolaan industri kecil menurut M.Tohar (2002:29) umumnya berkaitan masalah-masalah yang muncul dari beberapa faktor. Faktor-faktor tersebut antara lain adalah faktor intern dan faktor ekstern dari industri kecil itu sendiri. Faktor intern adalah faktor penghambat yang terdapat atau berasal dari dalam industri tersebut.

Sedangkan faktor ekstern merupakan faktor yang muncul dari luar industri tersebut.

1) Kelemahan dan hambatan pada faktor intern, yaitu :
   a) Terlalu banyak biaya yang dikeluarkan, utang yang tidak bermanfaat, tidak mematuhi ketentuan pembukaan standar.
   b) Pembagian kerja yang tidak proporsional, dan karyawan sering bekerja di luar batas jam kerja standar.
   c) Tidak mengetahui secara tepat berapa kebutuhan modal kerja karena tidak adanya perencanaan kas.
   d) Persediaan barang terlalu banyak sehingga beberapa jenis berang ada yang kurang laku
   e) Sering terjadi *mist-management* dan ketidakpedulian pengelolaan terhadap prinsip-prinsip manajerial.
   f) Sumber modal yang terbatas pada kemampuan pemilik
   g) Perencanaan dan program pengendalian sering tidak ada atau belum pernah merumuskan.
2) Kelemahan dan hambatan pada faktor ekstern, yaitu :
   a) Risiko dan hutang piutang kepada pihak ketiga ditanggung oleh intuisi dan ambisi pengelola, serta lemah dalam promosi
   b) Sering kekurangan informasi bisnis, hanya mengacu pada intuisi dan ambisi pengelola, serta lemah dalam promosi.
   c) Tidak pernah melakukan studi kelayakan, penelitian pasar, dan analisis perputaran uang tunai.

Menurut uraian diatas mengenai kelemahan yang ada pada sebuah industri. Kelemahan tersebut sangat rawan terjadi pada sebuah industri. Dengan pemaparan diatas, diharapkan kelemahan yang mungkin akan terjadi dapat diminimalisir. Sehingga industri dapat berjalan dengan baik dan dapat membantu perekonomian masyarakat.

6. Industri Menengah

Industri Menengah adalah kegiatan ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Kecil atau Usaha Besar yang memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh milyar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).

Batasan mengenai skala usaha, yaitu berdasarkan kriteria jumlah tenaga kerja sebagai berikut:

a. Industri Kecil : 5-19 orang

b. Industri Menengah : 20-99 orang

7. Industri Kecil dan Menengah

IKM memiliki peranan dan potensi yang strategis dalam pertumbuhan ekonomi rakyat. Keberadaan IKM tentu membutuhkan perhatian khusus oleh

pemerintah terhadap perkembangannya. Diperlukan strategi dalam memberdayakananya yaitu dengan menciptakan lingkungan usaha yang efektif efisien dan kondusif.

Menurut Hafsah (2004 : 43) menyatakan bahwa dalam pengembangan IKM pada hakikatnya merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah dan masyarakat. Dengan melihat permasalahannya, maka diperlukan hal – hal yang perlu diupayakan dalam pengembangan IKM, antara lain:

a. Penciptaan Iklim Usaha yang Kondusif

   Pemerintah perlu mengupayakan terciptanya iklim yang kondusif antara lain dengan mengusahakan ketentraman dan keamanan berusaha serta penyederhanaan prosedur perijinan usaha , keringanan pajak dan sebagainya.

b. Bantuan Permodalan

   Pemerintah perlu memperluas program tentang kredit khusus dengan syarat-syarat yang tidak memberatkan bagi IKM, untuk membantu meningkatkan permodalannya, baik itu melalui sector jasa financial formal, sector jasa financial informal, skema penjaminan, leasing dan dana modal ventura

c. Perlindungan Usaha

   Jenis-jenis usaha tertentu, terutama jenis usaha tradisional yang merupakan usaha golongan ekonomi lemah,harus mendapatkan perlindungan dari pemerintah, baik itu melalui undang – undang

maupun peraturan pemerintah yang saling menguntungkan *(win-win solution)*

d. Pengembangan Kemitraan

Perlu dikembangkan kemitraan yang saling membantu antara IKM, atau antara IKM dengan pengusaha besar di dalam negeri maupun di luar negeri, untuk menghindarkan terjadinya monopoli dalam usaha. Disamping itu juga untuk memperluas pasar dan pengelolaan bisnis yang lebih efisien . Dengan demikian IKM akan mempunyai kekuatan dalam bersaing dengan pelaku bisnis lainnya , baik dari dalam maupun luar negeri.

e. Pelatihan

Pemerintah perlu meningkatkan pelatiha bagi IKM baik dalam aspek kewiraswataan , manajemen, administrasi dan pengetahuan serta keterampilannya dalam pengembangan usahanya

f. Membentuk Lembaga Khusus

Perlu dibangun suatu lembaga yang khusus bertanggung jawab dalam mengkoordinasikan semua kegiatan yang berkaitan dengan upaya menumbuh kembangan IKM dan juga berfungsi untuk mencari solusi dalam rangka mengatasi permasalahan baik internal maupun eksternal yang dihadapi oleh IKM.

g. Memantapkan Asosiasi

Asosiasi yang telah ada perlu diperkuat, untuk meningkatkan perannya antara lain dalam pengembangan jaringan informasi usaha yang sangat dibutuhkan untuk pengembangan usaha bagi anggotanya.

h. Mengembangkan Promosi

Guna lebih mempercepat proses kemitraan antara IKM dengan usaha besar diperlukan media khusus dalam upaya mempromosikan produk-produk yang dihasilkan. Disamping itu perlu juga diadakan *talk show* antara asosiasi dengan mitra usahanya.

i. Mengembangkan Kerja Setara

Perlu adanya kerjasama atau koordinasi yang serasi antara pemerintah dengan dunia usaha untuk menginventarisir berbagai isu-isu muktakhir yang terkait dengan perkembangan usaha.

Menurut pemaparan tentang penjelasan upaya dalam peningkatan pengembangan IKM khususnya IKM Ikan Tuna di Kabupaten Pacitan telah diimplementasikan secara seimbang oleh Pemerintah Kota, Diskoperindag dan masyarakat sebagai pelaku Industri Ikan Tuna yang bertujuan untuk meningkatkan kesejatheraan masyarakat dan tujuan lainnya agar produksi industri dapat berjalan dengan lancar dari segi manajemen permodalannya hingga segi pemasaran hasil produksinya.

8. Strategi Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM)

Strategi yang akan diterapkan dalam upaya pemberdayaan Industri Kecil Menengah menurut Hetifah Sjaifudin seperti yang dikutip oleh Fany (2009: 18)

adalah sebagai berikut:

a. Strategi Kemampuan Finansial

Berkembangnya beberapa model penguatan finansial bagi industriwan kecil menengah akhir – akhir ini telah menunjukkan semakin menguatnya komitmen pemerintah, upaya pemerintah tersebut terwujud dengan membantu pemberdayaan industri kecil menengah melalui penyertaan modal sementara.

b. Pemberdayaan Pemasaran

Pada era pasar bebas dimana dunia menjadi tanpa batas (*borderless*) terdapat penyatuan pasar domestik dengan pasar internasional. Hal ini merupakan peluang tantang sekaligus ancaman bagi industri kecil menengah. Terdapat tiga cara strategi pemasaran, yaitu meningkatkan akses industri kecil menengah kepada pasar, proteksi pasar, dan menggeser struktur pasar monopoli menjadi bersaing.

c. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia

Diharapkan dapat terjadi melalui perbaikan sistem pendidikan formal, peningkatan keterkaitan dunia pendidikan dengan pasar tenaga kerja melalui sistem pemagangan (*linkand match*) serta pemberian inisiatif bagi pertumbuhan pusat - pusat penelitian dan pemberdayaan untuk mengembangkan SDM dan teknologi.

d. Strategi Pengaturan dan Pengendalian

1) Pengaturan dan Perijinan

Secara formal dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur dan

membantu perkembangan industri kecil menengah. Ada empat jenis perijinan yang harus dipenuhi untuk mendirikan industri kecil menengah yaitu ijin tempat industri (kelayakan industri, lokasi, serta dampak terhadap kesehatan dan lingkungan), ijin industri industri serta ijin perdagangan.

2) Perencanaan Tata Ruang

Mewujudkan gagasan untuk lebih memperhatikan kepentingan industri kecil menengah melalui:

a) Pelibatan kepentingan industri kecil menengah dalam perencanaan kota

b) Proses konsultasi sebagai mekanisme untuk mendapatkan masukan dari pihak – pihak yang berkepentingan

c) Pengakuan sungguh – sungguh terhadap peran dan fungsi industri kecil menengah bagi lingkungan masyarakat kota.

Berdasarkan apa yang telah diuraikan diatas, maka dalam sebuah pemberdayaan IKM diperlukan sebuah kemitraan. Kemitraan yang dimaksudkan bertujuan untuk dapat membantu permasalahan yang terjadi. Permasalah yang sering muncul adalah penyertaan modal. Bagi IKM, dalam mendapatkan modal sangatlah susah. Kemitraan yang dapat dilakukan untuk mengatasi masalah adalah kemitraan dengan koperasi. Koperasi yang berasaskan kekeluargaan bertujuan

memajukan kesejahteraan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional.

D. Koperasi

1. Pengertian Koperasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian bahwa koperasi adalah Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang-seorang atau badan hokum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. Koperasi bertujuan memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya serta ikut membangun tatanan perekonomian Nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju ,adil ,dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 . Koperasi secara bersama-sama mendirikan satu organisasi tunggal yang berfungsi sebagai wadah untuk memperjuangkan kepentingan dan bertindak sebagai pembawa aspirasi.

Koperasi ada dua macam koperasi, yaitu :

a. Koperasi Primer : Koperasi Primer adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan orang-seorang. Koperasi Primer dibentuk oleh sekurang-kurangnya 20 (dua puluh) orang.

b. Koperasi Sekunder: Koperasi Sekunder adalah Koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan Koperasi. Koperasi Skunder dibentuk sekurang –kurangnya 3 (tiga) Koperasi.

2. Fungsi dan Peranan Koperasi

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 4 tentang Perkoperasian dijelaskan bahwa fungsi dan peran koperasi sebagai berikut :

a. Membangun dan mengembangkan potesi dan kemampuan ekonomi anggota pada khususnya dan pada masyarakat pada umumnya untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi dan sosialnya
b. Berperan serta secara aktif dalam upaya mempertinggi kualitas kehidupan manusia dan masyarakat
c. memperkokoh perekonomian rakyat sebagai dasar kekuatan dan ketahanan perkonomian nasional dengan koperasi sebagai sokogurunya
d. berusaha untuk mewujudkan dan mengembangkan perkonomian nasional yang merupakan usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi.
e. Mengembangkan kreativitas dan membangun jiwa berorganisasi bagi para pelajar bangsa.

Berdasarkan pemaparan diatas mengenai fungsi dan peranan koperasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 4 tentang Perkoperasian, koperasi berupaya untuk memajukan perekonomian Nasional dengan mendasar sebagai ekonomi kerakyatan. Diharapkan dengan adanya koperasi, IKM dan masyarakat pada umumnya dapat mengatasi permasalahan perekonomian.

3. Prinsip Koperasi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 Pasal 5 tentang Perkoperasian dijelaskan mengenai prinsip Koperasi, yaitu:

a. Koperasi melaksanakan prinsip Koperasi sebagai berikut
   1) Keanggotaan bersifat suka rela dan terbuka
   2) Pengelolaan dilaksanakan secara demokratis
   3) Pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha masing-masing anggota
   4) Pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal
   5) Kemandirian.

b. Dalam mengembangkan Koperasi ,maka Koperasi melaksanakan pula prinsip Koperasi sebagai berikut:
   1) pendidikan perkoperasian
   2) kerja sama antar Koperasi.

Berdasarkan uraian diatas mengenasi prinsip koperasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992 Pasal 5 tentang Perkoperasian, menggambarkan tentang bagaimana koperasi bekerja. Adanya prinsip koperasi ini juga memberikan informasi kepada IKM maupun masyarakat umum jika ingin bergabung dengan koperasi.

4. Keanggotaan Koperasi

Keanggotan koperasai juga telah dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Pasal 18 dan Pasal 19 bahwa yang dapat menjadi anggota Koperasi ialah setiap warga negara Indonesia yang mampu melakukan tindakan

hukum atau Koperasi yang memenuhi persyaratan sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar . Keanggotaan Koperasi didasarkan pada kesamaaan kepentingan ekonomi dalam lingkup usaha Koperasi. Keanggotaan Koperasi dapat diperoleh atau diakhiri setelah syarat sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar dipenuhi. Keanggotaan Koperasi tidak dapat dipindah tangankan.

Setiap Anggota mempunyai kewajiban dan hak yang sama terhadap Koperasi sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar pada Pasal 20 yaitu :

a. Setiap Anggota mempunyai kewajiban :
   1) Mematuhi Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga serta keputusan yang telah disepakati dalam Rapat Anggota
   2) Berpartisipasi dalam kegiatan usahs yang diselenggarakan oleh Koperasi
   3) Mengembangkan dan memelihara kebersamaan berdasar atas asas kekeluargaan.
b. Setiap Anggota mempunyai hak :
   1) menghadiri ,menyatakan pendapat ,dan memberikan suara dalam Rapat Anggota;
   2) memilihdan/atau dipilih menjadi aggota Pengurus atau Pengawas ;
   3) meminta diadakan Rapat Anggota menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar;
   4) mengemukakan pendapat atau saran kepada pengurus diluar Rapat Anggota baik diminta maupun tidak diminta .

5) memanfaatkan Koperasi dan mendapat pelayanan yang antara sesama aggota;
6) mendapatkan keterangan mengenai perkembangan Koperasi menurut ketentuan dalam Anggaran Dasar .

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hal ini dikarenakan peneliti melakukan pengamatan secara langsung di lapangan, untuk melihat situasi dan kondisi dari suatu kegiatan pemberdayaan IKM Ikan Tuna. Tujuan menggunakan jenis penelitian ini untuk mengggambarkan atau mendeskripsikan secara tepat terhadap sesuatu yang tengah terjadi dan sedang berlangsung pada penelitian. Nazir (2005 : 54) mendefinisikan metode penelitian deskriptif sebagai :

> "Suatu metode dalam meneliti kelompok manusia, suatu obyek, suatu kondisi sistem, suatu sistem pemikiran ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang. Tujuan dari penelitian deskriptif ini adalah untuk membuat gambaran atau lukisan secara sistematis, factual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat antar fenomena yang diselidiki".

Penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, dimana peneliti adalah instrument kunci, tehnik pengumpulan data dengan trianggulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiyono, 2008 : 15).

Penggunaan metode deskriptif merupakan upaya untuk mengambarkan apa yang terjadi terhadapa penelitian yang diangkat. Berdasarkan tujuan penelitian yang terkait dengan topik yang sedang diteliti, maka metode deskriptif digunakan untuk mengetahui dan menggambarkan fenomena dan fakta tentang peran

Diskoperindag dan IKM sebagai upaya pemberdayaan untuk peningkatan pendapatan masyarakat di Kabupaten Pacitan.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dimaksudkan untuk membatasi objek kajian agar peneliti lebih mudah dalam menentukan data yang diperlukan untuk suatu penelitian. Adapun yang menjadi fokus penelitian ini adalah :

1. Tahap dan langkah Pemberdayaan industri kecil dan menengah ikan tuna untuk peningkatan pendapatan masyarakat di Kabupaten Pacitan, Pembinaan manajemen dan permodalan. Aspek yang akan diteliti berdasarkan (Randy R Wrihantomolo dan Riant Nugroho D, 2007 :119-120) yaitu :
   a. Tahap penyadaran

      Pada tahap penyadaran, masyarakat diberikan sosialisasi bahwa mereka mampu untuk meningkatkan pendapatan dengan cara memanfaatkan potensi yang ada di sekitar. Salah satunya adalah dengan cara memanfaatkan potensi ikan tuna yang melimpah di Kabupaten Pacitan. Pada tahap ini kesadaran masyarakat untuk meningkatkan pendapatan harus dimulai dari diri sendiri. Perlu adanya pendampingan dari pihak terkait pada tahap ini.

   b. Tahap pengkapasitasan

      Tahap pengkapasitasan bertujuan untuk memampukan masyarakat untuk mengelola peluang yang di berikan. Tahap ini

dijalani dengan proses memberikan pelatihan-pelatihan maupun kegiatan sejenisnya untuk meningkatkan *life skill* masyarakat. Pada tahap ini dikenalkan tentang akses yang dapat menunjang. Sejauh mana tahapan-tahapan ini telah terlaksana pada IKM Tahu Tuna di Kabupaten Pacitan.

c. Tahap pendayaan

Pada tahap ini masyarakat diberikan peluang yang disesuaikan dengan kemampuannya. Tahap pendayaan memberikan peluang yang besar kepada masyarakat untuk berperan besar dalam kapasitas dan kapabilitasnya.

2. Faktor pendorong dan faktor penghambat dari pemberdayaan industri kecil dan menengah ikan tuna untuk peningkatan pendapatan masyarakat di Kabupaten Pacitan,

a. Faktor Pendorong

Pemberdayaan di lakukan dengan bekerjasama dengan berbagai pihak termasuk Diskoperindag, Dinas Kelautan dan Perikanan dan swasta. Pemberdayaan IKM Ikan Tuna didukung dengan adanya kemauan untuk berkembang dan program yang tepat yang diberikan oleh dinas terkait.

b. Faktor Penghambat

Kurang adanya kesadaran masyarakat tentang pentingnya konsumsi ikan, modal yang kecil, kurang maksimalnya pemahaman produksi ikan tuna yang memiliki *High Risk* , Industri yang kurang inovatif

dan pemasaran yang kurang maksimal menjadi faktor penghambat dalam pemberdayaan Industri Ikan Tuna.

C. Lokasi dan Situs Penelitian

Adapun yang dimaksud dengan lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitianya. Pemilihan lokasi penelitian didasarkan pada aspek kemudahan dalam mengakses informasi dalam mendapatkan data-data yang valid. Dalam hal ini yang menjadi lokasi penelitian adalah Kabupaten Pacitan, pemilihan lokasi dikarenakan Kabupaten Pacitan menjadi pelopor pusat produksi dari industri olahan ikan tuna. Hasil olahan ikan tuna ini menjadi produk unggulan di Kabupaten Pacitan saat ini. Berdasarkan pengamatan selama ini, keberadaan industri hasil olahan ikan tuna ini mampu memberdayakan masyarakat sekitar dan meningkatkan perekonomian masyarakat tersebut. Tetapi, dalam perkembangannya industri olahan ikan tuna ini masih mengalami beberapa kendala, yaitu pemerintah melalui Diskoperindag telah membuat program pemberdayaan IKM hasil olahan ikan tuna, tetapi muncul permasalahan bahwa tidak sedikit dari pelaku usaha kecil tersebut yang belum bergabung dengan program tersebut. Faktor lainnya adalah permasalahan IKM dalam kurang maksimalnya kemampuan masyarakat dalam mengolah Ikan Tuna yang *High Risk* serta kurang memaksimalkan produksi dan pemasaran.

Sedangkan situs penelitian adalah tempat dimana peneliti menangkap keadaan sebenarnya dari objek yang diteliti. Adapun yang menjadi situs dalam penelitian ini meliputi :

1. Kantor Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan
2. Industri ikan tuna di Kabupaten Pacitan

Kedua situs tersebut yang bersentuhan langsung dalam pengelolaan Industri Ikan Tuna. Secara umum adanya kesesuaian situs penelitian ini dengan substansi mampu memberikan *entry* baik berupa data, interaksi, instansi, substansi yang sesuai dengan kebutuhan deskripsi mendalam.

D. Sumber Data

Sumber data merupakan tahapan dalam proses penelitian yang penting, karena hanya dengan mendapatkan data yang tepat maka proses penelitian akan berlangsung sampai peneliti mendapatkan jawaban dari perumusan masalah yang sudah ditetapkan (Sarwono, 2006:123).

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan sumber data sebagai berikut :

1. Data Primer

   Data primer dalah data yang diperoleh dari sumber pertama atau secara langsung diperoleh ditempat penelitian di Kabupaten Pacitan. Menurut Sarwono (2006:16) Data Primer diperoleh melaui pertanyaan tertulis dengan menggunakan kuesioner atau lisan dengan menggunakan metode wawancara narasumber. Data primer dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

   a. Pegawai Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan Bidang Perindustrian

b. Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan

c. Pegawai UPT TPI Tamperan

d. Pelaku Industri olahan ikan tuna Pacitan

2. Data Sekunder

Data sekunder berupa data-data yang sudah tersedia dan dapat diperoleh oleh peneliti dengan cara membaca, melihat, atau mendengarkan (Sarwono, 2006:210). Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung biasanya data itu dikumpulkan dan dilaporkan oleh orang lain diluar penelitian.

Dalam penelitian ini data sekundernya adalah :

a. Literatur, peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen, serta arsip-arsip Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan

b. Peristiwa, yaitu kejadian, kegiatan, dan keadaan di tempat penelitian yang meliputi proses pengolahan Ikan Tuna, proses jual beli produk olahan Ikan Tuna.

E. Tehnik Pengumpulan Data

Pengumpulan data merupakan data yang penting dalam penelitian. Untuk memperoleh data yang relevan, tepat dan akurat dengan penelitian ini, maka peneliti menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, antara lain :

1. Wawancara

   Wawancara ialah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Teknik wawancara ini berguna untuk mendapatkan data dari tangan pertama (primer), pelengkap teknik pengumpulan lainnya, menguji hasil pengumpulan data lainnya. Dalam tahap ini peneliti berhadapan langsung dengan narasumber untuk mengadakan tanya jawab secara lebih lanjut dan memperjelas data dan informasi yang sesuai dengan permasalahan yang diteliti dengan bantuan panduan wawancara (Usman dan Akbar, 2009:52). Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan cara tanya jawab secara langsung dengan :

   a. Pegawai Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan Bidang Perindustrian
   b. Pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan
   c. Pegawai UPT TPI Tamperan
   d. Pelaku Industri olahan Ikan Tuna Pacitan

2. Observasi

   Observasi sebagai suatu proses melihat, mengamati, dan mencermati serta “merekam” perilaku secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu (Cartwright dan Cartwright dalam Herdiansyah 2010:131). Sedangkan menurut Herdiansyah (2010:131) inti dari observasi adalah adanya perilaku yang tampak dan adanya tujuan yang ingin dicapai. Perilaku yang tampak dapat berupa perilaku yang dapat dilihat langsung oleh

mata, dapat didengar, dapat dihitung, dan dapat diukur. Dalam penelitian yang telah dilakukan peneliti, mengamati bahwa dalam proses pengolahan Ikan Tuna terjadi sebuah interaksi sosial yang sangat baik antara pemilik usaha dengan pegawai. Sehingga, proses kerja yang dilakukan berjalan dengan baik. Selain itu, hubungan antara petugas dari Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan dengan para pelaku IKM Ikan Tuna terjalin baik.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data kualitatif dengan melihat atau menganalisis dokumen-dokumen yang dibuat oleh subjek sendiri atau oleh orang lain tentang subjek. Dokumentasi merupakan salah satu cara yang dapat dilakukan peneliti kualitatif untuk mendapatkan gambaran dari sudut 58 pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan (Herdiansyah, 2010:143). Dalam penelitian yang telah dilakukan, peneliti mengambil beberapa dokumentasi, diantaranya rekaman hasil wawancara yang dilakukan kepada para narasumber dan beberapa dokumentasi berupa foto tentang kegiatan pembuatan olahan Ikan Tuna serta hasil produk olahan Ikan Tuna.

F. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat bantu bagi peneliti dalam mengumpulkan data. Kualitas Instrumen akan menentukan kualitas data yang

terkumpul. Dalam penelitian kualitatif peneliti sendiri ataupun dengan bantuan orang lain merupakan alat pengumpulan data yang utama (Zuriah, 2009:168). Berikut instrumen penelitiannya adalah :

1. Instrumen untuk wawancara adalah peneliti sendiri, yaitu dengan menggunakan panca indera untuk melihat, mengamati, dan merasakan kejadian-kejadian yang ada dilapangan terutama yang berhubungan dengan fokus penelitian. Serta terjun langsung untuk memperoleh data langsung dari narasumber dengan bantuan wawancara (*interview guide*). Tujuannya agar wawancara yang dilakukan sesuai dengan topik yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, instrumen untuk wawancara yang digunakan peneliti adalah peneliti sendiri dengan cara mengamati hasil tangkapan Ikan Tuna di Kabupaten Pacitan yang kemudian diolah menjadi olahan Ikan Tuna. Selanjutnya, peneliti mengamati bagaimana proses pemberdayaan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan, yaitu penyerahan alat-alat untuk pembuatan olahan Ikan Tuna kepada para IKM Ikan Tuna.
2. Instrumen dalam observasi adalah catatan lapangan, yaitu catatan sistematis yang dibuat peneliti sewaktu mengadakan pengamatan wawancara atau menyaksikan suatu kejadian tertentu pada saat penelitian dilaksanakan. Tujuannya agar peneliti terhindar dari kesalahan akan hal yang diamati. Untuk instrumen dalam observasi, sebelum melakukan wawancara, peneliti telah menyiapkan pedoman

wawancara yang akan digunakan untuk melakukan wawancara narasumber dari pihak Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan, pelaku IKM Ikan Tuna, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan serta UPT TPI Tamperan.

3. Instrumen yang digunakan dalam dokumentasi adalah penulis sendiri dengan mempergunakan alat tulis, foto kopi, dan peralatan lain yang dapat digunakan untuk hal tersebut. Untuk instrumen dalam dokumentasi, peneliti menggunakan buku catatan dan kamera serta *Handphone* yang digunakan untuk merekam hasil wawancara yang dilakukan kepada Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan, pelaku IKM Ikan Tuna, Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan serta UPT TPI Tamperan.

G. Analisis Data

Analisis data ialah proses menyusun data agar bisa ditafsirkan, menyusun data berarti menggolongkannya (mengkategorikannya) dalam pola atau tema. Tafsiran atau interpretasi artinya memberikan makna terhadap analisis, menjelaskan pola atau kategori, serta mencari hubungan antara berbagai konsep (Nasution, 1998 dalam Usman dan Akbar, 2009:84). Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan analisis data kualitatif, dengan berdasarkan model interaktif (Miles, Huberman, dan Saldana, 2014:14).

Pada analisis data Miles, Huberman dan saldana (2014:14) terdiri dari empat alur kegiatan yang terjadi, yaitu pengumpulan data, condensation

(kondensasi data), data display (penyajian data), conclusions: drawing/verifying (penarikan kesimpulan/verifikasi). Hal tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Pengumpulan Data *(Data Collection)*

   Data dalam penelitian ini di dapat dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi.

2. Kondensasi Data (*Data Condensation*)

   Kondensasi data mengacu proses pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pengabstrakkan, dan atau transformasi data yang muncul dari catatan yang ditulis dilapangan, transkrip wawancara, dokumen, dan bahan-bahan empiris lainnya. Dengan kondensasi data, kita membuat data yang semakin kuat. Sebagai proses pengumpulan data, episode selanjutnya adalah kondesasi data yang terdiri dari menulis ringkasan, mengkode, pengembangan tema, pengkategorian, dan menulis analisis. Kondensasi data / proses tranformasi berlanjut terus sampai penelitian di lapangan berakhir, sampai penulisan laporan. Kondensasi data merupakan bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu, dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa hinggan kesimpulankesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi.

3. Penyajian Data (*Data Display*)

   Langkah kedua dari kegiatan analisis adalah penyajian data. Penyajian merupakan langkah yang terorganisasi, meringkas penemuan informasi yang memungkinkan adanya penggambaran kesimpulan dan

tindakan yang seharusnya dilakukan. Dalam program kerja kami, kami menjadi yakin bahwa dalam 61 penyajian data yang baik merupakan cara utama untuk menguatkan analisis kualitatif. Dalam buku ini penyajian data mendiskusikan dan menggambarkan banyak jenis matriks, grafik, diagram, dan jaringan. Semua dirancang untuk merakit informasi secara teroganisir untuk dapat diakses, bentuk yang padu menjadikan analisis dapat dilihat apa yang sedang terjadi dan menggambarkan kesimpulan atau berlanjut kelangkah selanjutnya.

4. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion Drawing / Verifying*)

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif model interaktif adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi. Mulai dari pengumpulan data, mengartikan / menafsirkan analisis kualitatif dengan melakukan pencatatan pola, menjelaskan aliran/arus, dan tujuan dari penelitian. Sehingga peneliti harus sampai pada kesimpulan dan melakukan verifikasi, baik dari segi makna maupun kebenaran kesimpulan. Makna yang muncul dari data harus diuji kebenarannya, kekokohannya, dan kecocokannya yang merupakan validitasnya.

Gambar 1. Tahapan Analisis Data Model Interaktif

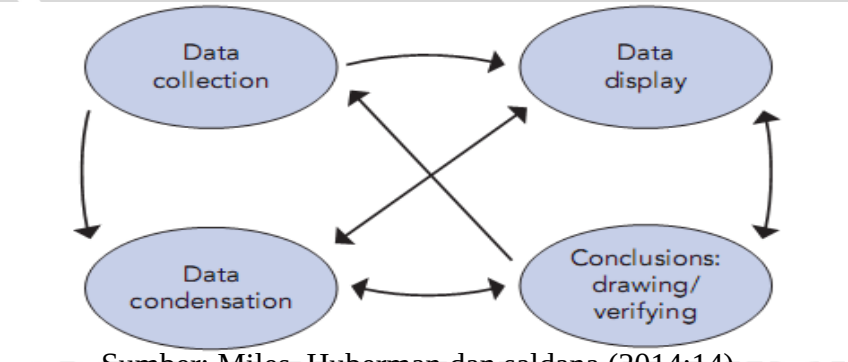

Sumber: Miles, Huberman dan saldana (2014:14)

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi dan Situs Penelitian

1. Gambaran Umum Lokasi Penelitian Kabupaten Pacitan

a. Kondisi Geografis

Kabupaten Pacitan merupakan kabupaten yang terletak di pantai selatan Jawa dan memiliki karakteristik wilayah yang sebagian besar (85% dari luas wilayah) berupa perbukitan serta merupakan kawasan ekokarst. Secara geografis Kabupaten Pacitan terletak di sebelah Barat Daya Provinsi Jawa Timur.Posisi koordinat Kabupaten Pacitan terletak antara 110º 55' - 111º 25' Bujur timur dan 7º 55' - 8º 17' Lintang Selatan. Geografis wilayah selatan Kabupaten Pacitan berada pada koordinat antara 08°10'41,3" – 08°10'31,5" Lintang Selatan dan 110°53'54,9" – 111°25'78" Bujur Timur, dengan batas-batas administrasi adalah sebagai berikut :

- Sebelah Utara : Wilayah Tengah Kabupaten Pacitan
- Sebelah Selatan : Samudera Indonesia
- Sebelah Barat : Kabupaten Wonogiri
- Sebelah Timur : Kabupaten Trenggalek

- **Gambar 2 : Peta Kabupaten Pacitan**

Sumber : Bappeda Kabupaten Pacitan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tantang Desa, maka di Kabupaten Pacitan telah terjadi pengembangan wilayah terutama di desa yang mana terjadi pemekaran desa berjumlah 7 (tujuh) desa. Hal ini mengakibatkan perubahan wilayah administrasi Kabupaten Pacitan dari sebelumnya 12 Kecamatan, 5 kelurahan dan 159 desa menjadi 12 Kecamatan, 5 kelurahan dan 166 desa (total 171 Desa/Kelurahan).

b. Kependudukan dan Tenaga Kerja

Berdasarkan data dari BPS Kabupaten Pacitan, jumlah penduduk Kabupaten Pacitan sebesar 540.881 jiwa, terdiri dari laki-laki 264.112 jiwa dan perempuan 276.769 jiwa. Laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Pacitan berdasarkan sensus penduduk 2010 sebesar 0,28%. Komposisi penduduk menurut kelompok umur

menunjukkan bahwa penduduk usia lanjut meningkat dari 11,16% menjadi 11,75%. Hal ini sesuai dengan angka harapan hidup dari umur 70,30 tahun menjadi 71.26 tahun. Rasio ketergantungan total sebesar 51,29% yang berasal dari rasio ketergantungan penduduk muda sebesar 33,52% dan rasio ketergantungan penduduk tua sebesar 17,77%. Terjadi transisi struktur penduduk usia produktif, dengan prediksi penurunan ratio ketergantungan dengan jumlah penduduk usia kerja/produktif dibanding jumlah penduduk muda dan jumlah penduduk tua mencapai angka tertinggi. Tingginya penduduk usia produktif, menuntut penyediaan lapangan kerja baru. Untuk itu, diperlukan upaya Pemerintah Daerah untuk mendorong pertumbuhan investasi, industri, dan jasa dalam penyerapan tenaga kerja skala besar.

Tabel 3:

Penyebaran Penduduk per Kecamatan di Kabupaten Pacitan 2011

No	Kecamatan	Rata-rata Penduduk Per Desa	Kepadatan Penduduk (Org/Km2)	Jumlah Penduduk
1	Donorojo	3.364	370	40.367
2	Punung	2.778	332	36.115
3	Pringkuku	2.456	240	31.922
4	Pacitan	2.835	919	70.873
5	Kebonagung	2.396	365	45.515
6	Arjosari	2.361	343	40.145
7	Nawangan	5.794	420	52.144
8	Bandar	5.735	391	45.878
9	Tegalombo	4.865	359	53.520
10	Tulakan	5.418	536	86.688
11	Ngadirojo	2.739	514	49.306
12	Sudimoro	3.380	470	33.803

	Jumlah	3.429	422	586.276

Sumber : Pacitan Dalam Angka 2012

Komposisi penduduk yang sering digunakan untuk analisis dan perencanaan pembangunan adalah komposisi penduduk menurut umur dan jenis kelamin karena perbedaan struktur umur akan menimbulkan perbedaan dalam aspek sosial-ekonomi seperti masalah angkatan kerja, pertumbuhan penduduk, dan masalah pendidikan.

Tabel 4 :

Jumlah Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan *Sex Ratio*

No	Kecamatan	Laki-Laki	Wanita	Sex Ratio	Jumlah Penduduk
1	Donorojo	19.602	20.765	94,40	40.367
2	Punung	18.221	17.894	101,83	36.115
3	Pringkuku	15.036	16.886	89,04	31.922
4	Pacitan	35.156	35.717	98,43	70.873
5	Kebonagung	23.181	22.334	103,79	45.515
6	Arjosari	20.089	20.056	100,16	40.145
7	Nawangan	26.066	26.078	99,95	52.144
8	Bandar	23.118	22.760	101,57	45.878
9	Tegalombo	26.470	27.050	97,86	53.520
10	Tulakan	43.554	43.134	100,97	86.688
11	Ngadirojo	24.141	25.165	95,93	49.306
12	Sudimoro	16.864	16.939	99,56	33.803
	Jumlah	291.498	294.778	98,89	586.276

Sumber : Pacitan Dalam Angka 2012

Menurut hasil registrasi penduduk tahun 2011, jumlah penduduk Kabupaten Pacitan sebesar 586.276 jiwa, terdiri dari laki-laki sebesar 291.498 jiwa (49,72

persen) dan perempuan sebesar 294.778 jiwa (50,28 persen) dengan rasio jenis kelamin sebesar 98,89 persen. Hal ini berarti bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 98-99 penduduk laki-laki. Sedangkan menurut hasil sensus penduduk 2010 (SP2010), jumlah penduduk Kabupaten Pacitan sebesar 540.881 jiwa. Komposisi penduduk menurut jenis kelamin terdiri dari laki-laki sebesar 264.112 jiwa (48,83 persen) dan perempuan sebesar 276.769 jiwa (51,17 persen) dengan rasio jenis kelamin sebesar 95,43 persen. Hal ini berarti bahwa setiap 100 penduduk perempuan terdapat 95-96 penduduk laki-laki

c. Perkonomian

Berdasarkan website resmi Pemerintah Kabupaten Pacitan yang dikelola oleh Bagian Pengolah Data Elektronik, Sekretariat Daerah Pemerintah Kabupaten, Pacitan selama tahun 2014, Kantor Pelayanan Perijinan Kabupaten Pacitan menerbitkan 969 Surat Ijin Usaha Perdagangaan (SIUP). Menurut golongan Usaha, SIUP terbesar yang diterbitkan adalah pedagang kecil yang sebanyak 186 SIUP. Disusul dengan menengah sebanyak 21 SIUP dan pedagang besar tidak ada SIUP yang diterbitkan. Penyelenggaraan Wajib daftar perusahaan berdasarkan bentuk perusahaan, terbesar adalah PO sebanyak 855 perusahaan (79,91 persen) disusul oleh CV sebanyak 165 perusahaan (15,52 persen), PT sebanyak 30 perusahaan (2,80 persen), Koperasi sebanyak 15 perusahaan (1,40 persen) dan lainnya sebanyak 5 perusahaan (0,47 persen). Jumlah Koperasi di Kabupaten Pacitan tahun 2014 terdapat sekitar 442 koperasi dengan jumlah anggota sebesar 62.050 orang dan jumlah karyawan sebesar 360 orang. Dari koperasi yang ada sebesar 385 unit (87,10 persen) kondisi aktif dan sisanya sebesar 57 unit dalam

kondisi pasif (12,90 persen). Jumlah modal tahun 2012 mencapai 109,93 miliyar rupiah dan volume usaha mencapai 95,39 miliyar rupiah. SHU yang didapatkan selama tahun 2012 mencapai 5,23 milyar rupiah.

Pendapatan daerah Kabupaten Pacitan diantaranya berasal dari pajak dan retribusi daerah. Realisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah selalu meningkat dari tahun 2009-2014. Realisasi penerimaan pajak sendiri tahun 2012 sebesar 36,99 milyar rupiah atau memberikan retribusi sebesar 99,52 persen. Sedangkan penerimaan retribusi daerah sebesar 180,18 juta rupiah atau memberikan kontribusi sebesar 0,48 persen.

2. Gambaran Umum Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan

a. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan

Merupakan unsur pelaksana bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan, melaksanakan urusan koperasi, perindustrian, dan perdagangan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan yang diberikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.

Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan urusan koperasi, perindustrian dan perdagangan berdasarkan azas otonomi dan tugas pembantuan. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan dalam melaksanakan tugas, menyelenggarakan fungsi perumusan kebijakan teknis

di bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan, penyelenggaraan urusan koperasi, perindustrian dan perdagangan serta pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugasnya, melakukan pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan.

b. Struktur Organisasi Dinas

Berikut ini struktur organisasi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan :

Gambar 3
Struktur Organisasi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan

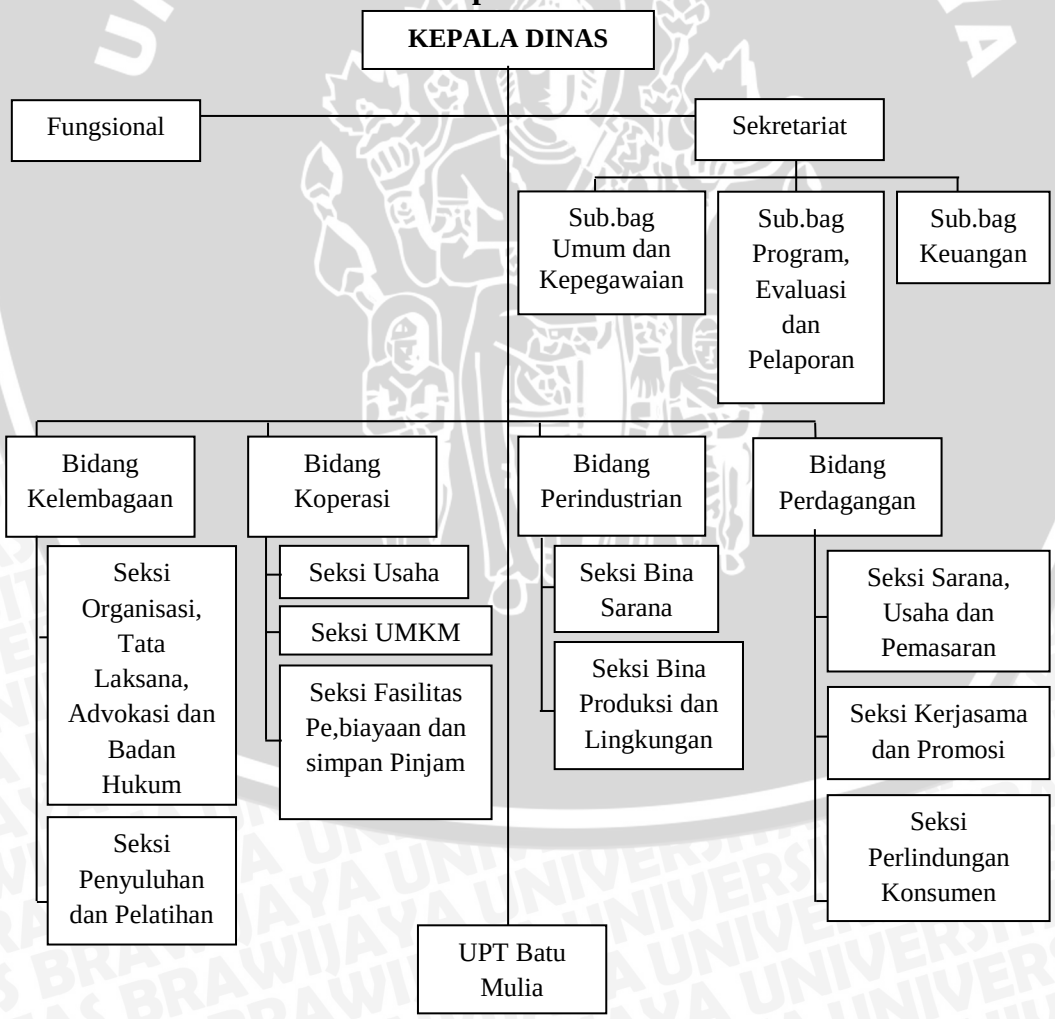

Sumber : Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan, yang ditindak lanjuti dengan Keputusan Bupati Pacitan Nomor 46 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan terdiri dari :

1) Kepala Dinas
2) Sekretariat
3) Bidang Kelembagaan
4) Bidang Koperasi
5) Bidang Perindustrian
6) Bidang Perdagangan
7) Unit Pelaksana Teknis Batu Mulia
8) Kelompok Fungsional

c. Visi dan Misi

Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan, yang mencerminkan harapan yang ingin dicapai dilandasi oleh kondisi dan potensi serta prediksi tantangan dan peluang pada masa yang akan datang. Berdasarkan makna tersebut maka visi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan adalah :

"TERWUJUDNYA KOPERASI DAN UMKM, PERINDUSTRIAN SERTA PERDAGANGAN YANG BERKUALITAS, MANDIRI, TANGGUH DAM BERDAYA SAING"

Diharapkan dengan terumuskannya visi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan tersebut, maka dapat menjadi motivasi seluruh elemen dinas untuk mewujudkannya, melalui peningkatan kinerja sesuia dengan tugas dan fungsi masing-masing.

Misi

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan dan diwujudkan agar tujuan dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan visi yang telah ditetapkan. Berdasarkan Tugas Pokok dan Fungsi serta dilandasi oleh visi tersebut, maka misi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016, yaitu :

1) Meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Aparatur
2) Meningkatkan Koperasi yang berkualitas
3) Meningkatkan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang Mandiri
4) Meningkatkan usaha perdagangan yang berdaya saing
5) Mewujudkan Industri Kecil Menengah yang tangguh

(sumber: Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan)

d. Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan merupakan unsur pelaksana bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 20 Tahun 2007 tentang Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Pacitan, yang ditindak lanjuti dengan

Keputusan Bupati Pacitan Nomor 46 Tahun 2007 tentang uraian tugas dan fungsi dan tata kerja Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan dan lampiran Peraturan Bupati Pacitan Nomor 46 Tahun 2007 tentang Struktur Organisasi Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan terdiri dari :

1) Kepala Dinas

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin dinas dalam menetapkan dan merencanakan program bidang koperasi, perindustrian dan perdangan, mengawasi dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan, merumuskan dan menetapkan kebijakan teknis, mengkoordinasikan seluruh pelaksanaan kegiatan bidang koperasi, perindustrian dan perdagangan serta kelembagaan baik lintas program maupun sektoral, serta melaksanakan tugas-tugas dinas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

2) Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan di bidang ketatausahaan, keuangan, kepegawaian, sarana dan prasarana, program, evaluasi dan pelaporan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas, sekretariat mempunyai fungsi :

a) Penyelenggaraan dan pengelolaan rumah tangga, sarana dan perlengkapan
b) Pelaksanaan surat-menyurat, kerasipan dan perpustakaan

c) Pembinaan dan pengembangan serta pengelolaan administrasi kepegawaian

d) Penyelenggaraan dan pengelolaan administrasi keuangan

e) Penyusunan program kerja dan laporan serta pelaksanaan evaluasi dan pengembalian.

Sekretariat terdiri dari tiga Sub Bagian, yaitu :

a) Sub Bagian Umum dan Keuangan

b) Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan

c) Sub Bagian Keuangan

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Saksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretariatan.

3) Bidang Kelembagaan

Bidang kelembagaan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi, Perindustrian dan perdagangan di bidang organisasi, Tata laksana, advokai dan badan hukum, penyuluhan dan pelatiihan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Kelembagaan mempunyai fungsi :

a) Pelaksanaan kebijakan pembentukan penggabungan dan peleburan, serta pembubaran koperasi

b) Pengesahan pembentukan, penggabungan dan peleburan serta pembubaran koperasi dalam wilayah Kabupaten Pacitan, pengesahan dan pengumuman akta pendirian koperasi Kabupaten

Pacitan, pengesahan perubahan Anggaran Dasar yang menyangkut penggabungan, pembagian dan perubahan bidang usaha koperasi dalam wilayah Kabupaten

c) Fasilitasi pelaksanaan pembubaran koperasi ditingkat Kabupaten, fasilitasi pelaksanaan dan pengawasan KSP dan USP koperasi di tingkat Kabupaten Pacitan

d) Pelaksanaan penyuluhan dan pelatihan perkoperasian, Pemeringkatan Koperasi, Revitalisasi Koperasi, pemberian Rekomendasi Pembukaan Kantor Cabang Koperasi.

Bidang Kelembagaan membawahi :

a) Seksi Organisasi, Tata Laksana, Advokasi dan Badan Hukum

b) Seksi Penyuluhan dan Pelatihan

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Saksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kelembagaan.

4) Bidang Koperasi

Bidang Koperasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi, Perindustrian dan perdagangan di bidang bina usaha, usaha mikro, kecil dan menengah, fasilitasi pembiayaan dan simpan pinjam serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Koperasi mempunya fungsi :

a) Penyiapan rencana program, bahan perumusan dan penjabaran kebijaksanaan teknis, pemberian bimbingan dan pengendalian usaha

di bidang/sektor pertanian, non pertanian, simpan pinjam dan usaha kecil menengah

b) Penyiapan bahan dalam rangka pelaksanaan fasilitas pengembangan usaha koperasi, usaha mikro kecil dan menengah

c) Pengupayaan fasilitas penjaminan koperasi, usaha mikro kecil dan menengah

d) Pelaksanaan koordinasi dalam pemantapan dan pengembangan usaha koperasi dengan instansi teknis, lintas instansi terkait, lembaga keuangan maupun lembaga non keuangan

e) Pemantapan dan evaluasi kegiatan usaha koperasi, usaha mikro kecil dan menengah dalam rangka pelaksanaan kebijaksanaan teknis di bidang koperasi, usaha mikro kecil dan menengah.

Bidang Koperasi membawahi :

a) Seksi Bina Usaha

b) Seksi Usaha Mikro Kecil dan Menengah

c) Seksi Fasilitasi Pembiyaan dan Simpan Pinjam

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Saksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Koperasi.

5) Bidang Perindustrian

Bidang Perindustrian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan di bidang bina sarana, bina produksi dan lingkungan serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan

sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugasnya, Bidang Perindustrian mempunyai fungsi :

a) Pemberian bimbingan teknis, pembinaan dan pengembangan sarana, usaha dan produksi di bidang industri
b) Pemberiaan bimbingan teknis peningkatan mutu, diversifikasi produk dan inovasi teknologi
c) Pelaksanaan analisa iklim usaha dan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang industri
d) Pemberian fasilitasi usaha dan akses permodalan dalam rangka pengembangan industri kecil dan menengah
e) Pengawasan dan fasilitasi penerapan standar bagi industri serta pemberian perlindungan kepastian usaha industri, pengawas pelaksana tugas desentralisasi bidang industri

Bidang Perindustrian membawahi :

a) Seksi Bina Sarana
b) Seksi Bina Produksi dan Lingkungan

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Saksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perindustrian.

6) Bidang Perdagangan

Bidang Perdagangan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi, Perindustrian dan perdagangan di bidang sarana usaha dan pemasaran, kerjasama dan promosi dan perlindungan konsumen serta melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas Koperasi,

Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Untuk melaksanakan tugas, Bidang Perdagangan mempunyai fungsi :

a) Penyusunan petunjuk teknis pembinaan dan pedoman kegiatan perdagangan
b) Pelaksanaan bimbingan teknis, pembinaan dan pengembagan sarana, usaha, ekspor, impor, pengadaan dan penyaluran barang dan jasa serta kegiatan promosi pemasaran dan penertiban Surat Keterangan Asal (SKA)
c) Pelaksanaan pendaftaran perusahaan dan penyajian buku daftar perusahaan
d) Pemantauan pengadaan dan penyaluran barang dan jasa serta pengembangan pasar
e) Pelaksanaan Analisis iklim usaha dan peningkatan kerjasama dengan dunia usaha di bidang perdagangan
f) Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijaksanaan teknis di bidang perdagangan.

Bidang Perdagangan membawahi :

a) Seksi Sarana, Usaha dan Pemasaran
b) Seksi Kerjasama dan Promosi
c) Seksi perlindungan Konsumen

Masing-masing Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Saksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Perdagangan

7) Unit Pelaksana Teknis Batu Mulia

UPT Batu Mulia, unsur pelaksana teknis operasional di bidang pengelolaan batu mulia. UPT Batu Mulia mempunyai tugas :

a) Menyusun rencana kegiatan pengelolaan batu mulia
b) Melaksanakan pengembangan, pengolahan Batu Mulia
c) Menyiapkan bahan promosi baik di dalam kabupaten maupun luar kabupaten
d) Melaksanakan pengawasan,pengendalian dan evaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan batu mulia
e) Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan tugas dan fungsinya

UPT Batu Mulia memiliki Sub Bagian Tata Usaha yang dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Bertanggungjawab kepada Kepala UPT Batu Mulia. Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas UPT Batu Mulia di bidang ketatusahaan, keuangan, kepegawaian, sarana dan prasarana, program, evaluasi dan pelaporan.

8) Kelompok Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan sesuai dengan keahlian dan kebutuhan. Kelompok jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk.

Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

e. Sumber Daya

Berdasarkan Renstra (Rencana Strategis) Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016, Sumber Daya Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan dibagi dalam beberapa aspek. Diantaranya :

1) Kepegawaian

Dalam melaksanakan tugas, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan didukung oleh pegawai sejumlah 57 orang yang terdiri dari :

a) Berdasarkan status pegawai.

Tabel 5 : Jumlah Pegawai Berdasarkan Status Pegawai

No	Pegawai	Jumlah	%
1	PNS	47	83%
2	CPNS	7	12%
3	Kontrak	3	5%
	Total	57	100%

Sumber: Renstra Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016

Tabel 5 diatas mengenai data jumlah pegawai Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan berdasarkan status pegawai, dimana PNS memiliki jumlah tertinggi dengan jumlah pegawai 47 orang atau 83% sedangkan yang terendah pada pegawai honorer yaitu 3 orang atau 5%.

b) Berdasarkan Jenis Kelamin

Tabel 6 : Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Pegawai	Jumlah	%
1	Laki-Laki	37	65%
2	Perempuan	20	35%
	Total	57	100%

Sumber: Renstra Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016.

Tabel 6 diatas mengenai data jumlah pegawai Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan berdasarkan jenis kelamin, dimana jumlah laki-laki sebanyak 37 orang atau 65% dan jumlah pegawai wanita sebanyak 20 orang atau 35%.

c) Berdasarkan Golongan Kepangkatan

Tabel 7 : Jumlah Pegawai Berdasarkan Golongan Kepangkatan

No	Pangkat	Jumlah
1	Golongan IV	5
2	Golongan III	45
3	Golongan II	4
4	Golongan I	-
5	Kontark/Honorer	3
	Total	57

Sumber: Renstra Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016.

Tabel 7 diatas mengenai data jumlah pegawai Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan berdasarkan golongan kepangkatan pegawai, dimana golongan III memiliki jumlah tertinggi dengan

jumlah pegawai 45 sedangkan yang terendah pada pegawai honorer yaitu 3 orang.

2) Perlengkapan

Perlengkapan yang digunakan untuk menunjang kegiatan operasional Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan tertulis dalam tabel di bawah.

Tabel 8 : Data Perlengkapan Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan

No	Perlengkapan	Unit
1	Kendaraan Roda 4	3
2	Kendaraan Roda 2	17
3	Meja Kursi Tamu	4
4	Meja Rapat	14
5	Kursi Rapat	28
6	Meja Kerja	52
7	Kursi Kerja	56
8	Almari Kayu	28
9	Etalase	6
10	Filling Kabinet	9
11	Brankas	2
12	Komputer	14
13	Mesin Ketik	4
14	Mesin Ketik Elektronik	1
15	Pesawat Telephone	2
16	Faksemail	1
17	Alat Penjilid Spiral	1
18	LCD	2
19	AC	7
20	Rak Besi	4

21	Almari Besi	2
22	Kipas Angis	18
23	Kamera Foto	4
24	Radio Tape/Sound System	1
25	Meja Resepsionis	1
26	Almari Es	2
27	Kursi Plastik	60
28	Etalase Kayu	3

Sumber: Renstra Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016.

Tabel 8 diatas mengenai data perlengkapan yang ada pada jumlah pegawai Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan. Terdapat 28 jenis perlengkapan dengan total 360 Unit Perlengkapan.

3. Industri Olahan Ikan Tuna

Sebagai daerah pesisir, Pacitan memiliki potensi besar di bidang perikanan, salah satunya adalah ikan tuna. Berdasarkan data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan, hasil tangkapan ikan tuna pada tahun 2015 mencapai angka 1.322.846 Kg. Pada awal tahun 2008, industri olahan ikan tuna mulai merebak. Ikan Tuna di olah menjadi berbagai produk, seperti tahu tuna, nugget tuna, bakso tuna hingga abon tuna, tempura, risol, hingga saat ini puluhan pengrajin dan pegiat usaha olahan tuna di Pacitan merasakan kebermanfaatan dari produk laut tersebut. Oleh masyarakat setempat, olahan ikan tuna bahkan telah membawa berkah tersendiri, memberdayakan masyarakat dan menyejahterakan masyarakat sekitar.

Jumlah pelaku industri Ikan Tuna semakin bertambah. Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan mencatat hingga saat ini

industri Ikan Tuna berjumlah 32 Unit. Dari 32 Unit, dapat memproduksi hingga 924.127 kg/tahun dengan omset mencapai Rp 20.244.586.962,-

B. Penyajian Data Fokus Penelitian

1. Pemberdayaan Industri Kecil Dan Menengah Ikan Tuna Untuk Peningkatan Pendapatan Masyarakat Di Kabupaten Pacitan

Perairan Pacitan berbatasan langsung dengan Samudera Indonesia memiliki dasar perairan yang berkarang dengan ombak yang besar. Namun perairan ini memiliki potensi perikanan yang sangat besar dan melimpah. Kondisi Pacitan yang merupakan daerah pesisir disebagian wilayahnya, membuat potensi perikanan menjadi satu potensi yang memiliki masa depan yang cerah. Berdasarkan hasil dari data Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan, ada 7 kecamatan di Kabupaten Pacitan yang menghasilkan perikanan. Berikut data dalam grafik:

Gambar 4: Grafik Produksi Perikanan Laut Tahun 2015 Kabupaten Pacitan

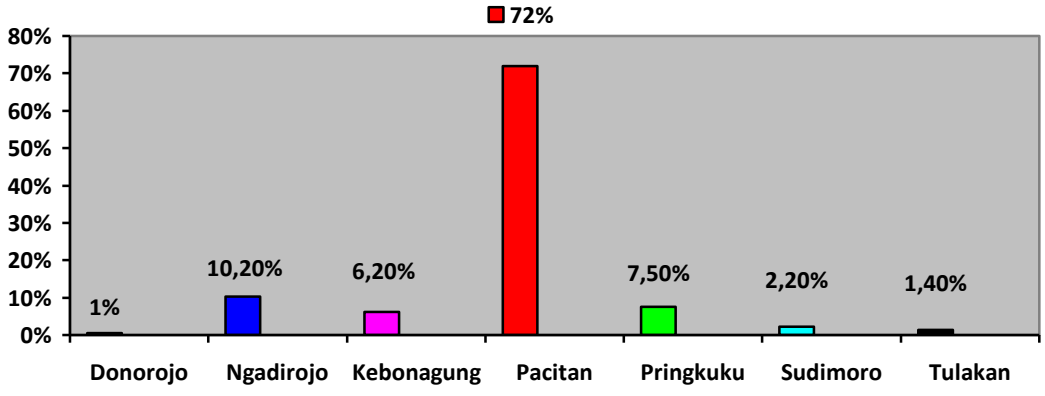

Sumber **:** Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan

Berdasarkan data yang di peroleh peneliti, Kecamatan Pacitan mempunyai hasil perikanan paling tinggi. Seperti yang diungkapkan Ibu Dhian Kurniwidya, selaku pegawai Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan mengenai produksi laut Pacitan berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 25 Mei 2016 yang mengatakan sebagai berikut :

> "Di Kabupaten Pacitan ini, ada 7 Kecamatan yang menghasilkan perikanan paling banyak, yaitu Donorojo, Ngadirojo, Kebonagung, Pacitan, Pringkuku, Sudimoro dan Tulakan. Dan yang tertinggi itu Kecamatan Pacitan. Data tersebut telah tercatat dalam Produksi Laut Kabupaten Pacitan tahun 2015. Itu untuk semua jenis ikan. Tetapi, rata-rata yang tertinggi adalah hasil tangkapan Ikan Tuna. Lagi-lagi Kecamatan Pacitan yang tertinggi untuk hasil tangkapan Tuna"

Hal yang sama juga diungkapkan oleh Bapak Johan selaku pegawai Pelabuhan Perikanan Pantai Tamperan yang terdapat di Kecamatan Pacitan berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 25 Mei 2016 yang mengatakan sebagai berikut :

> "Hasil perikanan laut Pacitan, khususnya Ikan Tuna yang tertinggi ada di Tamperan ini. Ikan Tuna memang paling banyak di antara jenis ikan yang lain. Banyaknya jumlah Ikan Tuna ini berpengaruh terhadap harga dasar Ikan Tuna. Untuk harga Ikan Tuna dengan ukuran konsumsi, harga dasar nya Rp 6500,- /kg. Ukuran konsumsi yang di maksud adalah untuk ukuran yang sedang, tidak terlalu besar. Untuk Ikan Tuna yang memiliki ukuran besar, yang mencapai berat 20kg/ekor atau lebih, dikirim ke luar kota hingga luar negeri."

Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa Kecamatan Pacitan menjadi daerah dengan hasil tangkapan perikanan tertinggi, termasuk juga tertinggi di jenis Ikan Tuna. Melimpahnya Ikan Tuna, mempengaruhi harga dasar Ikan Tuna di Tamperan Kecamatan Pacitan. Harga dasar Ikan Tuna yang rendah ini dimanfaatkan oleh masyarakat Kabupaten Pacitan untuk di olah agar supaya Ikan Tuna memiliki nilai jual yang lebih tinggi.

Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan, yang bergerak dalam bidang Koperasi, Industri dan perdagangan membantu masyarakat untuk meningkatkan pendapatan melalui Ikan Tuna. Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan yang selebihnya disingkat menjadi Diskoperindag, melakukan sebuah pemberdayaan, khususnya di bidang Industri Kecil dan Menengah Ikan Tuna.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan menengah pasal 1 Pemberdayaan adalah upaya yang dilakukan Pemerintah, Pemerintah Daerah, Dunia Usaha, dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim dan pengembangan usaha terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah sehingga mampu tumbuh dan berkembang menjadi usaha yang tangguh dan mandiri. Pemberdayaan merupakan bagian dari pembangunan dan saling memiliki keterkaitan. Dalam setiap proses pembangunan akan terjadi juga proses pemberdayaan masyarakat. Hal ini dimaksudkan agar supaya kedepannya masyarakat dapat menyesuaikan diri dengan situasi dan kondisi yang baru.

Sebagai sebuah proses, pemberdayaan mempunyai tiga tahapan. Tahapan-tahapan pemberdayaan tersebut yaitu tahap penyadaran, tahap pengkapasitasan, dan tahap pendayaan. Ketiganya berperan penting dalam proses terciptanya pemberdayaan yang baik. Diskoperindag sesuai tugas dan fungsinya, melakukan tiga tahapan tersebut. Langkah yang telah dilaksanakan oleh Diskoperindag Kabupaten Pacitan, yaitu :

a. Tahap Penyadaran

Target sasaran yaitu masyarakat dengan ekonomi rendah, yang diberikan pemahaman bahwa mereka mempunyai hak untuk menjadi berada. Disamping itu juga diberikan penyadaran bahwa mereka mempunyai kemampuan untuk keluar dari kemiskinannya. Pada tahap ini masyarakat dibuat mengerti bahwa proses pemberdayaan itu harus berasal dari diri mereka sendiri. Diupayakan pula agar komunitas ini mendapat cukup informasi. Melalui informasi aktual dan akurat terjadi proses penyadaran secara alamiah. Proses ini dapat dipercepat dan di rasionalkan hasilnya dengan hadirnya upaya pendampingan.

Pada tahap penyadaran, Diskoperindag berperan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, bahwa mereka mampu untuk meningkatkan pendapatan dengan cara memanfaatkan potensi yang ada di sekitar. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Ibu Dwi Kusumaningsih selaku Staf Bidang Perindustrian pada tanggal 26 Mei 2016 yang mengatakan bahwa :

> "Diskoperindag sesuai dengan tugas dan fungsinya, melakukan suatu program pemberdayaan. Program pemberdayaan yang telah dilaksanakan diantaranya sosialisasi. Kami melakukan sosialisasi kepada masyarakat untuk meningkatkan pendapatan mereka melalui potensi lokal yang melimpah. Kesadaran masyarakat untuk merubah ekonomi mereka menjadi lebih baik, juga harus di mulai dari diri mereka sendiri. Kami melakukan pendampingan sedini mungkin."

Diskoperindag melakukan pendampingan sedini mungkin kepada masyarakat untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan pendapatan. Hal yang sama juga di katakan oleh Ibu Anis yang juga Staf Bidang

Perindustrian Diskoperindag Kabupaten Pacitan dalam wawancara pada tanggal 26 Mei 2016 yang mengatakan bahwa :

> "Langkah pertama dari kami adalah melakukan sosialisasi mengenai melimpahnya potensi sekitar yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan. Tujuan kami ingin meningkatkan kualitas SDM yang mampu bersaing di dunia Industri. Salah satu Industri yang sedang berkembang adalah Industri Ikan Tuna. Di Pacitan ini hasil tangkapan Ikan Tuna sangat melimpah. Dengan harga dasar ikan yang rendah. Untuk itu kita membantu masyarakat untuk melihat dan memanfaatkan potensi tersebut dengan sebaik-baiknya."

Pernyataan diatas didukung dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Ibu Winarti selaku pemilik salah satu Industri Ikan Tuna melalui wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 28 Mei 2016,yang menyatakan bahwa:

> "iya saya pernah ikut sosialisasi tentang pengolahan Ikan Tuna yang diadakan oleh Diskoperindag. Dari sini saya tertarik untuk bergabung karena potensi perikanan Pacitan sangat melimpah dan dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan pendapatan."

Diskoperindag gencar melakukan sosialisasi khususnya mengenai potensi Ikan Tuna mengingat hasil laut Pacitan sangat melimpah, khususnya Ikan Tuna. Ikan Tuna di olah menjadi beberapa jenis makanan yang nantinya akan meningkatkan harga jual. Berikut tabel kegiatan sosialisasi yang dilakukan Diskoperindag Kab. Pacitan :

b. Tahap Pengkapasitasan

Pada tahap ini bertujuan untuk memampukan masyarakat ekonomi rendah sehingga mereka memiliki keterampilan untuk mengelola peluang yang akan diberikan. Tahap ini dilakukan dengan memberikan pelatihan-pelatihan, lokakarya dan kegiatan sejenis yang bertujuan untuk meningkatkan *life skill* dari masyarakat miskin. Pada tahap ini sekaligus

dikenalkan dan dibukakan akses kepada sumberdaya yang berada di luar komunitasnya sebagai jembatan mewujudkan harapan dan eksistensi dirinya. Sejauh mana tahapan-tahapan ini telah terlaksana pada IKM Tahu Tuna di Kabupaten Pacitan.

Pada tahap pengkapasitasan, Diskoperindag berperan untuk melakukan pelatihan kepada masyarakat, mengadakan lokakarya untuk meningkat kan *life skill* mereka bahwa mereka mampu untuk meningkatkan pendapatan dengan cara memanfaatkan potensi yang ada di sekitar. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Ibu Dwi Kusumaningsih selaku Staf Bidang Perindustrian pada tanggal 26 Mei 2016 yang mengatakan bahwa :

> "kami melakukan kegiatan pelatihan dan lokakarya, penyuluhan, dan memberi motivasi. Khususnya untuk pelatihan olahan Ikan Tuna. Kami mengumpulkan para pelaku industri dan kami berikan pelatihan bagaimana cara mengolah ikan tuna. Tidak itu saja, kami juga memberikan pelatihan mengenai bagaimana proses pemasaran, proses manajemen, hingga standarisasi produk. Selain dari kami, kami juga mendatangkan orang-orang yang ahli dibidangnya. Kami juga bekerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan"

Pernyataan diatas didukung dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Ibu Winarti selaku pemilik salah satu Industri Ikan Tuna melalui wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 28 Mei 2016,yang menyatakan bahwa:

> "setelah mengikuti sosialisasi, saya mengikuti pelatihan tentang proses Industri Ikan Tuna yang diadakan Diskoperindag. Saya belajar mengenai proses pengolahan, proses pemasaran, proses manajemen, hingga standarisasi produk. Pernah juga Diskoperindag mendatangkan pembicara dari Provinsi."

Diskoperindag bekerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan terus berupaya memampukan masyarakat dalam memaksimalkan potensi yang

ada. Dengan adanya program dari Diskoperindag ini, jumlah pelaku industri Ikan Tuna di Pacitan semakin bertambah. Dari yang semula Ikan Tuna hanya bisa di olah menjadi Tahu Tuna, sekarang sudah berkembang hingga beberapa produk, yaitu Bakso Tuna, Otak-Otak Tuna, Nugget Tuna, Pangsit Tuna, Kerupuk Tuna, Abon Tuna, Lumpia Tuna, Kaki Naga, Rolade Tuna, Risoles Tuna, Siomay Tuna, dan Ekado. Berdasarkan data dari Diskoperindag, ada 29 Industri Kecil dan Menengah Ikan Tuna dengan berbagai hasil olahan Ikan Tuna. Berikut data dalam tabel.

Tabel 9 : Industri Ikan Tuna Kabupaten Pacitan Tahun 2015

No	Nama Usaha	Pemilik	Hasil Olahan Ikan Tuna
1	Zada mandiri	Dheny kurniawan	Tahu Tuna, Bakso Tuna, Otak-Otak
2	Srikandi	Surtini	Tahu Tuna, Bakso Tuna, Nugget Tuna, Otak-Otak
3	Cahaya barokah	Liliek marijani	Tahu Tuna
4	Deandra	Dewi ratnasari	Kerupuk Tuna, Pangsit Tuna
5	Berkah samudra	Yulida husni	Tahu Tuna
6	Hikmah	Sukoyanti	Abon Tuna, Tahu Tuna
7	Maju jaya	Rustyowati	Tahu Tuna
8	Aditya	Retno susanti	Abon Tuna, Lumpia Tuna
9	Zafima	Tumarmi	Rolade Tuna
10	Navar bahari raya	Kelompok	Tahu Tuna, Bakso Tuna, Siomay Tuna
11	Nabila makmur	Yoyok dwi kuncoro	Tahu Tuna, Bakso Tuna
12	Sagita "sari laut"	Agustina ratna wati	Tahu Tuna, Bakso Tuna, Nugget Tuna

13	Trisno roso,	Kunafiah	Tahu Tuna, Bakso Tuna
14	Mina jaya,	Wahana mekar lestari	Kerupuk Tuna
15	Zalin	Zulaekhah	Kerupuk Tuna
16	Eza mandiri,	Sukiran	Tahu Tuna, Bakso Tuna, Risoles Tuna, Nugget Tuna, Otak-Otak Tuna, Siomay Tuna, Abon Tuna
17	Tahu tuna aroma,	Erwin triyono	Tahu Tuna, Bakso Tuna, Nugget Tuna, Siomay Tuna
18	Sumber rejeki,	Sarofah	Tahu Tuna, Bakso Tuna, Otak-Otak
19	Sari laut dua putri	Tugiarti	Tahu Tuna, Abon Tuna, Kerupuk Tuna
20	Bina makmur	Marsiah	Tahu Tuna, Bakso Tuna, Abon Tuna, Kerupuk Tuna
21	Amanah	Juamiati	Tahu Tuna, Bakso Tuna
22	Sari ulam	Samdari	Ekado, Kaki Naga, Bakso Tuna, Tahu Tuna
23	Khasanah	Meta persada	Tahu Tuna, Bakso Tuna, Kaki Naga, Otak-Otak
24	Idola	Winarti	Tahu Tuna, Lumpia Tuna, Siomay Tuna, Kaki Naga, Nugget Tuna
25	Ilham abadi	Yuni setiyowati	Nugget Tuna, Kaki Naga, Risoles Tuna, Pangsit Tuna
26	Trisno samudro	Tri sutrisno	Tahu Tuna, Bakso Tuna
27	Tiga putri	Suryaning utami	Tahu Tuna, Bakso Tuna
28	Maju jaya lancar	Yani	Tahu Tuna
29	Alfis	Alfi sa'adah	Tahu Tuna, Lumpia Tuna, Bakso Tuna

Sumber : Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kab. Pacitan

Data diatas menunjukkan bahwa Ikan Tuna dapat di manfaatkan dan di olah menjadi olahan makanan khas Pacitan. Harga dari masing-masing Produk bermacam-macam. Berikut data harga dalam Tabel :

Tabel 10 : Harga Produk Industri Ikan Tuna

No	Nama Produk	Harga Produk (Rata-Rata)/bks
1	Tahu Tuna	Rp 7500,-
2	Bakso Tuna	Rp 7500,-
3	Nugget Tuna	Rp 8000,-
4	Otak-Otak	Rp 7500,-
5	Risoles	Rp 7500,-
6	Abon Tuna	Rp 12000,-
7	Kerupuk Tuna	Rp 8000,-
8	Ekado	Rp 7500,-
9	Lumpia Tuna	Rp 7500,-
10	Siomay Tuna	Rp 7500,-
11	Pangsit Tuna	Rp 7500,-
12	Kaki Naga	Rp 8000,-
13	Rolade Tuna	Rp 8500,-

Sumber : Olahan Peneliti

Data tabel diatas menunjukkan harga pada setiap produk olahan Ikan Tuna. Harga tersebut untuk setiap bungkus. Harga tersebut merupakan rata-rata dari seluruh IKM Ikan Tuna yang ada di Kabupaten Pacitan. Harga dari olahan produk ini bervariasi. Mulai harga Rp 7500,- sampai dengan Rp 12.000,- .

Gambar 5 : Produk Olahan Ikan Tuna

Sumber : Dokumentasi Peneliti

Gambar 5 merupakan produk hasil olahan Ikan Tuna. Diantaranya Tahu Tuna, Otak-Otak Tuna, Nugget Tuna dan Lumpia Tuna. Untuk membuat olahan Ikan Tuna, pada tahun 2015 Dinas Kelautan dan Perikanan mencatat bahan baku Ikan Tuna yang di butuhkan mencapai 375.558 Kg/Tahun. Olahan Ikan Tuna saat ini menjadi daya tarik wisatawan maupun warga lokal. Olahan Ikan Tuna menjadi makanan khas Pacitan yang digemari.

c. Tahap Pendayaan

Pada tahap ini masyarakat ekonomi rendah diberikan peluang yang disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki melalui partisipasi aktif dan berkelanjutan yang di tempuh dengan memberikan peran yang lebih besar secara bertahap sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya, diakomodasi aspirasinya serta dituntun untuk melakukan *self evaluation* terhadap pilihan dan hasil pelaksanaan atas pilihan. Pada tahap ini masyarakat diberikan peluang yang disesuaikan dengan kemampuannya. Tahap pendayaan

memberikan peluang yang besar kepada masyarakat untuk berperan besar dalam kapasitas dan kapabilitasnya.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Ibu Dwi Kusumaningsih selaku Sub Bagian Perindustrian pada tanggal 26 Mei 2016 yang mengatakan bahwa :

> "berbagai langkah pemberdayaan telah kami lakukan, mulai dari sosialisasi, pelatihan dan lokakarya. Setelah dua tahap itu berjalan dengan baik, selanjutnya kami tinggal mengawasi saja perkembangan dari Industri Ikan Tuna tersebut. Tetapi, bukan berarti kami lepas tanggungjawab. Kami tetap membantu dan membina serta memberi bantuan yang menunjang industri tersebut. Misalnya, kami membantu dalam proses standarisasi produk, memberikan bantuan peralatan, serta membantu dalam legalitas produk termasuk pemberian label Halal."

Menurut hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa Diskoperindag telah melaksanakan tahapan-tahapan pemberdayaan. Diskoperindag telah melaksanakan sosialisasi, pelatihan dan lokakarya untuk mengembangkan Industri Tahu Tuna tersebut. Pada tahap akhir, setelah tahap sebelumnya berhasil, Diskoperindag hanya mengawasi saja perkembangan industri tersebut. Tetapi, Diskoperindag tidak lepas tangan sepenuhnya. Diskoperindag tetap membantu dengan membina untuk proses standarisasi produk, memberikan bantuan peralatan, serta membantu dalam legalitas produk termasuk pemberian label Halal.

Ibu Dwi Kusumaningsih selaku Sub Bagian Perindustrian pada tanggal 26 Mei 2016 mengatakan bahwa :

> "untuk standarisasi produk yang kami maksud adalah kami membina industri tersebut untuk melegalkan usahanya. Mengingat produk olahan Ikan Tuna ini *High Risk*. Kami membantu industri untuk mendapat izin edar dari BPOM. Nantinya kami bekerjasama dengan BPOM untuk

industri Tahu Tuna ini memiliki MD. Kami juga membantu untuk industri tersebut memiliki label Halal disetiap produknya."

Berdasarkan data yang diperoleh peneliti dari Diskoperindag, semua telah memiliki izin edar dari BPOM dan sertifikasi halal. Ada beberapa IKM yang pada tahun 2015, baru diusulkan untuk sertifikasi halal. Alasan mengapa baru diusulkan pada tahun 2015 karena IKM tersebut tergolong baru. Berikut data dalam tabel :

Tabel 11: Usulan Sertifikasi Halal 2015 IKM Ikan Tuna

No	Nama Industri	Jenis Prouduk	Status	Ket
1	Sumber Rejeki	Olahan Ikan Tuna (Tahu Tuna, Nugget, Otak-Otak Tuna)	Masih Dalam Proses	Fasilitasi Disperindag Provinsi Jatim
2	Cv. Mustika	Olahan Ikan Tuna (Tahu Tuna, Ekado, Kaki Naga)	Sudah Realisasi	Berlaku sampai 06 Desember 2017
3	Sari Laut Dua Putri	Olahan Ikan Tuna	Sudah Realisasi	Berlaku sampai 29 Mei 2017
4	Tresno Roso	Olahan Ikan Tuna	Sudah Realisasi	Berlaku sampai 29 Mei 2017
5	Hikmah	Olahan Ikan Tuna	Masih dalam proses	-
6	Alfis	Olahan Ikan Tuna	Masih dalam proses	-
7	Berkah Samudera	Olahan Ikan Tuna	Masih dalam proses	-
8	Poklahsar Cahaya Barokah	Olahan Ikan Tuna	Masih dalam proses	-

Sumber : Diskoperindag Kab. Pacitan

Selain data tentang usulan sertifikasi halal tersebut diatas, Diskoperindag juga memberikan bantuan alat produksi kepada para pelaku industri ikan tuna. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Ibu Dwi Kusumaningsih pada tanggal 26 Mei 2016, di dapatkan informasi mengenai bantuan alat produksi yang di berikan Disdoperindag kepada para industri Ikan Tuna. Ibu Dwi Kusumaningsih mengatakan bahwa :

> "untuk memaksimalkan hasil produksi Ikan Tuna, kami memberikan bantuan berupa alat produksi. Seperti *Freezer, Vacuum Sealer, Styrofoam Box,* dan penggiling ikan. Semuanya gratis kami berikan"

Pernyataan diatas didukung dengan pernyataan yang diungkapkan oleh Ibu Winarti selaku pemilik salah satu Industri Ikan Tuna melalui wawancara yang dilakukan peneliti pada tanggal 28 Mei 2016,yang menyatakan bahwa:

> "Alhamdulillah Diskoperindag memberikan bantuan berupa *Freezer, Vacuum Sealer.* Diskoperindag juga membantu dalam memberikan label Halal dan ijin edar. Jadi, produk kami memiliki jaminan mutu."

Pernyataan berikutnya senada dengan pernyataan diatas diungkapkan oleh Ibu Surtini selaku pemilik Industri Ikan Tuna. Dari hasil wawancara pada tanggal 28 Mei 2016 yang mengungkapkan sebagai berikut;

> "iya kami menerima bantuan dari Diskoperindag, *Freezer, Vacuum Sealer* dan lainnya. Alhamdulillah produk kami juga sudah bersertifikat halal dan berijin edar."

Bantuan alat maupun standarisasi produk dan legalitas diharapkan mampu memaksimalkan industri Ikan Tuna. Diharapkan pula agar supaya dapat meminimalisir resiko yang ada, mengingat olahan Ikan Tuna saat ini telah menjadi makanan khas dari Kabupaten Pacitan yang banyak diminati.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah Ikan Tuna Kabupaten Pacitan

a. Faktor Pendukung

Untuk menciptakan pemberdayaan IKM Ikan Tuna yang baik dan efektif didukung oleh adanya faktor yang mendukung program tersebut. Dalam pemberdayaan IKM Ikan Tuna, terdapat beberapa faktor yang mendukung pelaksanaan pemberdayaan IKM Ikan Tuna tersebut sehingga dapat berjalan dengan baik dan efektif. Faktor-faktor yang mendukung pemberdayaan IKM Ikan Tuna, yaitu :

1) Bahan Baku yang Melimpah

Laut Pacitan terutama di Pantai Teleng Ria, mempunyai hasil Ikan Tuna yang melimpah. Berdasarkan data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan, hasil tangkapan ikan tuna pada tahun 2015 mencapai angka 1.322.846 Kg. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Johan selaku pegawai Pelabuhan Perikanan Pantai Tamperan yang terdapat di Kecamatan Pacitan berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 25 Mei 2016 yang mengatakan sebagai berikut :

> "hasil tangkapan nelayan terhadap Ikan Tuna kita ini sangat melimpah. Melimpahnya hasil tangkapan Ikan Tuna ini dapat di manfaatkan untuk diolah menjadi panganan yang bernilai jual tinggi. Ini juga dapat mendorong pendapatan masyarakat."

Bahan baku melimpah inilah yang mendorong pihak terkait seperti Diskoperindag dan Dinas Kelautan dan Perikanan terus berupaya memampukan masyarakat dalam memaksimalkan potensi yang ada. Dengan adanya program dari Diskoperindag ini, jumlah pelaku industri Ikan Tuna di

Pacitan semakin bertambah. Dari yang semula Ikan Tuna hanya bisa di olah menjadi Tahu Tuna, sekarang sudah berkembang hingga beberapa produk, yaitu Bakso Tuna, Otak-Otak Tuna, Nugget Tuna, Pangsit Tuna, Kerupuk Tuna, Abon Tuna, Lumpia Tuna, Kaki Naga, Rolade Tuna, Risoles Tuna, Siomay Tuna, dan Ekado.

2) SDM yang Memadai

Olahan Ikan Tuna adalah makanan khas Kabupaten Pacitan. Makanan Olahan ini, dibuat oleh IKM yang ada di Pacitan. Merupakan produk industri berbasis agro yang sedang dikembangkan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan. Ikan Tuna mempunyai prospek yang sangat bagus, karena digemari oleh semua kalangan. Olahan Ikan Tuna bisa menjadi alternatif lain dalam mengkonsumsi ikan. Berjalannya pemberdayaan IKM Ikan Tuna ini tentunya ditunjang dengan adanya SDM yang memadai. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Ibu Dwi Kusumaningsih dari Bidang Perindustrian Diskoperindag Kabupaten Pacitan pada tanggal 26 Mei 2016 mengatakan bahwa :

> "untuk terwujudnya pemberdayaan IKM Ikan Tuna yang baik, Pacitan memiliki SDM yang sangat memadai. Diskoperindag mencatat dari 29 IKM Ikan Tuna yang tercatat ada 179 orang yang berada di dalamnya, dan mampu menghasilkan 924.127 kg produk pada tahun 2015."

Jumlah SDM yang memadai inilah yang mendorong terwujudnya pemberdayaan IKM Ikan Tuna di Kabupaten Pacitan. Angka 179 orang bukan angka yang sedikit. Dengan demikian diharapkan pemberdayaan

IKM Ikan Tuna ini dapat memberikan peran aktif kepada masyarakat guna meningkatkan pendapatan.

3) Pasar yang Jelas

Produksi Ikan Tuna semakin hari terus bertambah. Angka ini bertambah karena adanya permintaan yang semakin tinggi. Baik dari dalam maupun dari luar Kabupaten Pacitan. Tidak sedikit dari IKM Ikan Tuna ini yang mulai membuka cabang. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti kepada Ibu Surtini sebagai pelaku Industri Ikan Tuna pada tanggal 28 Mei 2016, mengatakan bahwa :

> "permintaan olahan ikan tuna dari hari ke hari semakin meningkat. Ini dikarenakan pasar yang semakin luas. Kami tiap minggunya melakukan pengiriman ke berbagai daerah. Misalnya ke Ponorogo, Semarang, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, bahkan hingga Jakarta. Kami melakukan pemasaran produk tidak hanya secara langsung, tetapi juga melalui online."

Hal senada juga di katakan oleh Alvian Hendra selaku pemilik salah satu pusat olahan Ikan Tuna terbesar di Pacitan. Pada wawancara yang dilakukan peneliti kepada Alvian Hendra pada tanggal 29 Mei 2016, mengatakan bahwa :

> "awalnya kami hanya memiliki satu toko penjualan olahan Ikan Tuna produksi sendiri di daerah Teleng Ria. Karena permintaan akan olahan Ikan Tuna ini terus meningkat, kamu mulai membuka cabang di Kecamatan Punung. Kami juga berencana akan membuka cabang di luar kota."

Pasar yang jelas inilah yang membuat para produsen olahan ikan tuna untuk terus meningkatkan mutu poduknya. Dengan pasar yang jelas dan jangkauan luas, akan memudahkan produsen olahan ikan tuna ini dengan

baik. Besar harapan, hal ini akan membuat nama Pacitan semakin banyak dikenali.

4) Produksi yang Besar

Salah satu faktor pendukung dalam mewujudkan pemberdayaan IKM Ikan Tuna ini adalah jumlah Produksi yang besar. Berdasarkan data dari Diskoperindag, pada tahun 2015 jumlah produksi mencapai 924.127 kg untuk semua jenis produk hasil olahan ikan tuna. Produksi yang semakin besar dikarenakan permintaan yang terus bertambah ini memicu semangat Diskoperindag maupun IKM Ikan Tuna untuk terus mewujudkan pemberdayaan olahan ikan tuna ini semakin baik.

b. Faktor Penghambat

Dalam menciptakan pemberdayaan IKM Ikan Tuna yang baik dan efektif didukung oleh adanya faktor yang mendukung program tersebut. Tetapi, dalam prakteknya, terdapat beberapa faktor yang menghambat pelaksanaan pemberdayaan IKM Ikan Tuna tersebut sehingga dapat menjadi tantangan bagi pemberdayaan tersebut. Faktor-faktor yang menghambat pemberdayaan IKM Ikan Tuna, yaitu :

1) Rendahnya Minat akan Konsumsi Ikan

Berdasarkan data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan, tingkat konsumsi ikan masyarakat dikabupaten Pacitan saat ini baru 11%. Artinya, kegiatan menu makan ikan hanya 11 kilogram per kapita. Angka yang masih cukup jauh jika dibandingkan dengan provinsi sebesar 22% serta Nasional 30%. Melihat potensi produksi perikanan tangkap di

Pacitan yang salah satu komoditas utamanya berupa ikan tuna serta masih rendahnya tingkat konsumsi ikan di Pacitan, maka timbullah ide untuk melakukan olahan ikan tuna yang menjadi produk olahan unggulan dari Pacitan.

Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan melakukan kegiatan "Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan" (GEMARIKAN) dengan menggandeng sekolah-sekolah dasar yang ada di Pacitan. Sekolah Dasar menjadi target untuk kegiatan ini karena untuk memasyarakatkan kegemaran makan ikan karena budaya makan ikan harus disosialisasikan sejak dini, hal ini selain bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan mendongkrak produk perikanan, juga memiliki misi lain untuk meningkatkan kualitas gizi dan tingkat kecerdasan masyarakat khususnya anak-anak. Pernyataan tersebut diatas didukung dengan hasil wawancara yang dilakukan peneliti kepada Ibu Dhian Kurniwidya pada tanggal 25 Mei 2016 yang mengatakan bahwa :

> "tingkat konsumsi ikan kita ini masih rendah. Untuk meningkatkan minat masyarakat akan ikan, kami membuat program Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan" (GEMARIKAN). Kami memanfaatkan hasil olahan Ikan Tuna ini untuk menarik minat masyarakat akan ikan. Program ini kami mulai di sekolah-sekolah dasar yang ada di Pacitan. Budaya makan ikan harus disosialisasikan sejak dini."

Olahan Ikan tuna yang kini mulai menjadi salah satu makanan khas Pacitan, terbukti mampu meningkatkan nilai ekonomi ikan tuna tangkapan nelayan sekaligus mampu menjaga nilai jual tangkapan karena demand bahan baku olahan tahu tuna ini cukup stabil. Saat ini Tahu tuna juga menjadi penunjang sarana promosi pariwisata di Kabupaten Pacitan.

2) Modal yang Kecil

Dalam membentuk suatu IKM, selain kemampuan dalam memanfaatkan peluang yang ada, hal terpenting lainnya adalah modal yang akan digunakan untuk memulai suatu usaha. Hal ini sering kali menjadi kendala. Sulitnya mendapatkan modal akan menghambat perkembangan suatu IKM. Sudah banyak lembaga maupun instansi yang membantu tentang permodalan, tetapi prosesnya lama dan berbelit. Seperti yang disampaikan oleh Ibu Winarti sebagai pelaku usaha olahan Ikan Tuna melalui wawancara yang di lakukan peneliti pada tanggal 28 Mei 2016 yang mengatakan bahwa :

> "diawal kami terkendala oleh modal. Modal kami yang kecil, sehingga sulit untuk mengembangkan usaha. Kami mengajukan pinjaman, tetapi prosesnya lama dan berbelit. Itu kendala kami di awal memulai usaha."

Hal senada juga di sampaikan oleh Ibu Dwi Kusumaningsih dari Bidang Perindustrian Diskoperindag, melalui wawancara pada tanggal 26 Mei 2016 yang mengatakan bahwa :

> "kendala yang dihadapi oleh sebagian besar pelaku IKM Ikan Tuna ini ada pada modal. Kebanyakan modal mereka kecil, sehingga usaha sulit berkembang. Untuk itu, kami dari Diskoperindag juga membantu, membina dalam masalah modal. Kami mencarikan akses yang bisa menangani."

Modal memang menjadi kunci utama dalam kelangsungan dan perkembangan suatu usaha. Jika modal rendah, maka akan menyulitkan usaha tersebut untuk berkembang.

3) Produk yang *High Risk*

Produk olahan Ikan Tuna yang bermacam-macam jenis meliputi Tahu Tuna, Bakso Tuna, Otak-Otak Tuna, Nugget Tuna, Pangsit Tuna, Kerupuk Tuna, Abon Tuna, Lumpia Tuna, Kaki Naga, Rolade Tuna, Risoles Tuna, Siomay Tuna, dan Ekado, merupakan produk *Frozen Food* atau makanan beku. *Frozen Food* atau makanan beku adalah jenis makanan setengah matang yang dikemas dan dibekukan, kemudian bisa di olah kembali dengan cara menggoreng atau memasaknya. Semakin beku produk, maka semakin lama proses penyimpanan dan ketahanan produk tersebut.

Untuk olahan Ikan Tuna yang di simpan pada suhu kurang dari 0˚ bisa bertahan hingga 1 bulan. Tetapi justru ini menjadi kendala, mengingat peminat olahan Ikan Tuna ini tidak hanya dari dalam kota, tetapi juga luar kota. Untuk pengiriman luar kota, olahan ikan tuna di tata pada sebuah kotak *styroform* paling lama satu hari sebelum kembali di bekukan. Sehingga, pengiriman untuk keluar kota masih terbatas di wilayah pulau Jawa saja. Hal ini disebabkan karena olahan Ikan Tuna ini bebas dari bahan pengawet, sehingga tidak bisa bertahan lama.

4) Kurangnya Minat Pelaku Olahan Ikan Tuna untuk Bergabung dengan Diskoperindag

Saat ini Diskoperindag mencatat ada 29 IKM Ikan Tuna yang tersebar di Kabupaten Pacitan. Pada saat peneliti melakukan observasi dan pengamatan di lapangan, masih banyak usaha ikan tuna yang ada di Kabupaten Pacitan. Tetapi muncul pertanyaan, mengapa data yang ada pada

Diskoperindag hanya 29 IKM saja? Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan peneliti kepada Ibu Sugiman sebagai pelaku olahan ikan tuna pada tanggal 30 Mei 2016 mengatakan bahwa :

> "saya memulai usaha ini kecil-kecilan, saya belajar cara membuat dan proses lainnya melalui saya sendiri. Saya belum melaporkan usaha saya ke Diskoperindag. Memang, saya mendengar nanti kalo usaha ini di laporkan kepada Diskoperindag, nanti dapat bantuan seperti *Freezer, Vacuum Sealer* dan lainnya, tetapi proses mengurus nya ribet dan lama. Harus ke RT, Kelurahan, Kecamatan dll. Jadi, usaha saya ini saya kerjakan manual, dan menyimpan produknya di kulkas saja. Saya buat juga tidak banyak, modalnya masih kurang. Saya bikin kalo ada pesenan dari tetangga."

Hal senada juga di sampaikan oleh Ibu Nanik yang juga memiliki usaha olahan Ikan Tuna. Berdasarkan hasil wawancara yang di lakukan peneliti pada tanggal 30 Mei 2016 mengatakan bahwa :

> "usaha ini kecil-kecilan, tidak ada modal untuk mengembangkan. Mau minta bantuan juga proses mengurusnya berbelit dan lama. Jadi, usaha ini saya buat juga kecil-kecilan. Target pasar saya tetangga dan sebagian saya jual ke pasar tradisional."

Menanggapi hal tersebut, pada wawancara yang dilakukan peneliti kepada Ibu Dwi Kusumaningsih dari Bidang Perindustrian Diskoperindag pada tanggal 26 Mei 2016, mengatakan bahwa :

> "sebenarnya masih banyak IKM Ikan Tuna di Kabupaten Pacitan, tetapi banyak yang belum melaporkan usaha mereka kepada Diskoperindag. Semua proses pelaporan, pendaftaran IKM kami gratiskan, tidak ada biaya sepeserpun yang kami minta. Hanya saja mereka yang tidak mau melalui proses yang di anggapmya ribet."

Hal-hal tersebut di atas menjadi kendala untuk perkembangan pemberdayaan IKM Ikan Tuna yang ada di Kabupaten Pacitan. Mengingat IKM Ikan Tuna ini terus mengalami perkembangan karena banyaknya permintaan dari konsumen.

C. Analisa Data Fokus Penelitian

1. Pemberdayaan Industri Kecil Dan Menengah Ikan Tuna Untuk Peningkatan Pendapatan Masyarakat Di Kabupaten Pacitan

a. Tahap Penyadaran

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian Pasal 16 menjelaskan bahwa pembangunan sumberdaya manusia Industri dilakukan untuk menghasilkan sumber daya manusia yang kompeten guna meningkatkan peran sumber daya manusia Indonesia di bidang industri. Sesuai dengan yang terdapat pada tahap penyadaran menurut (Randy R Wrihantomolo dan Riant Nugroho D, 2007 :119-120) yang pada tahap penyadaran ini masyarakat diberikan penyadaran bahwa mereka mempunyai kemampuan untuk keluar dari kemiskinannya dengan menjadi wirausaha melalui potensi yang ada di sekitar. Dengan tahap penyadaran ini pula, masyarakat akan menjadi sumber daya manusia yang siap menekuni bidang Industri. Tahap penyadaran ini bertujuan untuk membentuk sumber daya manusia yang berkompeten pada bidang industri.

Di Kabupaten Pacitan, Diskoperindag berperan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, bahwa mereka mampu untuk meningkatkan pendapatan dengan cara memanfaatkan potensi yang ada di sekitar. Diskoperindag melakukan pendampingan sedini mungkin kepada masyarakat untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan pendapatan melalu industri olahan Ikan Tuna. Darisinilah akan terbentuk sumber daya manusia yang siap berkompeten.

b. Tahap Pengkapasitasan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasal 19 menjelaskan bahwa pengembangan dalam bidang sumber daya manusia dilakukan dengan cara memasyarkatkan dan membudayakan kewirausahaan, meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial, membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru. Pada tahap pengkapasitasan menurut (Randy R Wrihantomolo dan Riant Nugroho D, 2007 :119-120) tahap ini bertujuan untuk memampukan masyarakat miskin sehingga mereka memiliki keterampilan untuk mengelola peluang yang akan diberikan. Tahap ini dilakukan dengan memberikan pelatihan-pelatihan, lokakarya dan kegiatan sejenis yang bertujuan untuk meningkatkan *life skill* dari masyarakat. Pada tahap pengkapasitasan, Diskoperindag telah membudayakan kewirausahaan khususnya Industri Ikan Tuna, melakukan pelatihan kepada masyarakat, mengadakan lokakarya untuk meningkat kan *life skill* mereka, mengadakan penyuluhan-penyuluhan dan memberikan motivasi bahwa mereka mampu untuk meningkatkan pendapatan dengan cara memanfaatkan potensi yang ada di sekitar.

c. Tahap Pendayaan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah Pasal 4 menjelaskan bahwa salah satu prinsip pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah adalah penumbuhan

kemandirian, kebersamaan, dan kewirausahaan untuk bekarya dengan prakarsa sendiri. Sesuai dengan Tahap Pendayaan menurut (Randy R Wrihantomolo dan Riant Nugroho D, 2007 :119-120) yang memuat bahwa pada tahap pendayaan masyarakat ekonomi rendah diberikan peluang yang disesuaikan dengan kemampuan yang dimiliki melalui partisipasi aktif dan berkelanjutan yang di tempuh dengan memberikan peran yang lebih besar secara bertahap sesuai dengan kapasitas dan kapabilitasnya, diakomodasi aspirasinya serta dituntun untuk melakukan *self evaluation* terhadap pilihan dan hasil pelaksanaan atas pilihan. Pada intinya, masyarakat tumbuh dengan kemandirian, tetapi tetap ada perhatian dari pemerintah melalui Dinas terkait. Pada hal ini adalah Diskoperindag.

Menurut hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa Diskoperindag telah melaksanakan tahapan-tahapan pemberdayaan. Diskoperindag telah melaksanakan sosialisasi, pelatihan dan lokakarya untuk mengembangkan Industri Tahu Tuna tersebut. Pada tahap akhir, setelah tahap sebelumnya berhasil, Diskoperindag hanya mengawasi saja perkembangan industri tersebut. Tetapi, Diskoperindag tidak lepas tangan sepenuhnya. Diskoperindag tetap membantu dengan membina untuk proses standarisasi produk, memberikan bantuan peralatan, serta membantu dalam legalitas produk termasuk pemberian label Halal.

2. Faktor Pendukung dan Penghambat Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah Ikan Tuna Kabupaten Pacitan

a. Faktor Pendukung

1) Bahan Baku yang Melimpah

Berdasarkan data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan, hasil tangkapan ikan tuna pada tahun 2015 mencapai angka 1.322.846 Kg. Sesui dengan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil mengamanatkan bahwa tujuan pengelolaan wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil adalah melindungi, mengoservasi, merehabilitasi, memanfaatkan, dan memperkaya sumber daya pesisir dan pulau-pulau kecil serta sistem ekologisnya secara berkelanjutan.

Hasil dari laut Kabupaten Pacitan khususnya Ikan Tuna, sangat melimpah hal inilah yang mendasari Pihak terkait seperti Diskoperindag dan Dinas Kelautan dan Perikanan terus berupaya memampukan masyarakat dalam memaksimalkan potensi yang ada.. Mengacu pada Undang-Undang diatas. Ikan Tuna di olah menjadi produk unggulan khas Pacitan seperti Tahu Tuna,yaitu Bakso Tuna, Otak-Otak Tuna, Nugget Tuna, Pangsit Tuna, Kerupuk Tuna, Abon Tuna, Lumpia Tuna, Kaki Naga, Rolade Tuna, Risoles Tuna, Siomay Tuna, dan Ekado.

2) SDM yang Memadai

Menurut Sonny Sumarsono (2003 : 4) Sumber Daya Manusia atau human recources mengandung dua pengertian. Pertama, adalah usaha kerja atau jasa yang dapat diberikan dalam proses produksi. Dalam hal lain SDM mencerminkan kualitas usaha yang diberikan oleh seseorang dalam waktu tertentu untuk menghasilkan barang dan jasa. Pengertian kedua, SDM menyangkut manusia yang mampu bekerja untuk memberikan jasa atau usaha kerja tersebut. Mampu bekerja berarti mampu melakukan kegiatan yang mempunyai kegiatan ekonomis, yaitu bahwa kegiatan tersebut menghasilkan barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan atau masyarakat.

Di Kabupaten Pacitan, jumlah SDM sangat memadai. Khususnya untuk Industri olahan Ikan Tuna. Terpenuhinya SDM untuk Industri olahan Ikan Tuna, maka akan menghasilkan produk dengan maksimal. Waktu yang diperlukan juga lebih efisien, karena adanya SDM yang memadai. Jumlah SDM yang memadai inilah yang mendorong terwujudnya pemberdayaan IKM Ikan Tuna di Kabupaten Pacitan.

3) Pasar yang Jelas

Untuk dapat menjual suatu hasil Industri, di perlukan adanya pasar yang jelas. Pasar adalah suatu tempat fisik di mana pembeli dan penjual berkumpul untuk mepertukarkan barang dan jasa (Kotler, 2002 : 73). Pasar terdiri dari beberapa penjual. Dari pasar inilah, dapat dilihat bagaimana minat konsumen akan suatu produk yang di pasarkan. Seperti halnya dengan Industri olahan Ikan Tuna.

Produksi olahan Ikan Tuna semakin hari terus bertambah. Angka ini bertambah karena adanya permintaan yang semakin tinggi. Baik dari dalam maupun dari luar Kabupaten Pacitan. Tidak sedikit dari IKM Ikan Tuna ini yang mulai membuka cabang. Di beberapa tempat di Kabupaten Pacitan, sudah ada beberapa tempat yang menjadi tempat berkumpulnya para penjual olahan Ikan Tuna yang memasarkan hasil olahan Ikan Tuna. Pasar yang jelas inilah yang membuat para produsen olahan ikan tuna untuk terus meningkatkan mutu poduknya. Dengan pasar yang jelas dan jangkauan luas, akan memudahkan produsen olahan ikan tuna ini dengan baik.

4) Produksi yang Besar

Tingginya permintaan akan suatu produk, harus di imbangi oleh jumlah produksi yang ada. Produksi adalah segala kegiatan yang bertujuan untuk meningkatkan atau menambah guna atas suatu benda, atau segala kegiatan yang ditujukan untuk memuaskan orang lain melalui pertukaran (Partadireja, 1985 : 21). Jumlah produksi yang dihasilkan, dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan suatu Industri tersebut. Di Kabupaten Pacitan, salah satu faktor pendukung dalam mewujudkan pemberdayaan IKM Ikan Tuna ini adalah jumlah Produksi yang besar. Berdasarkan data dari Diskoperindag, pada tahun 2015 jumlah produksi mencapai 924.127 kg untuk semua jenis produk hasil olahan ikan tuna. Tingginya jumlah produksi tersebut, dikarenakan jumlah permintaan yang semakin tinggi. Permintaan yang tinggi

memacu para pelaku Industri olahan Ikan Tuna untuk terus berinovasi terhadap produk Ikan Tuna. Olahan Ikan Tuna saat ini menjadi makanan khas dari Kabupaten Pacitan, yang porduknya mulai dikenali di berbagai daerah.

b. Faktor Penghambat

1) Rendahnya Minat akan Konsumsi Ikan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan pasal 4 menjelaskan bahwa tujuan penyelenggaraan pangan adalah menyediakan pangan yang beraneka ragam dan memenuhi persyaratan keamanan, mutu, dan gizi bagi konsumsi masyarakat. Seperti hal nya di Kabupaten Pacitan. Pemerintah Daerah melalui Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan, menyelenggarakan program "Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN)" . Program ini dibuat karena masyarakat Pacitan masih rendah dalam mengkonsumsi Ikan Laut, mengingat potensi laut Pacitan sangat melimpah. Budaya makan ikan harus disosialisasikan sejak dini. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan nelayan dan mendongkrak produk perikanan, juga memiliki misi lain untuk meningkatkan kualitas gizi dan tingkat kecerdasan masyarakat khususnya anak-anak.

Olahan Ikan Tuna yang saat ini tengah menjadi produk unggulan masyarakat Pacitan, digunakan sebagai alternatif agar masyarakat lebih

banyak mengkonsumsi ikan. Ikan Tuna di olah menjadi produk-produk yang bervariasi dengan harga yang terjangkau.

2) Modal yang Kecil

Riyanto (2007 : 17) mengemukakan beberapa definisi modal: Pengertian modal yang klasik, dimana arti modal ialah sebagai "hasil produksi yang digunakan untuk memproduksi lebih lanjut". Dalam perkembangannya kemudian ternyata pengertian modal mulai bersifat "non- physical oriented", dimana antara lain pengertian modal ditekankan pada nilai, daya beli atau kekuasaan memakai atau menggunakan yang terkandung dalam barang-barang modal, meskipun dalam hal ini juga sebenarnya belum ada persesuaian pendapat diantara para ahli ekonomi sendiri.

Modal mejadi sesuatu yang sangat penting dalam sebuah Industri. Modal menjadi penopang sebuah Industri. Besar kecilnya Industri, disesuaikan dengan modal yang ada. Seperti yang terjadi pada Industri olahan Ikan Tuna di Kabupaten Pacitan. Salah satu kendala yang sering terjadi adalah modal usaha yang kecil. Modal yang kecil, menghambat perkembangan sebuah Industri tersebut. Hambatan mengenai permodalan, saat ini mulai teratasi dengan adanya pembinaan yang dilakukan Diskoperindag Kabupaten Pacitan. Hal ini yang memacu semangat para pelaku Industri Olahan Ikan Tuna untuk lebih giat meningkatkan Industri Olahan Ikan Tuna. Tugas pembinaan permodalan yang dilakukan Diskoperindag Kabupaten Pacitan telah

tercantum dalam Renstra (Rencana Strategis) Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan Tahun 2011-2016.

3) Produk yang *High Risk*

Dalam mengolah suatu produk, pasti memiliki tingkat risiko yang berbeda-beda. Bramantyo (2008:32) Risiko bisa diartikan ketidakpastian yang telah diketahui tingkat probabilitas kejadiannya. Risiko juga dapat diartikan penyebaran atau penyimpangan dari target, sasaran atau harapan. Jadi, risiko harus secepatnya diatasi, agar kerugian bisa diminimalisir.

Olahan Ikan Tuna, memiliki risiko yang cukup tinggi, karena produk ini merupakan *Frozen Food*. Inilah yang paling diantisipasi oleh para pelaku Industri Olahan Ikan Tuna. Risiko tersebut adalah ketahanan produk. Produk Olahan Ikan Tuna tidak menggunakan pengawet, jadi penyimpanan harus melalui pembekuan hingga suhu 0˚. Ini menjadi kendala utama, mengingat peminat dari Olahan Ikan Tuna ini tidak hanya dari konsumen sekitar Kabupaten Pacitan saja. Untuk pengiriman luar kota, olahan ikan tuna di tata pada sebuah kotak *styroform* paling lama satu hari sebelum kembali di bekukan.

4) Kurangnya Minat Pelaku Olahan Ikan Tuna untuk Bergabung dengan Diskoperindag

Dalam menciptakan suatu tujuan bersama, perlu adanya suatu kerjasama. Tangkilisan (2005:86) dalam Manajemen Publik, memandang kerjasama perlu diadakan dengan kekuatan yang

diperkirakan mungkin akan timbul. Kerjasama tersebut dapat didasarkan atas hak, kewajiban, dan tanggung jawab masing-masing orang untuk mencapai tujuan. Kerja sama mendorong berbagai upaya individu agar dapat bekerja lebih produktif, efektif, dan efisien. Dengan adanya kerjasama, akan menciptakan sebuah semangat untuk mencapai tujuan.

Kerjasama sebagaimana telah diuraikan diatas, masih kurang maksimal penerapannya dalam Industri Olahan Ikan Tuna yang ada di Kabupaten Pacitan. Berdasarkan hasil penelitian, observasi dan pengamatan di lapangan, masih banyak Industri Olahan Ikan Tuna yang ada di Kabupaten Pacitan, tetapi belum bekerjasama dengan Diskoperindag. Hal ini disebabkan karena para pelaku Industri Olahan Ikan Tuna tersebut kurang memahami peran dari Diskoperindag serta terlalu menganggap bahwa proses untuk bekerjasama dengan Diskoperindag tersebut berbelit. Untuk mengatasi hal tersebut, Diskoperindag melakukan pendekatan kepada pelaku Industri Olahan Ikan Tuna. Diskoperindag membuka peluan bagi siapapun pelaku Industri Olahan Ikan Tuna untuk bekerjasama dengan Diskoperindag tanpa di pungut biaya apapun.

Tahun 2012 adalah tahun-tahun awal IKM Ikan Tuna terbentuk. Omset pada tahun pertama IKM Ikan Tuna memulai usaha berbeda-beda, sesuai dengan besar kecilnya modal yang dikeluarkan diawal. Pemberdayaan IKM Ikan Tuna yang telah dilaksanakan, membantu masyarakat dengan ekonomi rendah untuk dapat

memperbaiki masalah perekonomian. Peningkatan pendapatan sangat signifikan. Dengan adanya IKM Ikan tuna diharapkan dapat membuka peluang yang lebih luas lagi bagi masyarakat, mengingat permintaan akan olahan Ikan Tuna dari tahun ke tahun semakin meningkat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan program pemberdayaan IKM Ikan Tuna untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan dibantu oleh Dinas Kelautan dan Perikanan, telah menyelenggarakan tahapan-tahapan pemberdayaan berdasarkan tiga tahap pemberdayaan yang di kemukanan oleh Randy R, Riant Nugroho 2007 dalam bukunya "*Manajemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat"*. Hal ini dikarenakan pada proses pemberdayaan tersebut ketiga tahapan ini mencakup seluruh proses pemberdayaan IKM Ikan Tuna yang ada di Kabupaten Pacitan. Ketiga tahapan tersebut, yaitu :

1. Tahap Penyadaran

Target sasaran yaitu masyarakat dengan ekonomi rendah, yang diberikan pemahaman bahwa mereka mempunyai hak untuk menjadi berada. Pada tahap ini masyarakat dibuat mengerti bahwa proses pemberdayaan itu harus berasal dari diri mereka sendiri. Proses ini dapat dipercepat dan di rasionalkan hasilnya dengan hadirnya upaya pendampingan. Pada tahap penyadaran, Diskoperindag berperan untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat, bahwa mereka mampu untuk meningkatkan pendapatan dengan cara memanfaatkan potensi yang ada di sekitar. Diskoperindag melakukan pendampingan sedini mungkin kepada masyarakat untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan pendapatan.

Diskoperindag gencar melakukan sosialisasi khususnya mengenai potensi Ikan Tuna mengingat hasil laut Pacitan sangat melimpah, khususnya Ikan Tuna. Ikan Tuna di olah menjadi beberapa jenis makanan yang nantinya akan meningkatkan harga jual.

2. Tahap Pengkapasitasan

Tahap ini dilakukan dengan memberikan pelatihan-pelatihan, lokakarya dan kegiatan sejenis yang bertujuan untuk meningkatkan *life skill* dari masyarakat miskin. Pada tahap pengkapasitasan, Diskoperindag berperan untuk melakukan pelatihan kepada masyarakat, mengadakan lokakarya untuk meningkat kan *life skill* mereka bahwa mereka mampu untuk meningkatkan pendapatan dengan cara memanfaatkan potensi yang ada di sekitar.

Diskoperindag bekerjasama dengan Dinas Kelautan dan Perikanan terus berupaya memampukan masyarakat dalam memaksimalkan potensi yang ada. Dengan adanya program dari Diskoperindag ini, jumlah pelaku industri Ikan Tuna di Pacitan semakin bertambah. Dari yang semula Ikan Tuna hanya bisa di olah menjadi Tahu Tuna, sekarang sudah berkembang hingga beberapa produk, yaitu Bakso Tuna, Otak-Otak Tuna, Nugget Tuna, Pangsit Tuna, Kerupuk Tuna, Abon Tuna, Lumpia Tuna, Kaki Naga, Rolade Tuna, Risoles Tuna, Siomay Tuna, dan Ekado. Berdasarkan data dari Diskoperindag, ada 29 Industri Kecil dan Menengah Ikan Tuna dengan berbagai hasil olahan Ikan Tuna.

3. Tahap Pendayaan

Pada tahap ini masyarakat diberikan peluang yang disesuaikan dengan kemampuannya. Tahap pendayaan memberikan peluang yang besar kepada masyarakat untuk berperan besar dalam kapasitas dan kapabilitasnya. Menurut hasil wawancara yang telah dilakukan, dapat ditarik kesimpulan bahwa Diskoperindag telah melaksanakan tahapan-tahapan pemberdayaan. Diskoperindag telah melaksanakan sosialisasi, pelatihan dan lokakarya untuk mengembangkan Industri Tahu Tuna tersebut. Pada tahap akhir, setelah tahap sebelumnya berhasil, Diskoperindag hanya mengawasi saja perkembangan industri tersebut. Tetapi, Diskoperindag tidak lepas tangan sepenuhnya. Diskoperindag tetap membantu dengan membina untuk proses standarisasi produk, memberikan bantuan peralatan, serta membantu dalam legalitas produk termasuk pemberian label Halal.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan peneliti didapatkan informasi mengenai bantuan alat produksi yang di berikan Disdoperindag kepada para industri Ikan Tuna. Seperti *Freezer, Vacuum Sealer, Styrofoam Box,* dan penggiling ikan. Semuanya gratis kami berikan. Bantuan alat maupun standarisasi produk dan legalitas diharapkan mampu memaksimalkan industri Ikan Tuna. Diharapkan pula agar supaya dapat meminimalisir resiko yang ada, mengingat olahan Ikan Tuna saat ini telah menjadi makanan khas dari Kabupaten Pacitan yang banyak diminati.

Dalam pelaksanaan pemberdayaan IKM Ikan Tuna, ditemukan beberapa faktor pendukung dan penghambat. Beberapa faktor pendukung dan penghambat pada pemberdayaan IKM Ikan Tuna adalah sebagai berikut;

1. **Faktor Pendukung**

   a. Faktor pendukung yang pertama adalah bahan baku yang melimpah. Laut Pacitan terutama di Pantai Teleng Ria, mempunyai hasil Ikan Tuna yang melimpah. Bahan baku melimpah inilah yang mendorong pihak terkait seperti Diskoperindag dan Dinas Kelautan dan Perikanan terus berupaya memampukan masyarakat dalam memaksimalkan potensi yang ada.

   b. Faktor pendukung yang kedua adalah SDM yang memadai. Olahan Ikan Tuna adalah makanan khas Kabupaten Pacitan. Merupakan produk industri berbasis agro yang sedang dikembangkan oleh Dinas Koperasi Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Pacitan. Ikan Tuna mempunyai prospek yang sangat bagus, karena digemari oleh semua kalangan. Olahan Ikan Tuna bisa menjadi alternatif lain dalam mengkonsumsi ikan. Berjalannya pemberdayaan IKM Ikan Tuna ini tentunya ditunjang dengan adanya SDM yang memadai.

   c. Faktor pendukung ketiga adalah pasar yang jelas. Produksi Ikan Tuna semakin hari terus bertambah. Angka ini bertambah karena adanya permintaan yang semakin tinggi. Baik dari dalam maupun dari luar Kabupaten Pacitan. Tidak sedikit dari IKM Ikan Tuna ini yang mulai membuka cabang. Olahan Ikan Tuna ini mulai tersebar di luar

kota Pacitan. Seperti Ponorogo, Semarang, Trenggalek, Tulungagung, Blitar, Malang, bahkan hingga Jakarta.

d. Faktor pendukung yang keempat adalah produksi yang besar. Salah satu faktor pendukung dalam mewujudkan pemberdayaan IKM Ikan Tuna ini adalah jumlah Produksi yang besar. Berdasarkan data dari Diskoperindag, pada tahun 2015 jumlah produksi mencapai 924.127 kg untuk semua jenis produk hasil olahan ikan tuna. Produksi yang semakin besar dikarenakan permintaan yang terus bertambah.

2. Faktor Penghambat

a. Faktor penghambat yang pertama adalah rendahnya minat konsumsi ikan. Berdasarkan data dari Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan, tingkat konsumsi ikan masyarakat dikabupaten Pacitan saat ini baru 11%. Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Pacitan melakukan kegiatan "Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan" (GEMARIKAN) dengan menggandeng sekolah-sekolah dasar yang ada di Pacitan. Sekolah Dasar menjadi target untuk kegiatan ini karena untuk memasyarakatkan kegemaran makan ikan karena budaya makan ikan harus disosialisasikan sejak dini.

b. Faktor penghambat yang kedua adalah modal yang kecil. Dalam membentuk suatu IKM, selain kemampuan dalam memanfaatkan peluang yang ada, hal terpenting lainnya adalah modal yang akan digunakan untuk memulai suatu usaha. Hal ini sering kali menjadi

kendala. Sulitnya mendapatkan modal akan menghambat perkembangan suatu IKM.

c. Faktor penghambat yang ketiga adalah produk yang *High Risk.* Produk olahan Ikan Tuna merupakan produk *Frozen Food* atau makanan beku. *Frozen Food* atau makanan beku adalah jenis makanan setengah matang yang dikemas dan dibekukan, kemudian bisa di olah kembali dengan cara menggoreng atau memasaknya. Untuk pengiriman luar kota, olahan ikan tuna di tata pada sebuah kotak *styroform* paling lama satu hari sebelum kembali di bekukan. Sehingga, pengiriman untuk keluar kota masih terbatas di wilayah pulau Jawa saja. Hal ini disebabkan karena olahan Ikan Tuna ini bebas dari bahan pengawet, sehingga tidak bisa bertahan lama.

d. Faktor penghambat yang keempat adalah kurangnya minat pelaku olahan ikan tuna untuk bergabung dengan Diskoperindag. Masih banyak yang belum melaporkan usaha ke Diskoperindag. Mereka beralasan proses mengurusnya ribet dan lama.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka peneliti mencoba memberikan saran sebagai berikut;

1. Diskoperindag

   a. Berdasarkan hasil pengamatan, observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti kepada Diskoperindag, sebaiknya Diskoperindag

rutin melakukan sosialisasi. Jadi, sosialisasi yang diberikan tidak hanya pada awal tahap pemberdayaan. Hal ini perlu dilakukan mengingat IKM yang ada semakin berkembang, perlu adanya sosialisasi tentang bagaimana menghadapi pasar yang lebih luas.

b. Diskoperindag sebaiknya lebih mempererat kerjasamanya dengan Dinas Kelautan dan Perikanan. Mengingat keduanya mempunyai peran yang penting bagi IKM Ikan Tuna. Sejauh ini, walaupun kerjasama sudah terjalin dengan baik, masih ada permasalahan dalam pembinaan yang dilakukan. Misalnya suatu IKM mendapat dua bantuan, baik dari Diskoperindag maupun Dinas Kelautan dan Perikanan. Sehingga menjadi tumpang tindih.

c. Menambahkan penyuluh khusus yang turun langsung kepada masyarakat untuk melakukan pelatihan. Jadi, tidak perlu pendatangkan penyuluh dari pusat. Dengan menambahkan penyuluh khusus ini diharapkan mampu membantu masyarakat dalam industri masing-masing.

2. IKM Ikan Tuna

a. Berdasarkan hasil pengamatan, observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti kepada pelaku IKM Ikan Tuna, peneliti memberikan saran sebaiknya IKM Ikan Tuna ini lebih inovatif agar lebih menarik minat konsumen. IKM Ikan Tuna seharusnya tidak bergantung sepenuhnya kepada Diskoperindag maupun Dinas Kelautan dan Perikanan.

b. Bagi IKM Ikan Tuna yang belum bergabung dengan Diskoperindag dsb, sebaiknya segera melaporkan usahanya. Agar supaya produk olahan ikan tuna yang dihasilkan mempunyai ijin edar resmi dan sertifikasi halal. Hal ini bertujuan untuk meminimalisir terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan, karena olahan Ikan Tuna ini *High Risk.*

DAFTAR PUSTAKA

Ace Partadiredja. 1985. *Pengantar Ekonomika.* BPFE Universitas Gajah Mada, Yogyakarta

Arista, Fany dan Baldric Siregar. 2009. Jurnal Ekonomi & Bisnis vol. 3, No. 1 Maret 2009. STIE; Yogyakarta

Bramantyo . 2008. *Manajemen Risiko Korporat*. Jakarta :PPM. Manajemen

Darmadi & Sukidin. 2009. *Administrasi Publik.* Yogyakarta. LaksBang PRESSindo

Ginandjar Kartasasmita. 1997. *Pemberdayaan Masyarakat : Konsep Pembangunan yang Berakar Pada Mayarakat.* Yogyakarta: Universitas Gajah Mada

Herdiansyah, Haris. 2010. *Metodologi Penelitian Kuantitatif.* Jakarta: Salemba Humanika

Karsidi. 2005. *Pemberdayaan Masyarakat Untuk Usaha Kecil dan Mikro, Pengalaman Empiris di Wilayah Surakarta, Jawa Tengah.* Program Studi Ilmu Penyuluhan Pembangunan Sekolah Pascasarjana. IPB: Bogor.

Kartasapoetra. 2000. *Praktek Pengelolaan Koperasi.* Jakarta: PT Rineka Cipta.

Kotler, Philip, 2002, Manajemen Pemasaran, Jilid 1, Edisi Milenium, Jakarta, Prehallindo.

M. Jafar Hafsah. 2004. "*Jurnal Upaya Pengembangan UKM"*Jakarta.

M.Tohar. 2002. *Membuka Usaha Kecil.* Yogyakarta. Kanisius.

Miles, Matthew B, A. Michael HubermandanJohnny Saldana. 2014. *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook Edisi Ketiga.* Sage Publications: Inc

Nazir,Moh 2005. *MetodePenelitia.*Bogor. GhaliaIndonesia

Pasolong, Harbani. 2012. *Metode Penelitian Administrasi Publik.* Bandung: Alfabeta

Riyanto,Bambang.2007.*Dasar Dasar Pembelanjaan Perusahaan.* Yogyakarta: BPFE

Sarwono, Jonathan 2006. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif.* Yogyakarta: Graha Ilmu

Sugiyono. 2008. *MetodePenelitianPendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D).* Bandung: Alfabeta

Sulistiyani, A.T, 2004. *Kemitraandan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta:Gava Media

Sumarsono, Sonny. 2003. *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenaga kerjaan*. Jogyakarta : Graha Ilmu.

Syafri, Wirman. 2011. *Studi tentang Administrasi Publik.* Jakarta : Penerbit Erlangga

Tangkilisan, Nogi Hessel. 2005. *Manajemen Publik.* PT. Gramedia Widiasarana Indonesia : Jakarta.

Tjiptiherijanto&Manurung. 2010. *Paradigma Administrasi Publik dan Perkembangannya.* Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia (UI:Press)

Tohar,M.2002. *Membuka Usaha Kecil.* Yogyakarta:Kanisius

Usmandan Akbar.2009. *Metodologi Penelitian Sosial, Edisi Kedua.*Jakarta: Bumi Aksara

Wrihatmolo, Randy R, Riant Nugroho Dwijowijoto. 2007. *Manajemen Pemberdayaan Sebuah Pengantar dan Panduan untuk Pemberdayaan Masyarakat.* Jakarta: PT.Gramedia

Zuriah, Nurul. 2009. *Metode Penelitian Sosial dan Pendidikan.* Jakarta: Bumi Aksara

Online :

Imam,M.2012. *Pelabuhan Tamperan Pacitan Menjadi Sentra Industri Ikan Tuna Tongkol di Jawa Timur,* (Media Online), *http://surabayapagi.com/index.php?* (diakses pada tanggal 15Maret 2016)

_____*"2015. Potensi Sektor Kelautan Indonesia Menjanjikan.* (Online) *http://kkp.go.id/index.php/pers/potensi-sektor-kelautan-indonesia-menjanjikan/* (diakses pada tanggal 20 Maret 2016)

_____*.2012.Pemerintah Gelontor Milyaran Rupiah Untuk Kembangkan Potensi Kelautan.*(Online) *http://pacitankab.go.id/berita/berita.php?id=996* (diakses pada tanggal 22 Maret 2016)

_____.*2012. Data UMKM.* (Online) http://www.depkop.go.id/berita-informasi/data-informasi/data-umkm/ (Diakses pada tanggal 30 Maret 2016)

Undang-Undang :

Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Pasal 1 tentang usaha mikro, kecil, dan menengah

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 Tentang Perkoperasian

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro,Kecil dan Menengah

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 Tentang Perindustrian

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tantang Desa

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JL. Ronggo Warsito No. 07 Telp. (0357) 881066
PACITAN

REKOMENDASI PENELITIAN

NOMOR: 072/167/408.45/2016

Dasar :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistim Nasional Penelitian , Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuandan Teknologi;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
4. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintah Kabupaten Pacitan;
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 5 Tahun 2012 tentang Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Pacitan;
6. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Uraian Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan.

Memperhatikan : Surat Dekan Universitas Brawijaya Malang, tanggal 05 April 2016, Nomor: 5350/UN10.3/PG/2016, Perihal :Permohonan Ijin Penelitian

MEMBERITAHUKAN BAHWA

Nama	:	**RIYAN FIMA ANGGRAENY**
Alamat	:	Jl. Nirasari 30, Perum. Bangunsari
Telpon / NIM	:	085236607868/125030100111145
Untuk	:	Melaksanakan Penelitian " ***Pemberdayaan Usaha Kecil dan Menengah Untuk Peningkatan Pendapatan Masyarakat di Pantai Teleng Ria Kabupaten Pacitan (Studi Pada Dinas Koperasi, Perindustrian Dan Perdagangan Kabupaten Pacitan)*** "
Lokasi penelitian	:	Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan Kab. Pacitan
Waktu / lama	:	26 April s/d 26 Juni 2016
Anggota	:	-
Bidang penelitian	:	Pemberdayaan Masyarakat
Status penelitian	:	Baru

Dengan ketentuan :

1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / lokasi penelitian
2. Pelaksanaan penelitian agar tidak disalah gunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kesetabilan keamanan dan ketertiban di daerah setempat / lokasi penelitian.
3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Bupati Pacitan melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Pacitan.
4. Apabila masa berlaku rekomendasi penelitian telah berakhir, dan penelitian sedang berjalan, peneliti harus segera mengajukan perpanjangan waktu dengan menyertakan hasil penelitian sebelumnya
5. Surat Keterangan ini akan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi apabila ternyata bahwa pemegang Surat Rekomendasi ini tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk digunakan seperlunya.

Pacitan, 26 April 2016

An. KEPALA BAKESBANGPOL
KABUPATEN PACITAN
Sekretaris

PEMERINTAH KABUPATEN PACITAN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Drs.THEODORUS DORU,M.Si
Penata Tingkat I
Nip. 195908311986121002

Tembusan :
Yth.
1. Bapak Bupati Pacitan
2. Dandim 0801 Pacitan
3. Kapolres Pacitan
4. Kepala Bappeda Kab Pacitan
5. Kepala Balitbang dan Statistik Kab. Pacitan
6. Kepala DISKOPERINDAG Kab. Pacitan
7. Kepala DISBUDPARPORA Kab. Pacitan
8. Kepala BPS Kab. Pacitan
9. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kab. Pacitan
10. Yang bersangkutan untuk dilaksanakan

Pedoman Wawancara

- DISKOPERINDAG Kab. Pacitan Dhian Kurniwidya

  1. Gambaran umum Diras Kelautan
     - Visi ✓
     - Misi ✓
     - Struktur Organisasi ✓
     - Tugas dan Fungsi - Sekretaris Kelembagan
     - Bidang Kerja :5 - Koperas Perindustrian
       - Perdag
  2. Apa saja program pemberdayaan yang telah dilaksanakan?
  3. Apa yang menjadi tujuan diskoperindag dalam melaksanakan pemberdayaan?
  4. Bagaimana proses pemberdayaan UKM khususnya tahutuna di Pacitan?
  5. Sejauh mana perkembangan UKM tahutuna di Pacitan?
  6. Ada berapa banyak UKM tahutuna yang telah mendapat binaan dari diskoperindag?
  7. Apa saja syarat dan kriteria khusus untuk pelaku UKM tahutuna agar mendapat bimbingan dan arahan dari diskoperindag?
  8. Apa saja bentuk kegiatan yang dilakukan diskoperindag dalam pemberdayaan UKM tahutuna?
  9. Fasilitas apa saja yang diberikan oleh diskoperindag terhadap pelaku UKM tahutuna?
  10. Apa feedback yang diberikan pelaku UKM tahutuna untuk diskoperindag?
  11. Apa manfaat yang dirasakan oleh diskoperindag?
  12. Apa saja faktor pendorong dan faktor penghambat diskoperindag dalam program tersebut?
  13. Apa harapan dari diskoperindag untuk industri olahan ikantuna?

Pedoman Wawancara

- Industri ~~UKM~~ IKM Tahutuna dibawah diskoperindag :
  - Sejauh mana ibu/bpk memahami tentang pemberdayaan?
  - Apa yang ibu/bpk pahami tentang ~~UKM~~ IKM ?
  - Sejak kapan usaha ibu/bpk ini dirintis?
  - Apa yang mendorong ibu/bpk merintis usaha ini?
  - Darimana ibu/bpk mempelajari tentang pengolahan ikan tuna?
  - Apa saja produk dari usaha ibu/bpk tersebut? Harga produk?
  - Berapa rata-rata omset perbulan ibu/bpk?
  - Berapa jumlah pegawai ibu/bpk?
  - Sejak kapan ibu/bpk berada di bawah binaan diskoperindag?
  - Darimana ibu/bpk mendapat informasi tentang program yang diberikan diskoperindag?
  - Apa saja kegiatan yang dilakukan bersama dengan diskoperindag?
  - Fasilitas apa saja yang diberikan diskoperindag?
  - Apa manfaat yang ibu/bpk rasakan setelah berada di bawah binaan diskoperindag?
  - Apa yang menjadi kendala dalam produksi olahan ikan tuna?
  - Bagaimana cara menyiasati harga dipasaran ketika harga ikan tinggi atau ketersediaan bahan baku yang minim?
  - Apa harapan ibu/bpk untuk diskoperindag?

- Industri IKM tahutuna non diskoperindag :
  - Sejauh mana ibu/bpk memahami tentang pemberdayaan?
  - Apa yang ibu/bpk pahami tentang [redacted]? IKM ?
  - Sejak kapan usaha ibu/bpk ini dirintis?
  - Apa yang mendorong ibu/bpk merintis usaha ini?
  - Darimana ibu/bpk mempelajari tentang pengolahan ikan tuna?
  - Apa saja produk dari usaha ibu/bpk tersebut? Harga produk?
  - Berapa rata-rata omset perbulan ibu/bpk?
  - Berapa jumlah pegawai ibu/bpk?
  - Apakah faktor pendorong dan penghampat dari usaha tersebut?
  - Apakah ibu/bpk mengetahui tentang program pemberdayaan dari diskoperindag?
  - Apakah ibu/bpk bergabung?
  - Apa yang menjadi alasan ibu/bpk enggan bergabung dengan diskoperindag?
  - Apa harapan ibu/bpk untuk diskoperindag?

DAFTAR IKM BERSETIFIKAT

1.SERTIFIKAT HALAL

NO	Nama Produk	Pemilik Perusahaan	Alamat	Dikeluarkan	Berlaku S.d	Ket
1	1.Tahu Tuna 2.Bakso Tuna 3.Rolade	Eza Mandiri	Rt.05 Rw.11 Teleng Kel.Sidoharjo Pacitan Jawa Timur	17 November 2011	16 November 2013	
2	Kecap Manis	Kecap Sri Rejeki	Jln.Nakula No.5 Pucang sewu Pacitan Jawa Timur	02 Desember 2011	01 Desember 2013	
3	1.Abon Tuna 2.Trasi Udang	BINA MAKMUR	Ling.Teleng Ria Rt.01 Rw.11 Sidoharjo Pacitan Jawa Timur	December 2, 2011	December 1, 2013	
4	1.Sari Kedelai Murni 2.Sari Kedelai Rasa Jahe 3.Sari Kedelai Dan Kacang Hijau 4,Sari Kedelai Dan Jagung	SEHAT ALAMI	Dsn.Sundeng Rt.02 Rw.04 Ds.Bangunsari Pacitan Jawa Timur	December 4, 2012	December 3, 2014	
5	1.Gula Kelapa Cetak 2.Gula Semut 3.Gula Semut Rasa Jahe	ISM Manggar Sari	Dsn.Klagen Rt.02 Rw.01 Ds.Mantren Kec.Kebonagung Pacitan Jawa Timur	December 4, 2012	December 3, 2014	
6	1.Keripik Pisang 2.Keripik Talas Pedas 3.Keripik Talas Gurih 4.Keripik Singkong Pedas	PRATAMA	Dsn.Pager Rt.01 Rw.01 Ds.Arjowinangun Pacitan Jawa Timur	December 4, 2012	December 3, 2012	

	5.Keripik Singkong Guring 6.Keripik Sukun 7.Manggleng Pedas					
7	Kecap Manis DELIMA	DELIMA	Rt 02 RW.01 Pager Arjowinangun pacitan Jawa Timur	December 4, 2012	December 3, 2014	
8	Kecap Manis Merk Sari Murni	SARI MURNI	Rt.04 Rw 02 Dsn Suruhan Ds.Sirnoboyo Pacitan Jawa Timur	December 4, 2012	December 3, 2014	
9	1.Garam Konsumsi Beryodium Kasar 2.Garam Konsumsi Beryodium Halus	UD.GARUDA SEJAHTERA	Rt.01 Rw 02 Dsn Duduhan Ds.Mentoro Kec.Pacitan Kab.Pacitan Jawa Timur	24 November 2014	23 November 2016	
10	Air Minum Dalam Kemasan "TOPAC"	Perusahaan Daerah Aneka Usaha Kab.Pacitan	Jln.Raden Saleh No.40 Kelurahan Ploso Pacitan Jawa Timur	24 November 2014	23 November 2015	
11	1.Tahu ikan tuna 2. Bakso ikan tuna 3. Bakso sayur ikan tuna 4. Kaki naga ikan tuna 5. lumpia ikan tuna 6. Siomay ikan tuna	CV. NAVAR BAHARI RAYA	Rt.04 Rw. 04 Dsn Bengkal Ds Tanjung sari Kec Pacitan Kab Pacitan Jawa Timur	24 November 2014	23 November 2016	
12	1. tahu ikan tuna 2. Bakso ikan tuna 3. Otak-otak ikan tuna 4. Nugget ikan tuna 5. Kaki naga 6. Sosis ikan tuna 7. Lumpia ikan tuna	Nabilla Makmur	Rt. 04 Rw. 04 no. 14 Dsn Bengkal Ds Tanjung Sari Kec. Pacitan Kab. Pacitan	24 November 2014	23 November 2016	

	8. Siomay ikan tuna					
13	1. Tahu tuna 2. Bakso tuna 3. Otak- otak 4. Siomay 5. lumpia 6.Nugget	ZADA MANDIRI	Jln.Veteran No.7 Pacitan Jawa Timur	24 November 2014	23 November 2016	

2.1 URUSAN KELAUTAN DAN PERIKANAN

NO.	DATA BASE	SATUAN	TAHUN ANGGARAN					KET	SKPD
			2010	2011	2012	2013	2014		
1	**Panjang Garis Pantai Kab. Pacitan**		**71**	**71**	**71**	**71**	**71**		
	a. Kec. Donorojo	Km	8	8	8	8	8		Dinas Kelautan dan Perikanan
	b. Kec. Pringkuku	Km	16	16	16	16	16		Dinas Kelautan dan Perikanan
	c. Kec. Pacitan	Km	3	3	3	3	3		Dinas Kelautan dan Perikanan
	d. Kec. Kebonagung	Km	19	19	19	19	19		Dinas Kelautan dan Perikanan
	e. Kec. Tulakan	Km	4	4	4	4	4		Dinas Kelautan dan Perikanan
	f. Kec. Ngadirojo	Km	11	11	11	11	11		Dinas Kelautan dan Perikanan
	g. Kec. Sudimoro	Km	11	11	11	11	11		Dinas Kelautan dan Perikanan
2	**Luas Wilayah Laut Kewenangan Kab. Pacitan**		**524**	**524**	**524**	**524**	**524**		
	a. Kec. Donorojo	Km^2	62	62	62	62	62		Dinas Kelautan dan Perikanan
	b. Kec. Pringkuku	Km^2	117	117	117	117	117		Dinas Kelautan dan Perikanan
	c. Kec. Pacitan	Km^2	19	19	19	19	19		Dinas Kelautan dan Perikanan
	d. Kec. Kebonagung	Km^2	140	140	140	140	140		Dinas Kelautan dan Perikanan
	e. Kec. Tulakan	Km^2	27	27	27	27	27		Dinas Kelautan dan Perikanan
	f. Kec. Ngadirojo	Km^2	78	78	78	78	78		Dinas Kelautan dan Perikanan
	g. Kec. Sudimoro	Km^2	82	82	82	82	82		Dinas Kelautan dan Perikanan
3	**Desa Pesisir Kab. Pacitan**		**26**	**26**	**26**	**26**	**26**		
	a. Kec. Donorojo	Desa	3	3	3	3	3		Dinas Kelautan dan Perikanan
	b. Kec. Pringkuku	Desa	6	6	6	6	6		Dinas Kelautan dan Perikanan
	c. Kec. Pacitan	Desa	3	3	3	3	3		Dinas Kelautan dan Perikanan
	d. Kec. Kebonagung	Desa	7	7	7	7	7		Dinas Kelautan dan Perikanan
	e. Kec. Tulakan	Desa	1	1	1	1	1		Dinas Kelautan dan Perikanan
	f. Kec. Ngadirojo	Desa	2	2	2	2	2		Dinas Kelautan dan Perikanan
	g. Kec. Sudimoro	Desa	4	4	4	4	4		Dinas Kelautan dan Perikanan

NO.	DATA BASE	SATUAN	TAHUN ANGGARAN					KET	SKPD
			2010	2011	2012	2013	2014		
4	**Jumlah Tempat Pendaratan Ikan**		**14**	**14**	**14**	**14**	**14**		
	a. Kec. Donorojo	Buah	-	-	-	-	-		Dinas Kelautan dan Perikanan
	b. Kec. Pringkuku	Buah	2	2	2	2	2		Dinas Kelautan dan Perikanan
	c. Kec. Pacitan	Buah	3	3	3	3	3		Dinas Kelautan dan Perikanan
	d. Kec. Kebonagung	Buah	5	5	5	5	5		Dinas Kelautan dan Perikanan
	e. Kec. Tulakan	Buah	2	1	1	1	1		Dinas Kelautan dan Perikanan
	f. Kec. Ngadirojo	Buah	1	1	1	1	1		Dinas Kelautan dan Perikanan
	g. Kec. Sudimoro	Buah	2	2	2	2	2		Dinas Kelautan dan Perikanan
5	**Jumlah Tempat Pelelangan Ikan**		**6**	**6**	**6**	**6**	**6**		
	a. Kec. Donorojo	Buah	-	-	-	-	-		Dinas Kelautan dan Perikanan
	b. Kec. Pringkuku	Buah	1	1	1	1	1		Dinas Kelautan dan Perikanan
	c. Kec. Pacitan	Buah	2	2	2	2	2		Dinas Kelautan dan Perikanan
	d. Kec. Kebonagung	Buah	1	1	1	1	1		Dinas Kelautan dan Perikanan
	e. Kec. Tulakan	Buah	-	-	-	-	-		Dinas Kelautan dan Perikanan
	f. Kec. Ngadirojo	Buah	1	1	1	1	1		Dinas Kelautan dan Perikanan
	g. Kec. Sudimoro	Buah	1	1	1	1	1		Dinas Kelautan dan Perikanan
6	**Konsumsi Ikan**	**Kg/Kapita/ Thn**	**7,97**	**11,54**	**12,09**	**13,80**	**14,63**		Dinas Kelautan dan Perikanan
7	**Produksi Laut Kab. Pacitan**		**4.186.573**	**6.286.814**	**6.252.175**	**7.822.760**	**7.999.500**		
	a. Kec. Donorojo	Kg	49.957	12.038	22.093	20.990	17.503		Dinas Kelautan dan Perikanan
	b. Kec. Pringkuku	Kg	331.982	224.105	98.033	61.096	324.360		Dinas Kelautan dan Perikanan
	c. Kec. Pacitan	Kg	3.896.408	5.299.184	5.340.157	6.930.545	5.954.064		Dinas Kelautan dan Perikanan
	d. Kec. Kebonagung	Kg	18.240	116.490	126.400	163.235	545.751		Dinas Kelautan dan Perikanan
	e. Kec. Tulakan	Kg	80.966	61.872	79.687	57.711	150.936		Dinas Kelautan dan Perikanan
	f. Kec. Ngadirojo	Kg	535.322	535.322	542.606	542.606	794.721		Dinas Kelautan dan Perikanan
	g. Kec. Sudimoro	Kg	144.023	37.758	43.199	46.577	212.165		Dinas Kelautan dan Perikanan

NO.	DATA BASE	SATUAN	TAHUN ANGGARAN					KET	SKPD
			2010	2011	2012	2013	2014		
8	**Nilai Produksi Laut Kab. Pacitan**		**32.410.527.000**	**40.896.814.000**	**56.269.575.000**	**65.597.698.000**	**89.895.335.000**		
	a. Kec. Donorojo	Rp.	569.850.000	137.820.000	198.837.000	481.020.000	472.351 .000		Dinas Kelautan dan Perikanan
	b. Kec. Pringkuku	Rp.	2.049.046.000	1.383.210.000	882.297.000	854.207.000	5.849.447 .000		Dinas Kelautan dan Perikanan
	c. Kec. Pacitan	Rp.	24.593.682.000	33.447.843.000	48.061.413.000	55.713.488.000	54.458.820 .000		Dinas Kelautan dan Perikanan
	d. Kec. Kebonagung	Rp.	293.970.000	1.877.443.000	1.137.600.000	3.918.973.000	11.368.233 .000		Dinas Kelautan dan Perikanan
	e. Kec. Tulakan	Rp.	939.086.000	717.623.000	717.183.000	419.306.000	2.734.582 .000		Dinas Kelautan dan Perikanan
	f. Kec. Ngadirojo	Rp.	2.999.307.000	2.999.307.000	4.883.454.000	3.467.205.000	11.046.483 .000		Dinas Kelautan dan Perikanan
	g. Kec. Sudimoro	Rp.	1.272.352.000	333.568.000	388.791.000	743.499.000	3.965.421 .000		Dinas Kelautan dan Perikanan
9	**Jumlah Nelayan Kab. Pacitan**		**3.792**	**3.840**	**3.898**	**4.852**	**4.898**		
	a. Kec. Donorojo	Orang	125	125	125	240	240		Dinas Kelautan dan Perikanan
	b. Kec. Pringkuku	Orang	681	681	681	681	683		Dinas Kelautan dan Perikanan
	c. Kec. Pacitan	Orang	1.413	1.413	1.471	2.310	2.340		Dinas Kelautan dan Perikanan
	d. Kec. Kebonagung	Orang	754	754	754	754	759		Dinas Kelautan dan Perikanan
	e. Kec. Tulakan	Orang	164	164	164	164	166		Dinas Kelautan dan Perikanan
	f. Kec. Ngadirojo	Orang	427	470	470	470	478		Dinas Kelautan dan Perikanan
	g. Kec. Sudimoro	Orang	236	233	233	233	232		Dinas Kelautan dan Perikanan
10	**Jumlah Kapal Kab.Pacita**		**1.460**	**1.473**	**1.519**	**1.522**	**1.277**		
	a. Kec. Donorojo	Buah	7	7	7	10	9		Dinas Kelautan dan Perikanan
	b. Kec. Pringkuku	Buah	218	218	223	223	144		Dinas Kelautan dan Perikanan
	c. Kec. Pacitan	Buah	414	396	424	424	338		Dinas Kelautan dan Perikanan

NO.	DATA BASE	SATUAN	TAHUN ANGGARAN					KET	SKPD
			2010	2011	2012	2013	2014		
	d. Kec. Kebonagung	Buah	326	327	332	332	306		Dinas Kelautan dan Perikanan
	e. Kec. Tulakan	Buah	59	59	60	60	51		Dinas Kelautan dan Perikanan
	f. Kec. Ngadirojo	Buah	344	365	369	369	359		Dinas Kelautan dan Perikanan
	g. Kec. Sudimoro	Buah	95	101	104	104	70		Dinas Kelautan dan Perikanan
11	**Jumlah Pemilik Perahu**		**944**	**1.115**	**1161**	**1.164**	**1.045**		
	a. Kec. Donorojo	Unit	7	7	7	10	9		Dinas Kelautan dan Perikanan
	b. Kec. Pringkuku	Unit	82	218	223	223	144		Dinas Kelautan dan Perikanan
	c. Kec. Pacitan	Unit	263	270	298	298	298		Dinas Kelautan dan Perikanan
	d. Kec. Kebonagung	Unit	300	301	306	306	306		Dinas Kelautan dan Perikanan
	e. Kec. Tulakan	Unit	59	59	60	60	51		Dinas Kelautan dan Perikanan
	f. Kec. Ngadirojo	Unit	142	163	167	167	167		Dinas Kelautan dan Perikanan
	g. Kec. Sudimoro	Unit	91	97	100	100	70		Dinas Kelautan dan Perikanan
12	**Jumlah Alat Tangkap Kab. Pacitan**		**62.946**	**65.842**	**66.657**	**66.673**	**81.124**		
	a. Parel	Unit	3.475	3.530	3.635	3.635	2.767		Dinas Kelautan dan Perikanan
	b. Gillnet	Unit	688	699	704	714	852		Dinas Kelautan dan Perikanan
	c. Gondrong	Unit	1.265	1.320	1.520	1.520	670		Dinas Kelautan dan Perikanan
	d. Purse Seine	Unit	23	21	26	32	36		Dinas Kelautan dan Perikanan
	e. Payang	Unit	44	56	56	56	60		Dinas Kelautan dan Perikanan
	f. Pancing	Unit	12.682	15.182	15.482	15.482	24.687		Dinas Kelautan dan Perikanan
	g. Pukat Pantai	Unit	2	2	2	2	2		Dinas Kelautan dan Perikanan
	h. Krendet	Unit	44.767	45.032	45.232	45.232	52.050		Dinas Kelautan dan Perikanan
13	**Jumlah Penebaran Ikan Air Tawar**	**Ekor**	**11.379.086**	**11.053.895**	**10.249.970**	**10.557.469**	**11.236.045**		Dinas Kelautan dan Perikanan
14	**Jumlah Desa Yang Memiliki Kolam**		**135**	**136**	**137**	**139**	**139**		
	a. Donorojo	Desa	7	9	9	9	9		Dinas Kelautan dan Perikanan
	b. Punung	Desa	9	11	11	11	11		Dinas Kelautan dan Perikanan

NO.	DATA BASE	SATUAN	TAHUN ANGGARAN					KET	SKPD
			2010	2011	2012	2013	2014		
	c. Pringkuku	Desa	7	13	13	13	13		Dinas Kelautan dan Perikanan
	d. Pacitan	Desa	19	18	19	19	19		Dinas Kelautan dan Perikanan
	e. Kebonagung	Desa	19	16	16	16	16		Dinas Kelautan dan Perikanan
	f. Arjosari	Desa	17	17	17	17	17		Dinas Kelautan dan Perikanan
	g. Nawangan	Desa	9	9	9	11	11		Dinas Kelautan dan Perikanan
	h. Bandar	Desa	5	8	8	8	8		Dinas Kelautan dan Perikanan
	i. Tegalombo	Desa	11	11	11	11	11		Dinas Kelautan dan Perikanan
	j. Tulakan	Desa	13	9	9	9	9		Dinas Kelautan dan Perikanan
	k. Ngadirojo	Desa	16	11	11	11	11		Dinas Kelautan dan Perikanan
	l. Sudimoro	Desa	3	4	4	4	4		Dinas Kelautan dan Perikanan
15	**Jumlah Pemilik Kolam**		**2.892**	**3.695**	**3.725**	**3.745**	**3.784**		
	a. Donorojo	Orang	214	213	214	222	232		Dinas Kelautan dan Perikanan
	b. Punung	Orang	311	404	407	385	390		Dinas Kelautan dan Perikanan
	c. Pringkuku	Orang	190	739	742	675	672		Dinas Kelautan dan Perikanan
	d. Pacitan	Orang	300	343	347	348	352		Dinas Kelautan dan Perikanan
	e. Kebonagung	Orang	123	182	186	186	196		Dinas Kelautan dan Perikanan
	f. Arjosari	Orang	380	318	320	320	325		Dinas Kelautan dan Perikanan
	g. Nawangan	Orang	243	262	363	363	371		Dinas Kelautan dan Perikanan
	h. Bandar	Orang	204	312	315	315	305		Dinas Kelautan dan Perikanan
	i. Tegalombo	Orang	225	158	161	161	164		Dinas Kelautan dan Perikanan
	j. Tulakan	Orang	220	240	242	242	238		Dinas Kelautan dan Perikanan
	k. Ngadirojo	Orang	395	425	426	426	431		Dinas Kelautan dan Perikanan
	l. Sudimoro	Orang	87	99	102	102	108		Dinas Kelautan dan Perikanan
16	**Luas Baku Kolam**		**242.987**	**242.987**	**253.064**	**258.446**	**258.446**		
	a. Donorojo	M^2	5.402	5.402	5.831	5.831	5.831		Dinas Kelautan dan Perikanan
	b. Punung	M^2	8.238	8.238	9.408	9.408	9.408		Dinas Kelautan dan Perikanan
	c. Pringkuku	M^2	8.100	8.100	8.820	8.820	8.820		Dinas Kelautan dan Perikanan
	d. Pacitan	M^2	20.000	20.000	21.440	21.440	21.440		Dinas Kelautan dan Perikanan
	e. Kebonagung	M^2	2.980	2.980	3.748	4.035	4.035		Dinas Kelautan dan Perikanan
	f. Arjosari	M^2	13.640	13.640	14.936	14.936	14.936		Dinas Kelautan dan Perikanan

NO.	DATA BASE	SATUAN	TAHUN ANGGARAN					KET	SKPD
			2010	2011	2012	2013	2014		
	g. Nawangan	M²	6.425	6.425	6.713	6.713	6.713		Dinas Kelautan dan Perikanan
	h. Bandar	M²	6.290	6.290	7.355	12.450	12.450		Dinas Kelautan dan Perikanan
	i. Tegalombo	M²	9.050	9.050	10.220	10.220	10.220		Dinas Kelautan dan Perikanan
	j. Tulakan	M²	8.630	8.630	9.134	9.134	9.134		Dinas Kelautan dan Perikanan
	k. Ngadirojo	M²	150.000	150.000	150.507	150.507	150.507		Dinas Kelautan dan Perikanan
	l. Sudimoro	M²	4.232	4.232	4.952	4.952	4.952		Dinas Kelautan dan Perikanan
17	**Produksi Ikan Darat**		**733.681**	**814.942**	**816.810**	**872.056**	**919.373**		
	a. Donorojo	Kg	26.679	46.675	56.877	175.051	72.276		Dinas Kelautan dan Perikanan
	b. Punung	Kg	18.720	42.851	50.295	80.112	71.603		Dinas Kelautan dan Perikanan
	c. Pringkuku	Kg	60.620	93.362	89.906	55.958	38.067		Dinas Kelautan dan Perikanan
	d. Pacitan	Kg	201.307	160.566	212.057	100.847	344.368		Dinas Kelautan dan Perikanan
	e. Kebonagung	Kg	11.230	16.785	29.195	61.569	27.575		Dinas Kelautan dan Perikanan
	f. Arjosari	Kg	70.565	50.725	56.242	50.630	78.063		Dinas Kelautan dan Perikanan
	g. Nawangan	Kg	57.380	78.388	84.554	48.441	30.983		Dinas Kelautan dan Perikanan
	h. Bandar	Kg	15.666	13.317	18.905	35.704	15.433		Dinas Kelautan dan Perikanan
	i. Tegalombo	Kg	7.375	5.478	10.059	41.413	32.822		Dinas Kelautan dan Perikanan
	j. Tulakan	Kg	41.200	26.331	32.089	41.178	28.971		Dinas Kelautan dan Perikanan
	k. Ngadirojo	Kg	209.750	143.666	160.223	154.432	161.214		Dinas Kelautan dan Perikanan
	l. Sudimoro	Kg	13.189	16.441	16.408	26.721	17.999		Dinas Kelautan dan Perikanan
18	**Nilai Produksi Ikan Darat**		**8.804.172.000**	**7.188.166.000**	**10.618.530.000**	**14.799.322.641**	**21.530.878.000**		
	a. Donorojo	Rp.	320.148.000	597.232.000	739.401.000	2.962.661.702	920.214.000		Dinas Kelautan dan Perikanan
	b. Punung	Rp.	224.640.000	558.253.000	653.835.000	1.361.811.500	968.178.000		Dinas Kelautan dan Perikanan
	c. Pringkuku	Rp.	727.440.000	709.014.000	1.168.778.000	758.376.250	490.904.000		Dinas Kelautan dan Perikanan
	d. Pacitan	Rp.	2.415.684.000	1.380.083.000	2.756.741.000	2.112.994.500	13.673.379.000		Dinas Kelautan dan Perikanan
	e. Kebonagung	Rp.	134.760.000	239.430.000	379.535.000	917.098.750	365.750.000		Dinas Kelautan dan Perikanan
	f. Arjosari	Rp.	846.780.000	689.650.000	731.146.000	878.896.625	1.045.582.000		Dinas Kelautan dan Perikanan
	g. Nawangan	Rp.	688.560.000	1.056.561.000	1.099.202.000	724.536.243	454.622.000		Dinas Kelautan dan Perikanan

NO.	DATA BASE	SATUAN	TAHUN ANGGARAN					KET	SKPD
			2010	2011	2012	2013	2014		
	h. Bandar	Rp.	187.992.000	187.301.000	245.765.000	611.149.000	225.599.000		Dinas Kelautan dan Perikanan
	i. Tegalombo	Rp.	88.500.000	76.837.000	130.767.000	699.448.250	457.551.000		Dinas Kelautan dan Perikanan
	j. Tulakan	Rp.	494.400.000	330.148.000	417.157.000	693.122.927	359.672.000		Dinas Kelautan dan Perikanan
	k. Ngadirojo	Rp.	2.517.000.000	1.086.495.000	2.082.899.000	2.625.816.290	2.334.405.000		Dinas Kelautan dan Perikanan
	l. Sudimoro	Rp.	158.268.000	277.162.000	213.304.000	453.410.604	235.022.000		Dinas Kelautan dan Perikanan

NO	BERAT	JENIS IKAN	HARGA/Kg	JUMLAH
1		TUNA 20+	20.000	-
2		BS 15+/20+	8.500	-
3		TUNA 15+	11.000	-
4		TUNA 10+	9.000	-
5		TUNA ALB	8.000	-
6		TUNA B	7.500	-
7		TUNA K	6.000	-
8		CAKALANG B	5.000	-
9		CAKALANG K	4.000	-
10		TONGKOL	4.000	-
11		MARLIN	9.000	-
12		LAYAR	7.000	-
13		LMD. K	5.000	-
14		LAYANG	5.000	-
15		LAURA	5.000	-
16		RENGIS	3.000	-
17		TENGGIRI	7.000	-
18		CUCUT/HIU	7.000	-
19		CUMI	5.000	-
20		POGOT	1.000	-
21		LOPIS	1.000	-
22		BS	3.000	-
23		BS LYG/RENGIS	2.000	-

DATA INDUSTRI IKAN TUNA

DI KAB. PACITAN 2015

NO	NAMA PRODUK	PEMILIK	TNG KRJ (ORG)	
			L	P
1	Zada mandiri	Dheny kurniawan	3	4
2	Srikandi	Surtini	2	6
3	Cahaya barokah	Liliek marijani	1	6
4	Deandra	Dewi ratnasari	1	1
5	Berkah samudra	Yulida husni	-	3
6	Hikmah	Sukoyanti	-	3
7	Maju jaya	Rustyowati	-	4
8	Aditya	Retno susanti	2	2
9	Zafima	Tumarmi	2	5
10	Navar bahari raya	Kelompok	2	4
11	Nabila makmur	Yoyok dwi kuncoro	3	3
12	Sagita "sari laut"	Agustina ratna wati	-	2
13	Trisno roso,	Kunafiah	1	4
14	Mina jaya,	Wahana mekar lestari	3	5
15	Zalin	Zulaekhah	1	9
16	Eza mandiri,	Sukiran	40	-
17	Tahu tuna aroma,	Erwin triyono	4	5
18	Sumber rejeki,	Sarofah	1	4
19	Sari laut dua putri	Tugiarti	2	2
20	Bina makmur	Marsiah	3	11
21	Amanah	Juamiati	-	2
22	Sari ulam	Samdari	2	2
23	Khasanah	Meta persada	2	4
24	Idola	Winarti	-	5
25	Ilham abadi	Yuni setiyowati	-	2
26	Trisno samudro	Tri sutrisno	1	2
27	Tiga putri	Suryaning utami	-	2
28	Maju jaya lancar	Yani	2	3
29	Alfis	Alfi sa'adah	1	4

PRODUKSI PERIKANAN LAUT
MENURUT JENIS IKAN TAHUN 2015
KABUPATEN PACITAN

No	Jenis Ikan	DONOROJO	KEBONAGUNG	NGADIROJO	PACITAN	PRINGKUKU	SUDIMORO	TULAKAN	TOTAL
1	Sebelah	-	-	190	36	-	100	-	326
2	Lidah	-	500	1,541	-	-	-	-	2,041
3	Peperek	-	1,450	-	-	-	-	-	1,450
4	Manyung	-	19,450	2,559	6,946	9,211	1,809	-	39,975
5	Kakap merah/ bambangan	600	-	467	609	168	539	-	2,383
6	Kerapu karang	-	-	-	-	33	185	-	218
7	Kerapu bebek	-	-	-	-	-	-	-	-
8	Kerapu lainnya	-	-	-	-	180	-	-	180
9	Lencam	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Ekor kuning/ pisang-pisang	-	250	-	6,255	-	-	-	6,505
11	Gulamah/ tigawaja	50	-	-	2,313	-	-	-	2,363
12	Cucut lanyam	90	-	-	322	605	-	-	1,017
13	Cucut botol	-	-	270	-	966	-	-	1,236
14	Pari	-	29,580	12,820	1,628	2,792	7,074	11,728	65,622
15	Bawal hitam	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Bawal putih	500	5,250	-	-	674	220	20	6,664
17	Layang	-	-	-	1,737,236	-	1,533	-	1,738,769
18	Selar	-	7,700	5,500	1,561	-	-	-	14,761
19	Kuwe	-	2,750	315	2,503	1,634	841	-	8,043
20	Kuro/senangin	-	-	-	-	-	982	-	982
21	Julung-julung	-	-	-	-	30	362	-	392

No	Jenis Ikan	DONOROJO	KEBONAGUNG	NGADIROJO	PACITAN	PRINGKUKU	SUDIMORO	TULAKAN	TOTAL
22	Teri	50	-	-	7,738	-	-	-	7,788
23	Lemuru	-	47,750	14,784	952	626	4,667	8,022	76,801
24	Golok-golok/ parang-parang	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Kembung	-	5,000	22,032	931	199	653	7,147	35,962
26	Tengiri	1,650	3,750	1,400	5,881	928	1,872	20	15,501
27	Layur	6,600	504,050	920,086	914,497	754,261	200,438	74,641	3,374,573
28	Tuna	-	-	15,415	1,322,846	-	-	-	1,338,261
29	Cakalang	-	-	15,147	1,682,091	92	-	-	1,697,330
30	Tongkol	1,920	39,039	81,438	1,585,535	37,101	14,159	51,138	1,810,330
31	Lemadang	-	-	-	423,006	-	-	-	423,006
32	Ikan layaran	-	-	-	35,334	-	216	-	35,550
33	Kuniran	-	2,000	4,774	-	1,450	1,386	-	9,610
34	Slengseng	-	-	-	-	-	-	-	-
35	*Ikan lainnya*	-	-	300	9,263	715	1,021	200	11,499
36	Udang dogol	-	-	-	54	-	-	-	54
37	Udang Merah	-	-	-	85	-	-	-	85
38	Udang putih	-	-	-	1,138	-	-	-	1,138
39	Udang barong / Lobster	1,230	5,400	301	7	381	1,517	155	8,991
40	*Udang lainnya*	-	-	-	30,939	-	-	-	30,939
41	Kepiting	-	-	-	-	-	-	-	-
42	Rajungan	-	-	-	-	28	-	-	28
43	Cumi-cumi	-	-	-	6,530	700	-	-	7,230
44	*Rumput laut*	36,000	-	-	-	2,000	-	-	38,000
	JUMLAH	**48,690**	**673,919**	**1,099,339**	**7,786,236**	**814,774**	**239,574**	**153,071**	**10,815,603**